



LAPORAN KINERJA

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PANJANG

2022

KEMENKES RI DITJEN P2P KKP PANJANG

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya, kita dapat menyusun Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta INPRES Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan - RB) Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai salah satu cara untuk evaluasi yang objektif, efisien, dan efektif terhadap kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang yang memiliki tugas dan fungsi cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dan memberikan manfaat serta dapat meningkatkan kualitas kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang dimasa mendatang.

Bandar Lampung, Januari 2023

Kepala Kantor,

Sulistyono, SKM, M. Kes

NIP. 197011201993031002

LEMBAR REVIU PIMPINAN

LAKIP ini telah direviu oleh pejabat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang :

Catatan : - Laporan Kinerja Tahun 2022 KKP Kelas II Panjang telah direviu oleh Ka. Subbag Adum	**Catatan :** - Laporan Kinerja Tahun 2022 KKP Kelas II Panjang telah direviu oleh Koordinator Substansi PKSE
Pengesahan, Tanggal : 19 Januari 2023 Ka. Subbag Administrasi Umum **Asrul Hudaira, S.Pd,MKM** NIP 196705241989031004	**Pengesahan,** Tanggal : 19 Januari 2023 Koordinator Substansi PKSE **dr. Gembong Analisi Wibowo, MPH** NIP 197503152006041002
Catatan: - Laporan Kinerja Tahun 2022 KKP Kelas II Panjang telah direviu oleh Koordinator Substansi PRL	**Catatan :** - Laporan Kinerja Tahun 2022 KKP Kelas II Panjang telah direviu oleh Koordinator Substansi UKLW
Pengesahan, Tanggal : 19 Januari 2023 Koordinator Substansi PRL **Thamrin, SKM, MKM** NIP 197107141994011001	**Pengesahan,** Tanggal : 19 Januari 2023 Koordinator Substansi UKLW **dr. Johansyah** NIP 196812122001121001

Catatan :

- Laporan Kinerja Tahun 2022 KKP Kelas II Panjang telah direviu oleh Kepala KKP Kelas II Panjang

Pengesahan,

Tanggal : 19 Januari 2023

Kepala kantor
Sulistyono, SKM, M. Kes
NIP 197011201999031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini sebagai salah satu cara untuk evaluasi yang objektif, efisien, dan efektif terhadap kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang dalam rangka mewujudkan cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara. Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta INPRES Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Permenpan dan RB Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab atas pencapaian kinerja dari setiap keuangan negara yang digunakan. Garis besar Laporan Kinerja ini memuat informasi terkait rencana kinerja sesuai dengan target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan capaian realisasi kinerja serta realisasi keuangan tahun 2022.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dengan mengukur realisasi target indikator yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Capaian kinerja KKP Kelas II Panjang tahun 2022 sebesar 108%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian kinerja KKP Kelas II panjang tahun 2022 mengalami penurunan karena turunnya persentase indikator capaian kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara dari tahun sebelumnya, walaupun capaian tahun 2022 sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Salah satu kunci keberhasilan capaian kinerja ini adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang untuk memfokuskan pemanfaatan sumber daya dan anggaran kegiatan.

Dari 7 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dijanjikan oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang dengan Direktur Jenderal P2P, semua indikator kinerja melebihi target yang sudah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian Indikator kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 0,98 dengan target 0,93, sehingga capain kinerja sebesar 105%.
2. Capaian indikator kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan sebesar 100% dari target 97%, sehingga capaian kinerja sebesar 104%.
3. Capaian indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 0,99 dengan target 0,80, sehingga capaian kinerja sebesar 124%.
4. Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran 87,35 dari target 85, sehingga capaian kinerja sebesar 103%.
5. Capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 96,13 dari target 93, sehingga capaian kinerja sebesar 103%.
6. Indikator kinerja implementasi WBK satker tercapai sebesar 80,47 dari target 78, sehingga capaian kinerja sebesar 103%.
7. Capaian indikator kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya 88% dengan target 80%, sehingga capaian kinerja sebesar 110%.

Rata rata kinerja capaian indikator KKP Kelas II Panjang tahun 2022 sebesar 108%. Untuk kinerja keuangan pada tahun 2022, berdasarkan OM-SPAN (*Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), realisasi anggaran semua jenis belanja mencapai 97,55% atau sebesar Rp 16.178.082.028,- dari total pagu sebesar Rp 16.584.912.000,-.

Dari analisis atas capaian kinerja tahun 2022 dapat dirumuskan beberapa langkah penting strategi yang dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi yang lebih intensif baik dengan lintas sektor dan lintas program khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melakukan *coffee morning* rutin setiap bulannya dengan para *stake holder* dan membentuk Tim Reaksi cepat Gabungan Dengan Dinkes Prop dan Kab/Kota, *coffee morning* dalam rangka penyelarasan kegiatan pelayanan terintegrasi dan terpadu di Pelabuhan/bandara;
2. Meningkatkan komitmen bersama dan bersinergi yang kuat antar segenap pegawai dalam meningkatkan kinerja dan *performa* KKP Kelas II Panjang dan menjadikan Kepala Kantor sebagai *Role Model* dalam menciptakan iklim kerja yang baik jauh dari korupsi dan nepotisme;
3. Memenuhi sumber daya manusia dengan berbagai kompetensi untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia dengan berbagai pendidikan dan pelatihan teknis yang diperlukan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik secara *online maupun offline*;

4. Memenuhi sumber daya peralatan mendukung operasional kegiatan dalam menunjang kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik dengan melakukan pengadaan ataupun pengajuan permintaan sarana prasarana ke pusat untuk peningkatan pelayanan kekarantinaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
IKHTISAR EKSEKUTIF 2
DAFTAR ISI 5
DAFTAR TABEL 6
DAFTAR GRAFIK 9
BAB I 11
PENDAHULUAN 11
1.1 Latar Belakang 11
1.2 Isu Strategis 13
1.3 Tujuan dan Sasaran Stategis 14
1.3 Tupoksi 16
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi 16
1.3.2 Struktur Organisasi 18
1.3.3 Sumber Daya Manusia 19
1.3.4 Sistematika Penulisan 24
BAB 2 26
PERENCANAAN KINERJA 26
2.1 Target Indikator Kinerja 26
2.2 Perjanjian Kinerja 30
BAB 3 31
AKUNTABILITAS KINERJA 31
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 31
3.2 Realisasi Anggaran 127
3.3 Efisiensi Sumber Daya 130
3.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana 132
BAB 4 134
PENUTUP 134
4.1 Kesimpulan 134
4.2 Rekomendasi 135
DAFTAR LAMPIRAN 136

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Distribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022 20
Tabel 2 Distribusi Jabatan dan Pegawai di Lingkungan 23
Tabel 3 Indikator Kinerja KKP Kelas II Panjang Semula Menjadi 26
Tabel 4 Indikator Kinerja Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 28
Tabel 5 Matriks Indikator Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang 30
Tabel 6 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 32
Tabel 7 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Panjang 33
Tabel 8 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Panjang 34
Tabel 9 Tabel Konversi Indikator Kinerja Indeka deteksi dini faktor risiko 36
Tabel 10 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2020 s.d 2022 36
Tabel 11 PerbandinganTarget dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2020 s.d 2022 41
Tabel 12 Perhitungan Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang 68
Tabel 13 Perbandingan Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut Barang dan Lingkungan 68
Tabel 14 Target dan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut Barang dan Lingkungan 73
Tabel 15 Konversi Nilai Indeks Deteksi Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara 83
Tabel 16 Capaian Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko 84
Tabel 17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2022 87
Tabel 18 Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 97
Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 105
Tabel 20 Capaian Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2022 113
Tabel 21 Capaian Kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya 121
Tabel 22 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022 127
Tabel 23 Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian *Output* 128
Tabel 24 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana 129
Tabel 25 Realisasi Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang 130

Tabel 26 Nilai Efisiensi Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... 131
Tabel 27 Laporan Aset KKP Kelas II Panjang Berdasarkan SIMAK BMN..... 132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang 19

Gambar 2 Kegiatan Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 64

Gambar 3 Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan 80

Gambar 4 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 96

Gambar 5 Dokumentasi Implementasi Kinerja WBK Satker 119

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Proporsi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 21

Grafik 2 Proporsi Jenis Jabatan di Lingkungan Kantor Kesehatan 22

Grafik 3 Proporsi Perbandingan Jenis Jabatan di Lingkungan Kantor Kesehatan 22

Grafik 4 Proporsi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022 24

Grafik 5 Perbandingan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang 34

Grafik 6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko 37

Grafik 7 Capaian Parameter Indeks Deteksi Faktor Risiko 38

Grafik 8 Target dan Realisasi Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2020 s.d 2022 39

Grafik 9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk NegaraTahun 2022 40

Grafik 10 Perbandingan Target dan Realisasi Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, ... 42

Grafik 11 Perbandingan Capaian Kegiatan VCT Mobile HIV/AIDS 44

Grafik 12 Perbandingan Capaian Kegiatan Pengamatan dan Skrining 45

Grafik 13 Perbandingan Capaian Kegiatan Penerbitan Sertifikat 46

Grafik 14 Perbandingan Capaian Kegiatan Penerbitan Sertifikat 47

Grafik 15 Perbandingan Capaian Kegiatan Penerbitan Keur Kesehatan 48

Grafik 16 Perbandingan Capaian Kegiatan Skrining Penyakit Menular TB 49

Grafik 17 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Dalam Rangka 51

Grafik 18 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Dalam Rangka 52

Grafik 19 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Dalam Rangka 52

Grafik 20 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Dalam Rangka 53

Grafik 21 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Dalam Rangka 54

Grafik 22 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Pemeriksaan 55

Grafik 23 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Pemeriksaan 57

Grafik 24 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Pemeriksaan 58

Grafik 25 Perbandingan Capaian Kegiatan Pengendalian Vektor Tahun 2022 59

Grafik 26 Target dan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk 69

Grafik 27 Target dan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut Barang dan Lingkungan

Tahun 2020 s.d 2022 70
Grafik 28 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase 71
Grafik 29 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, ... 72
Grafik 30 Grafik dan Target Capaian Kinerja Indeks Pengendalian 85
Grafik 31 Grafik Perbandingan dan Target Capaian Kinerja Indeks 85
Grafik 32 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Dengan Satker Sejenis Tahun 2022 87
Grafik 33 Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 98
Grafik 34 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022 98
Grafik 35 Perbandingan Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan 99
Grafik 36 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran 105
Grafik 37 Capaian Indikator Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran 106
Grafik 38 Perbandingan Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan 107
Grafik 39 Perbandingan Capaian Kinerja Implementasi WBK Satker 114
Grafik 40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Implementasi 115
Grafik 41 Target dan Capaian Kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan 121
Grafik 42 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan 122
Grafik 43 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase ASN Yang 123

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perspektif saat ini pembangunan kesehatan menekankan dua penguatan, yaitu optimalisasi inovasi layanan kesehatan dan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan. Optimalisasi inovasi layanan kesehatan dimaksudkan untuk mengefisiensikan tindakan-tindakan yang mahal dengan mengoptimalkan inovasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat dan alat kesehatan produk lokal dalam negeri tanpa mengurangi kualitas dan mutu. Sementara harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan terkait konektivitas antar kementerian dan lembaga, lintas sektor maupun unit-unit kerja lintas program terkait lebih ditingkatkan, agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga fokus pada pemecahan masalah kesehatan. Semua itu membutuhkan dedikasi dan profesionalitas kinerja segenap pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sejak WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020, Virus Corona menjadi pandemi, masalah kesehatan dunia. Kesadaran bahwa Virus Corona masih menjadi musuh bersama, menjadikan kita semua tetap waspada untuk melawan bersama-sama. Setelah berlalu selama lebih kurang 2 tahun, beberapa negara di dunia masih berjibaku menghadapi pengendalian Virus Corona yang kasusnya masih naik turun. Covid-19 adalah virus yang dapat bermutasi menjadi varian baru. Banyaknya ditemukan varian baru menjadikan perjuangan melawan pandemi belum usai. Walaupun, mutasi Covid-19 menjadi banyaknya jenis varian baru, tetapi sampai saat ini belum ada terjadi perubahan struktur virus sehingga pengobatan dan vaksin saat ini masih tetap efektif dalam melawan penyebaran virus. Sejumlah negara mengalami lonjakan kasus Covid-19 dengan varian Delta, selanjutnya bermutasi menjadi Omicron dan sudah dilaporkan adanya negara yang terserang varian Delta dan Omicron secara bersamaan.

Di Indonesia, sejak tanggal 17 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa Covid-19 adalah masalah kesehatan yang menjadi status penyakit dengan tanggap darurat sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) serta bencana nasional non alam yang wajib terus dilakukan upaya pengawasan di pintu-pintu masuk negara terhadap penumpang angkutan laut, udara dan darat. Upaya yang dilakukan

seperti skrining dan surveilans pada setiap pelaku perjalanan dan dilakukan vaksinasi Covid-19 pada seluruh insan pelabuhan dan bandara dalam rangka kesiapsiagaan melawan Covid-19.

Indonesia masih belum sepenuhnya pulih dari Covid-19, sehingga diperlukan *safety net* berupa kehati-hatian dan kewaspadaan di tengah aktivitas sosial ekonomi yang terus berjalan dan secara alamiah mampu meningkatkan peluang penularan jika berjalan tanpa pengawasan. Agar Covid-19 menjadi endemi, harus ada upaya mengelola risiko penularan. Tujuannya adalah untuk mempertebal lapisan proteksi dari berbagai ancaman penularan. Hal itu karena karakter virus Covid-19 semakin kompleks karena terus berubah. Dengan begitu endemi belum menjadi ketetapan pemerintah setelah 3 tahun pandemi Covid-19. Endemi adalah keadaan ketika kegiatan masyarakat menjadi normal tanpa kehilangan kewaspadaan terhadap infeksi. Caranya dengan mematuhi protokol kesehatan: memakai masker, menjaga kesehatan dan kebersihan, menjaga jarak.

Setiap propinsi di Indonesia minimal terdapat 1 KKP, bahkan ada beberapa propinsi yang KKP nya lebih dari 1 berdasarkan banyaknya pelabuhan di daerah tersebut mengingat Indonesia adalah wilayah maritim. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Panjang merupakan salah satu dari 51 KKP yang ada di Indonesia. KKP Kelas II Panjang terletak di Bandar Lampung Propinsi Lampung dimana Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan induk dan terdiri dari 4 wilayah kerja yaitu Pelabuhan Bakauheni, Bandara Raden Inten II Branti, Pelabuhan Teluk Semangka dan Pelabuhan Rawajitu. Pelabuhan Panjang merupakan salah satu dari 24 pelabuhan di Indonesia yang diandalkan untuk mendukung konsep kemaritiman yang direncanakan oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan, Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang keluar masuknya lalu lintas Pulau Sumatera dan Jawa yang dihubungkan oleh transportasi layanan kapal ferry *roll on* dan *roll off* (yang biasa disebut kapal roro) antara Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak.

Menyikapi hal tersebut, KKP Kelas II Panjang sebagai salah satu mata negara bidang kesehatan mempunyai tugas yang berat digarda terdepan pintu masuk negara, baik pelabuhan laut maupun udara dalam rangka pengawasan dan pencegahan penyebaran keluar masuk penyakit ke Indonesia. Untuk itu, persiapan yang matang baik Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus selalu ditingkatkan.

1.2 Isu Strategis

Saat ini, yang menjadi isu strategis KKP Kelas II Panjang masih seputaran permasalahan Covid-19 dalam hal pencegahan dan pengendalian Covid-19 di pintu masuk provinsi Lampung diantaranya Bandara Radin Inten II dan Pelabuhan Bakauheni. Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang merupakan gerbang keluar masuk Pulau Sumatera dan Jawa. Sehingga, mobilitas masyarakat yang keluar masuk Provinsi Lampung pada khususnya dan seluruh Sumatera pada umumnya terjadi begitu cepat. Hal ini masih memiliki risiko yang lebih besar untuk terjadinya transmisi/penyebaran Corona Virus yang penularannya dari manusia ke manusia. Dalam hal ini pencegahan dan pengendalian yang dilakukan di pintu masuk wilayah seperti Wilayah Kerja Pelabuhan Bakauheni dan Bandara Radin Inten II Branti adalah dengan membuka layanan vaksinasi bagi pelaku perjalanan yang belum mendapatklan vaksinasi Covid-19. Disamping itu, masih masalah Covid-19, pada tahun 2022 sudah dibukanya layanan Haji di Arab Saudi. Karena dunia masih dalam status pandemi, maka kuota Jemaah haji ditetapkan sepertiga dari kuota normalnya. Termasuk Indonesia yang juga memberangkatkan jemaah hajinya sepertiga dari jumlah biasanya dengan ketentuan membatasi umur dibawah 60 tahun. Disamping mewaspadai PHEIC, musim haji sekarang ini juga diiringi oleh wabah pandemi Covid-19. Dalam rangka mencegah penyebaran dan mengendalikan Covid-19, pemerintah Indonesia telah memberlakukan protokol Kesehatan pada masa pandemi Covid-19 baik bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) mapun pelaku perjalanan domestik. Jamaah haji yang merupakan bagian dari PPLN. Untuk itu perlu dilakukan Penyelenggraaan ibadah haji tahun 2022M/1443H ini dengan pengawasan kekarantinaan kesehatan, pemberlakukan protokol kesehatan selama pandemi dan pelayanan Kesehatan pada Embarkasi/Debarkasi yang diselenggarakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Keberangkatan dan kepulangan jamaah haji Indonesia tahun 2022 disertai penerapan protocol Kesehatan layaknya PPLN sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Edaran Gugus Tugas Pusat Covid-19 dimana setiap jemaah yang datang di embarkasi haji dilakukan RTD Antigen Covid-19 sebagai bentuk skrining dipintu masuk negara. Jika terdapat yang positif dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri dengan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas asal jemaah. Sedangkan, KKP akan melakukan penyedilidikan epiodemiologi serta mengecek K3JH jemaah haji tersebut dan jemaah haji lainnya.

Pandemi Covid-19 telah mengubah kebiasaan setiap orang. Kini kita terbiasa memakai masker di ruang publik, lebih peduli pada kebersihan, dan jadi terbiasa bekerja jarak jauh. Tiga kali gelombang varian Covid-19, dari delta hingga omicron, tanda-tanda endemi atau

hidup bersama virus belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Jumlah kasus positif Covid harian menurun sejak 2021 sebesar 53%. Dari 11.287 kasus menjadi 5.253 kasus pada 2022.

Seiring infeksi yang menurun setelah program vaksinasi massal dimulai, kasus kematian Covid-19 pun menurun sebesar 91% dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu kematian mencapai 220 per hari. Tahun ini sebanyak 19 kematian harian. Jumlah kasus aktif juga turun dari 358.357 kasus pada 2021 menjadi 53.132 kasus pada 2022. Dengan demikian jumlah okupansi tempat tidur ruang perawatan dan rumah sakit di tingkat nasional juga ikut menurun dari 39,63% pada tahun 2021 menjadi hanya 6,44% pada tahun 2022. Angka itu menggambarkan bahwa tingkat kesembuhan juga ikut meningkat dua kali lipat dari 3,5 juta jiwa menjadi 6 juta jiwa. Berkaitan dengan vaksinasi, juga naik tahun 2021 cakupan dosis satu hanya 26,4% dan dosis kedua sebesar 14%. Pada 2022 ini dosis satu telah naik menjadi 86,52% dan dosis kedua sebesar 72,608%. Menurut Wiku, vaksin *booster* atau vaksin penguat tahun 2022 telah mencakup 25,1% populasi.

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang (KKP) yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Ditjen P2P Kemenkes) yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini KKP menjadi garda terdepan dalam screening para pelaku perjalanan baik melalui laut dan udara.

1.3 Tujuan dan Sasaran Stategis

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2022- 2024 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Visi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai UPT Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI mendukung Visi dan Misi Presiden RI dalam implementasi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas II Panjang tahun 2021-2024. Merujuk pada amanah tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2021-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan sumber daya Kesehatan; dan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Untuk mencapai tujuan startegis Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2024 khususnya tujuan strategis Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021-2024 dalam peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang memiliki tujuan

strategis tahun 2021-2024 yaitu terkendalinya faktor risiko penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024. Tujuan tersebut akan diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Selaras dengan sasaran strategis pada Renstra Kemkes 2021-2024 dan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, maka Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang menetapkan sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    1) Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 0,95 pada akhir tahun 2024;
    2) Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100% pada akhir tahun 2024;
    3) Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 1 pada akhir tahun 2024.
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 100% pada akhir tahun 2024, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    1) Nilai Kinerja Anggaran yaitu 92 pada akhir tahun 2024;
    2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu 98 pada akhir tahun 2024;
    3) Kinerja Implementasi WBK satker yaitu 79 pada akhir tahun 2024:
    4) Persentase Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya L sebesar 82% pada akhir tahun 2024.

1.3 Tupoksi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang merupakan salah satu dari 51 Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ada di Indonesia yang berada di pintu masuk negara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah satuan kerja yang bersifat mandiri melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dari organisasi induknya. Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah

kerja pelabuhan, Bandar udara dan pos lintas darat negara. KKP melaksanakan tugasnya untuk penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran, pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan, pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan, pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan, pelayanan kegawatdaruratan dan situasi khusus, pelaksanaan penindakan pelanggaran dibidang kekarantinaan kesehatan, pengelolaan data dan informasi dibidang kekarantinaan kesehatan serta pelaksanaan jejaring, kordinasi dan kerjasama dibidang kekarantinaan Kesehatan (Permenkes Nomor 33 tahun 2021).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 33 tahun 2021 Pasal 5, KKP menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
k. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan berdasarkan Permenkes Nomor 33 tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, pada kantor kesehatan pelabuhan kelas II terbagi dalam subbagian administrasi umum dan kelompok jabatan fungsional sebagai berikut :

1.3.1.1 Subbagian Administrasi Umum

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas II.

1.3.1.2 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.3.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Permenkes Nomor 33 tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP Kelas II Panjang terdiri dari :

a. Kepala Kantor
b. Subbagian Administrasi Umum
c. Instalasi
d. Wilayah Kerja
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelabuhan/Bandara yang menjadi kewenangan dan wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang sebagai berikut :

1) Pelabuhan Induk Laut Panjang
2) Bandara Radin Inten II Branti
3) Pelabuhan Laut Bakauheni
4) Pelabuhan Laut Teluk Semangka
5) Pelabuhan Rawajitu

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022



Sumber : Permenkes No. 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP

1.3.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang terdiri dari 77 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 32 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Sejumlah pegawai baik yang statusnya ASN maupun sebagian PPNPN tersebut ditempatkan di berbagai Wilayah Kerja (Wilker) KKP Kelas II Panjang seperti di Kantor Induk Pelabuhan Panjang, Wilayah Kerja Pelabuhan Bakauheni, Wilayah Kerja Bandara Radin Inten II Branti, Wilayah Kerja Pelabuhan Teluk Semangka dan Wilayah Kerja Pelabuhan Rawajitu. Sebagian besar PPNPN ditempatkan di Pelabuhan Bakauheni untuk pengawasan pengendalian dan penanganan Covid-19 khususnya pada penumpang kapal ferry *roll on rool off* antara Pelabuhan Bakauheni dan Merak.

Kualifikasi sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang adalah kemampuan yang berupa kognitif, afektif dan psikomotor, sehingga diharapkan akan mampu melakukan respon aksi terhadap kondisi yang ada secara cepat dan tepat. Semakin banyak jumlah pegawai yang memiliki pendidikan tinggi dalam suatu institusi diharapkan kinerja institusi yang bersangkutan akan semakin baik, dilihat dari segi proses maupun capaian kinerja yang ditetapkan.

Berikut ini adalah distribusi pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang berdasarkan beberapa kategori yang dapat dilihat sebagai berikut:

a) Berdasarkan Pendidikan

Berikut adalah data kepegawaian berdasarkan pendidikan :

Tabel 1 Distribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar	1	1,3%
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	3	3,9%
3	Diploma III	28	36,4%
4	Diploma IV	4	5,2%
5	Sarjana (S.1)	28	36,4%
6	Pasca Sarjana (S.2)	13	16,9%
		77	**100,00%**

Sumber : Ropeg kemenkes RI, SIMKA KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

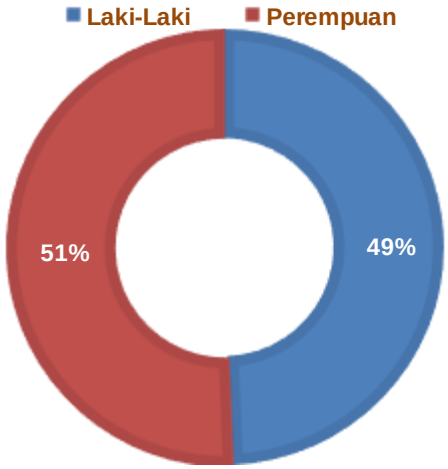
Pada tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan pegawai KKP Kelas II Panjang pada tahun 2022 sebagian besar berpendidikan strata 1 (S1) yaitu sebanyak 28 orang (36,4%) dan Diploma III juga sebanyak 28 orang (36,4%). Sehingga sumber daya di KKP Kelas II Panjang telah mencukupi dari segi fungsi analisis kebijakan, tetapi belum memenuhi dari segi program maupun pada beban kerja fungsi pelaksana teknis baik di induk maupun wilayah kerja.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang senantiasa mengalami perubahan dari segi kuantitas atau jumlah. Penambahan jumlah pegawai berasal dari penerimaan CPNS tahun 2022 dan pegawai pindahan.

b) Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini adalah data kepegawaian KKP Kelas II Panjang berdasarkan jenis kelamin :

Grafik 1 Proporsi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022



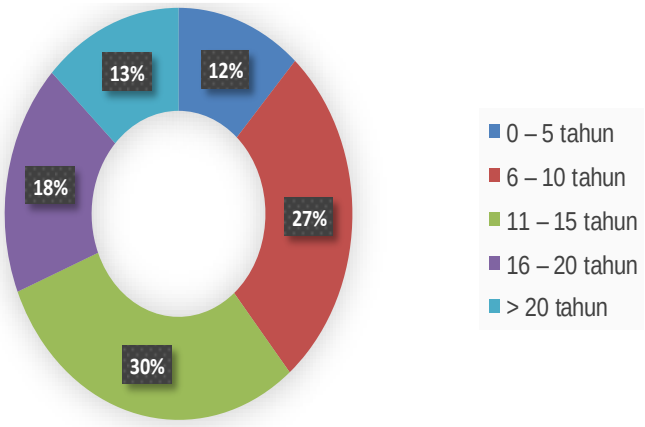
Sumber data: Ropeg Kemenkes RI, SIMKA KKP Kelas II Panjang tahun 2022

Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin di KKP Kelas II Panjang pada tahun 2022 sebanyak 77 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 36 orang (48%), sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 39 orang (52%). Angka ini menjadi dasar dalam penempatan pegawai disesuaikan dengan tempat dan jenis pekerjaan. Komposisi ini agak sedikit menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas terutama berkaitan dengan *boarding* kapal.

c) Berdasarkan Lama Kerja

Ini melihat lamanya pegawai bekerja di KKP Kelas II Panjang yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 1 Proporsi Pegawai Berdasarkan Lama Kerja di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022



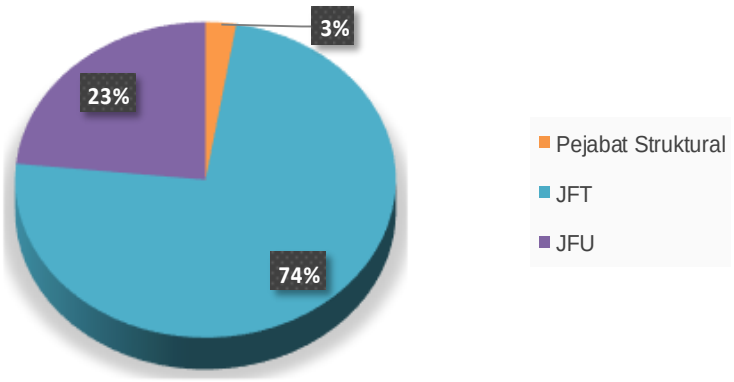
Sumber : Data Ropeg kemenkes RI, SIMKA KKP Kelas II Panjang tahun 2022

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pegawai yang paling banyak pada masa kerja 11-15 tahun (30%) dan 6-10 tahun (27%) selanjutnya pegawai yang bekerja 16 -20 tahun (18%).

d) Berdasarkan Jenis Jabatan

Di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang jenis jabatan yang ada adalah Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU). Adapun proporsi jenis jabatan per Desember 2022, sebagai berikut :

Grafik 2 Proporsi Jenis Jabatan di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022



Sumber : Data Ropeg kemenkes RI, SIMKA KKP Kelas II Panjang tahun 2022

Dari diagram di atas diketahui bahwa proporsi jabatan terbesar yang ada di KKP Kelas II Panjang tahun 2022 adalah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebesar 74%, sedangkan umtuk JFU sebanyak 23%.

Untuk perbandingan peningkatan JFT dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Grafik 3 Proporsi Perbandingan Jenis Jabatan di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2021 dan 2022



Sumber : Data Ropeg kemenkes RI, SIMKA KKP Kelas II Panjang tahun 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang menduduki JFT meningkat dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2021 jumlah JFT sebanyak 50 orang (67%) dan tahun 2022 meningkat menjadi 54 orang (74%). Walaupun demikian, masih menjadi tantangan bagi pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang untuk meningkatkan proporsi JFT mencapai 90% agar sejalan dengan kebijakan pemerintah, agar setiap pegawai diarahkan untuk menduduki jabatan fungsional tertentu. Hal ini menjadi tugas dan kewenangan bagi pejabat struktural untuk memfasilitasi dan mendorong pegawainya agar dapat menduduki jabatan fungsional tertentu.

e) Distribusi Per Substansi dan Wilayah Kerja

Distribusi jabatan dan pegawai yang ada di KKP Kelas II Panjang keadaan per Desember 2022 di Subbagian Administrasi Umum dan setiap Substansi serta wilayah kerja baik jabatan struktural, jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Distribusi Jabatan dan Pegawai di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022

Nama Unit Organisasi	Jabatan					Total
	Struktural			JFT	JFU	
	Es. III	Es. IV	Es. V			
Substansi Pengendalian Karantina Dan Surveilans Epidemiologi	0	0	0	16	2	18
Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan	0	0	0	11	3	14
Substansi Upaya Kesehatan Dan Lintas Wilayah	0	0	0	8	2	10
Subbagian Administrasi Umum	0	1	0	5	6	12
Wilker Bandara Radin Intan II	0	0	0	7	3	10
Wilker Pelabuhan Laut Bakauheni	0	0	0	4	5	9
Wilker Pelabuhan Laut Teluk Semangka	0	0	0	2	0	2
Wilker Pelabuhan Laut Rawajitu	0	0	0	1	0	1
Kepala Kantor	1	0	0	0	0	1
TOTAL	**1**	**1**	**0**	**54**	**21**	**77**

Sumber Data: Ropeg kemenkes RI, SIMKA KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

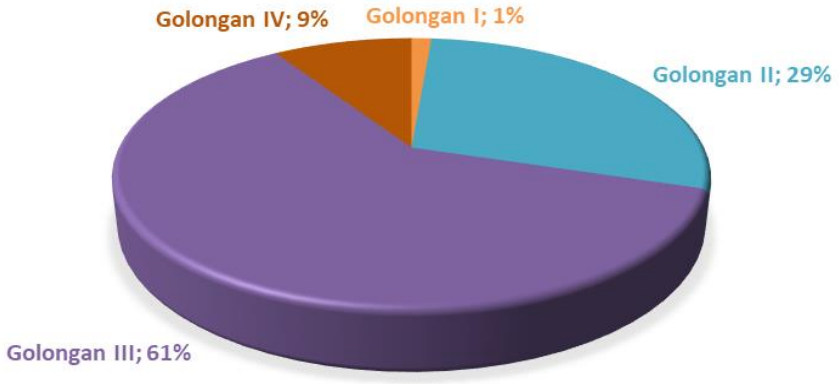
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa distribusi pegawai KKP Kelas II Panjang paling banyak pada substansi Pengendalian Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi (PKSE) sebanyak 18 orang, Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL) sebanyak 14 orang,

Subbagian Administrasi Umum sebanyak 12 orang serta Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW) sebanyak 10 orang. Untuk staf di Wilayah Kerja Bandara Radin Inten II Branti sebanyak 10 orang, Wilayah Kerja Pelabuhan Bakauheni sebanyak 9 orang, Wilayah Kerja Pelabuhan Teluk Semangka sebanyak 2 orang dan Wilayah Kerja Rawajitu sebanyak 1 orang.

f) Berdasarkan Golongan

Berikut ini menyajikan kepangkatan dan golongan pegawai KKP Kelas II Panjang yang dapat disajikan pada grafik dibawah ini :

Grafik 4 Proporsi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022



Sumber Data: Ropeg kemenkes RI, SIMKA KKP Kelas II Panjang tahun 2022

Diagram menunjukan proporsi pegawai di KKP Kelas II Panjang berdasarkan pangkat/golongan terbesar adalah golongan III sebesar 61%. Angka tersebut menunjukan bahwa sumber daya di KKP Kelas II Panjang dari segi keilmuan dan keterampilan teknis sudah memenuhi kompetensi untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

1.3.4 Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

   Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

   Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan

tahun 2021.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

   a. Capaian Kinerja Organisasi

      Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

   b. Realisasi Anggaran

      Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

   Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Target Indikator Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perencanaan kinerja instansi pemerintah terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK). Perencanaan tahunan Ditjen P2P tahun 2022 mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Program Ditjen P2P Tahun 2021-2024 yang telah dilakukan ditetapkan pada tahun 2022, sehingga untuk Laporan Kinerja Tahun 2022 akan menggunakan indikator yang tertera pada RAP Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021-2024.

Indikator Kinerja KKP pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklajuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan. Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut :

Tabel 3 Indikator Kinerja KKP Kelas II Panjang Semula Menjadi

No.	Indikator Tahun 2020-2024 (Semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (Revisi)
1.	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara
2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
4.	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6.	Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
7.	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Tahun 2022-2024, KKP Kelas II Panjang telah menetapkan 7 indikator yakni:

1. **Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk Negara**

   Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

2. **Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan**

   Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP.

3. **Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara**

   Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. **Nilai kinerja anggaran**

   Nilai kinerja anggaran merupakan *performance budgeting* penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran oleh satuan kerja difasilitasi dengan Aplikasi SMART. Variabel yang diukur yaitu capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

5. **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

   Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Kinerja implementasi WBK satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

Dibawah ini adalah target indikator kinerja yang terdapat dalam RAK awal tahun 2020-2024 yang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4 Indikator Kinerja Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1.	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan.	1.983.000	1.090.650	1.199.715	1.319.687	1.451.655
		2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.	95%	95%	96%	98%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara.	90%	90%	94%	97%	100%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.	Nilai kinerja anggaran.	80	85	85	88	90
		5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.	80	93	94	95	96
		6.	Kinerja implementasi WBK satker.	70	75	77	78	79
		7.	Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 85%.	45%	45%	80%	81%	82%

Sumber : RAK KKP Kelas II Panjang Tahun 2021-2024

Kemudian pada Bulan Juli 2022 dilakukan revisi untuk menindaklajuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan. Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET		
				2022	2023	2024
1.	Meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1.	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	0.93	0.94	0.95
		2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.	100%	100%	100%
		3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara.	0,8	0,9	1
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.	Nilai kinerja anggaran.	90	91	92
		5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.	96	97	98
		6.	Kinerja implementasi WBK satker.	77	78	79
		7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	81%	82%

Sumber : RAK Revisi KKP Kelas II Panjang Tahun 2021-2024

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang tahun 2022 ditetapkan pada Desember 2021 antara Kepala satuan kerja dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang memuat 2 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) substansi dan Subbag Administrasi Umum. Selanjutnya dilakukan revisi pada Juli 2022 seiring adanya perubahan pada indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 Matriks Indikator Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022

No	Indikator Tahun 2022 (Semula)	Target	Indikator Tahun 2022 (Revisi)	Target
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	1.199.715	Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara	0,93
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	96%	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	94%	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,8
4	Nilai kinerja anggaran	85	Nilai kinerja anggaran	90
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
6	Kinerja implementasi WBK satker	77	Kinerja implementasi WBK satker	77
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

Sumber : RAK dan RAK Revisi KKP Kelas II Panjang Tahun 2021-2024

Pencapaian target indikator kinerja tahun 2022 dilaksanakan melalui kegiatan dan anggaran sesuai dengan DIPA KKP Kelas II Panjang nomor : SP.DIPA-024.05.2.415799/2021 tanggal 12 November 2021 sebesar Rp 16.584.912.000, (Enam Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dan terdapat 4 kali revisi DIPA berkaitan dengan anggaran haji, tetapi tidak merubah pagu anggaran sebelumnya.

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah salah satu cara mungukur kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dengan membandingkan antara realisasi dengan target capaian indikator sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Tujuan pengukuran capaian kinerja ini dapat memberikan informasi pelaksanaan kegiatan masing-masing indikator, sehingga dapat diketahui gambaran kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang serta dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategi dan penetapan kinerja. Pengukuran kinerja ini selanjutnya dilakukan dengan membuat perbandingan per indikator kegiatan dengan tahun sebelumnya. Hal ini, bisa menjadi bahan evaluasi dan monitoring bagi satker untuk dapat ditindaklanjuti dalam proses perencanaan program/kegiatan yang lebih berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efisien dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan kegiatan yang efektif dengan pemanfaatan anggaran yang efisien perlu dijadikan suatu kebiasaan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Efisiensi dan efektivitas dapat melihat sejauh mana suatu keadaan keuangan mempergunakan atau memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara ekonomis, hemat (efisien) dan dilakukan secara tepat dan memenuhi sasaran (efektif) serta hasil yang dicapai tersebut memilki rasionalitas terhadap penggunaan sumber-sumber yang ada (produktivitas). Konsep efisiensi menurut Nordiawan dan Ayuningtyas (2010) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-serendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan (Sumenge, 2013). Sedangkan, Adisasmita (2011) mengatakan bahwa efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Karena itu efisiensi dapat diukur sebagai rasio output terhadap input.

Perhitungan efisiensi anggaran menurut PMK No. 214 tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dapat dilihat pada rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Dalam mengukur capaian kinerja organisasi perlu ditetapkan target sasaran dari setiap indikator kegiatan KKP Kelas II Panjang yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang diuraikan pada penjelasan dibawah ini :

Tabel 6 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
1.	Meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,93	0,98	105%
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.	97%	100%	104%
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,80	0,99	124%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	85	87,35	103%
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	96,12	103%
		6. Kinerja implementasi WBK satker	78	80,47	103%
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	88%	110%
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA					**108%**

Sumber : Matriks Capaian PK Panjang Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja KKP Kelas II Panjang tahun 2022 sebesar 108%. Capaian Kinerja paling tinggi berada indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara mencapai 124%.

Untuk mengetahui perbandingan capaian kinerja antara tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		CAPAIAN		TAHUN 2022		
				2020	2021	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Meningkatnya faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1.	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan.	209%	271%	1.	Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara	105%
		2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.	105%	105%	2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.	104%
		3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara.	121%	131%	3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	124%
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.	Nilai kinerja anggaran.	108%	108%	4.	Nilai kinerja anggaran	103%
		5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.	125%	113%	5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	103%
		6.	Kinerja Implementasi WBK Satker.	121%	113%	6.	Kinerja implementasi WBK satker	103%
		7.	Persentase Peningkatankapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 85%.	104%	82%	7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	110%
				128%	**130%**			**108%**

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020 s. d 2022

Dari tabel diatas tertera bahwa pencapaian kinerja tahun 2020 sebesar 128%, tahun 2021 sebesar 130% dan tahun 2022 sebesar 108%. Dibanding tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan nilai kinerja. Jika dilihat capaian per indikator kinerja, ada yang mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun sebelumnya. Tetapi, pada dasarnya semua indikator kinerja yang ditetapkan sudah melebihi target yang ditetapkan.

Berikut ini dapat dilihat capaian Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Panjang dalam 3 tahun terakhir :

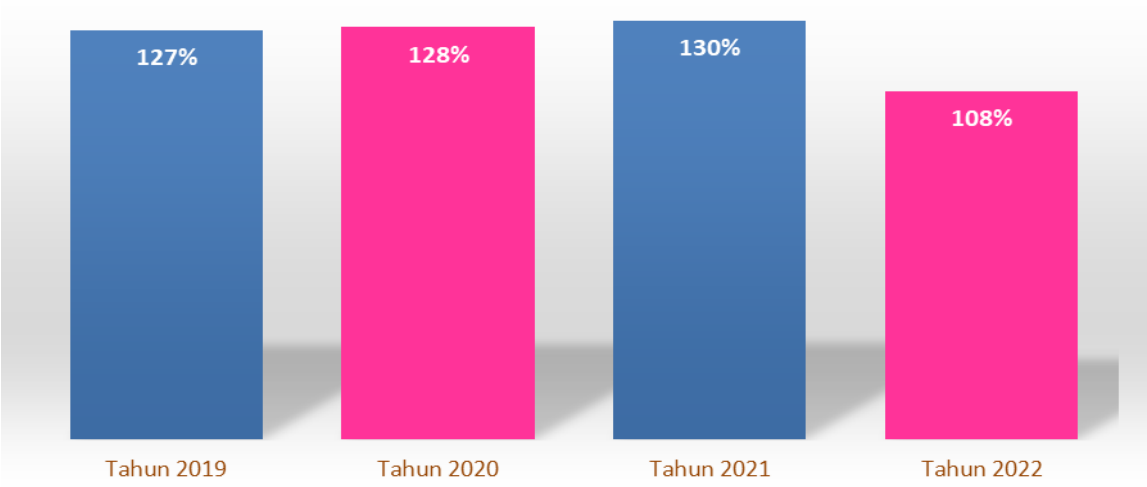
Tabel 8 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2019 s.d 2022

NO	Perjanjian Kinerja	Capaian
1.	Perjanjian Kinerja 2019	127%
2.	Perjanjian Kinerja 2020	128%
3.	Perjanjian Kinerja 2021	130%
4.	Perjanjian Kinerja 2022	108%

Sumber : Laporan Kinerja KKP Kelas II Panjang tahun 2019 s.d 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Panjang 2019 s.d 2021 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Tetapi capaian kinerja tahun 2022 terdapat penurunan dari tahun – tahun sebelumnya, walaupun nilai capaian kinerja tahun 2022 masih melebihi target yang sudah ditetapkan. Dibawah ini menyajikan grafik perbandingan capaian kinerja dari tahun 2019 s.d 2022 sebagai berikut :

Grafik 5 Perbandingan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2020 s.d Tahun 2022



Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020 s. d 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 terdapat penurunan dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 108%. Walaupun demikian, capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan.

Pencapaian realisasi dari setiap indikator Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Panjang tahun 2022 dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. INDIKATOR PERTAMA

INDEKS DETEKSI FAKTOR RISIKO DI PINTU MASUK NEGARA

1) **Pengertian :** Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLBDN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan melakukan fungsi pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan. Jadi, indeks ini dihitung dari 4 parameter yakni Indeks persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

2) **Definisi Operasional :** Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, air dan udara) yang dilakukan, kemudian dimasukkan dalam rumus indeks.

3) **Rumus/Cara Perhitungan :** Perhitungan didapat dari data pengukuran 4 parameter yaitu :
    1. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar
    2. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar
    3. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar
    4. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai dengan standar

Mengukur kinerja deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara

- Range indeks 0-1
- Bobot dihitung berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)
- Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang skor minimal)

Tabel 9 Tabel Konversi Indikator Kinerja Indeka deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara Tahun 2022

No	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8
1	Persentase orang yang diperiksa sesuai standar	5	120	120,0	600	100	120	600
2	Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar	5	120	120,0	600	100	120	600
3	Persentase barang yang diperiksa sesuai standar	3	108	108,0	324	100	120	360
4	Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	5	120	120,0	600	100	120	600
	TOTAL				**2.124**			**2.160,00**

Nilai Indeks = Score / Score Max = 2,124 / 2,160 = **0,98**

Jadi, nilai indeks faktor Resiko di pintu masuk negara sebesar 0,98.

4) Capaian Indikator

Capaian indikator kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara pada tahun 2022 adalah sebesar 0,98 (105%). Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan. Hasil capaian indikator kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara tahun 2020 s.d tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2020 s.d 2022

Uraian	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Tahun Sebelumnya	2020	0,92	0,96	104%
	2021	0,93	0,97	104%
Tahun ini	**2022**	**0,93**	**0,98**	**105%**

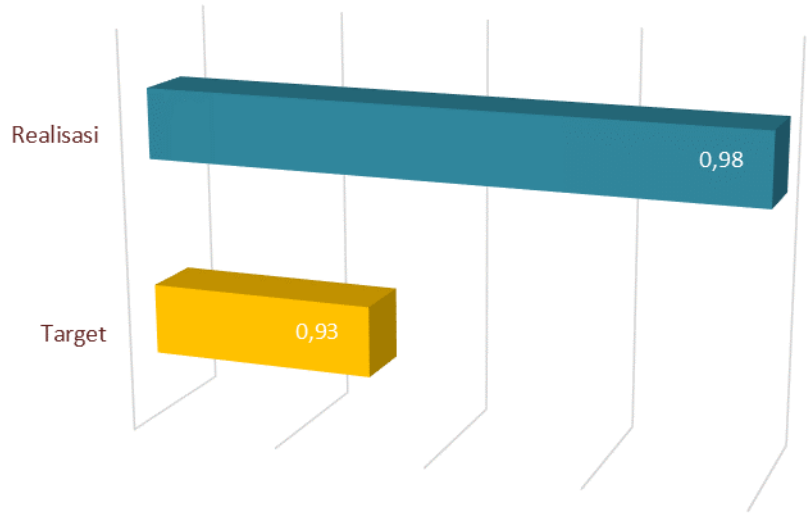
Uraian	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Target Jangka Menengah	2022	-	-	-
Target Nasional	2022	-	-	-
KKP Sejenis	2022	0,94	0,94	100%

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020 s. d 2022

a) Realisasi Tahun Ini

Berikut ini menampilkan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara sebagai berikut :

Grafik 6 Target dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2022

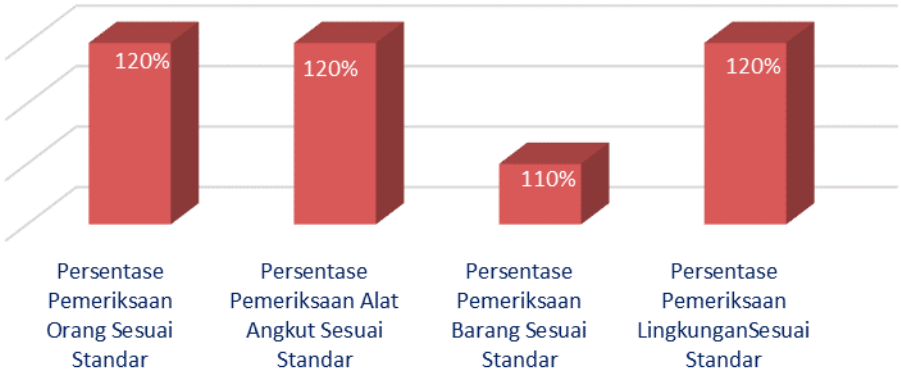


Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa realisasi capaian indikator kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara pada tahun 2022 sebesar 0,98 dari target 0,93 (105%). Pencapaian indikator kegiatan ini masih dipengaruhi oleh kegiatan surveilans rutin pada masa pandemi Covid-19 tidak hanya pada pelaku perjalanan yang berasal dari luar negeri yang dilakukan pengawasan dan pengendalian, tetapi semua pelaku perjalanan domestik yang memasuki wilayah Propinsi Lampung baik melalui laut dan udara yang melewati setiap Pelabuhan dan Bandara yang menjadi wilayah kerja KKP Kelas II Panjang (Wilayah Kerja Pelabuhan Bakauheni, Wilayah Kerja Bandara Radin Inten II Branti, Wilayah Kerja Pelabuhan Teluk Semangka dan Wilayah Kerja Rawajitu).

Mengukur kinerja deteksi dini faktor risiko di pintu masuk negara diperoleh data dari 4 parameter yaitu : Persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar. hasil capaian 4 parameter tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 7 Capaian Parameter Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2022



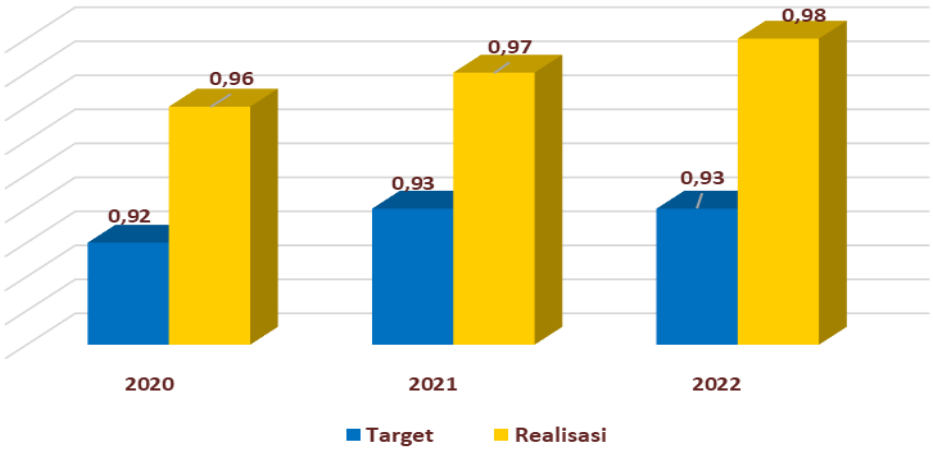
Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian parameter pemeriksaan orang, alat angkut dan lingkungan sama yakni sebesar 120%, sedangkan capaian pemeriksaan barang sebesar 110%.

b) Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Berikut ini menampilkan grafik perbandingan target dan realisasi perbandingan indikator kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut :

Grafik 8 Target dan Realisasi Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari Grafik 5 diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara dari tahun 2020 s.d 2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya sebanyak 0,1. Capaian indikator ini masih dipengaruhi kegiatan pengawasan Covid-19 dipintu masuk negara dengan melakukan surveilans rutin pada setiap pelaku perjalanan/penumpang/ABK/*crew* kapal/*crew* pesawat yang melewati pintu masuk di Pelabuhan/Bandara.

c) Perbandingan dengan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2021-2024

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0,98 (105%) dengan target dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2022 – 2024, maka capaian indikator kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara KKP kelas II Panjang tahun 2022 sudah melebihi target lima tahunan RAK tahun 2024 (0,95).

d) Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah

Pada Renstra Kemenkes dan RAP Ditjen P2P Tahun 2020-2024 tidak terdapat indikator indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara, namun indikator ini mendukung pencapaian target indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan tahun 2022 sebesar 93% dalam RAP Ditjen P2P.

e) Perbandingan Dengan Target Nasional

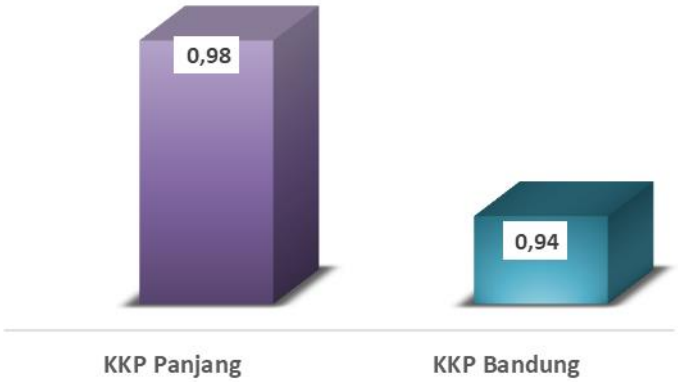
Perbandingan dengan target nasional pada indikator ini tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat dalam target dan capaian nasional. Target ini mendukung pencapaian target indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang

dikendalikan tahun 2022 sebesar 93% dalam RAP Ditjen P2P.

f) Perbandingan Dengan Satker Sejenis

Perbandingan dengan satker sejenis yaitu KKP Kelas II Bandung dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk NegaraTahun 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa perbandingan capaian dengan satker sejenis yaitu KKP Kelas II Bandung, maka angka capaian kinerja KKP Kelas II Panjang tahun 2022 sebesar 0,98, sedangkan KKP Kelas II Bandung sebesar 0,94. Capaian yang lebih tinggi pada KKP Kelas II Panjang dibandingkan KKP Kelas II Bandung ini mungkin disebabkan kegiatan surveilans pada penumpang kapal Ferry (*roll on roll off*) antara Pelabuhan Bakauheni – Merak yang dilakukan di Pelabuhan Bakauheni pada masa pandemi Covid-19.

5) Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja dilakukan dari beberapa upaya/kegiatan sepanjang tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11 PerbandinganTarget dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2020 s.d 2022

PK TURUNAN			TARGET			CAPAIAN			PERSEN (%)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	**Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan.***		**0,92**	**0,93**	**0,93**	**0,96**	**0,97**	**0,98**	104%	104%	105%
		1. *Pemeriksaan Penapisan Orang*	1.941.598	1.043.879	1.093.215	4.098.400	2.902.944	3.222.523	211%	278%	295%
		a. VCT Mobile (KTS HIV)	750	400	1.200	750	400	1.200	**100%**	**100%**	**100%**
		b. Pemeriksaan Jemaah umroh/pelaku perjalanan	1.939.708	1.021.319	1.005.282	4.095.810	2.855.218	3.220.602	**211%**	**280%**	**320%**
		c. Pemeriksaan jemaah calon haji	-	-	3.200	-	-	3.214	**0%**	**0%**	**100%**
		d. Jumlah penerbitan sertifikat izin laik terbang	300	275	231	275	231	830	**92%**	**84%**	**359%**
		e.. Jumlah penerbitan sertifikat izin angkut orang sakit	275	255	102	255	102	227	**93%**	**40%**	**223%**
		f. Jumlah penerbitan sertifikat izin angkut jenazah	15	30	22	35	22	54	**233%**	**73%**	**245%**
		g. Pemeriksaan keur kesehatan	300	1.000	560	1.025	560	810	**342%**	**56%**	**145%**
		h. Skrinning penyakit menular TB	250	600	1.200	250	600	1.200	**100%**	**100%**	**100%**
		i. Skrinning penyakit menular malaria	0	0	1.000	0	0	1.000	**0%**	**0%**	**100%**
		j. Jumlah Vaksinasi Covid-19	0	20.000	30.000	0	45.811	5.261	**0%**	**229%**	**18%**
		2. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina	**40.420**	**45.800**	**50.418**	**47.109**	**50.418**	**50.848**	117%	110%	101%
		a. Pemeriksaan dalam rangka penerbitan COP	1.500	3.000	4.866	3.645	4.866	**4.569**	**243%**	**162%**	**94%**
		b. Pemeriksaan dalam rangka penerbitan PHQC	38.333	42.000	44.812	42.653	44.812	**45.492**	111%	107%	102%
		c. Pemeriksaan dalam rangka penerbitan P3K	200	380	309	388	309	**369**	**194%**	**81%**	**119%**
		d. Pemeriksaan dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi	387	420	431	423	431	**418**	**109%**	**103%**	**97%**
		3. Pemeriksaan barang	**400**	**517**	**3930**	**517**	**645**	**7072**	**129%**	**125%**	**180%**
		a. Pemeriksaan barang dalam rangka situs jemaah calon haji	0	0	3285	0-	0	3.858	**0%**	**0%**	**117%**

PK TURUNAN	TARGET			CAPAIAN			PERSEN (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
b. Pemeriksaan barang penerbitan OMKABA	400	517	645	517	645	3.214	129%	125%	498%
4. Pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM)	**1.182**	**909**	**950**	**610**	**1. 310**	**1.656**	**105%**	**154%**	**174%**
a. Pemeriksaan TTU	282	204	240	308	359	718	109%	176%	299%
b. Pemeriksaan TPM	300	250	250	302	340	367	101%	136%	147%
c. Penyediaan Sarana Air Bersih	300	250	250	302	340	351	101%	121%	140%
d. Pengendalian Vektor	300	205	210	266	271	220	89%	130%	105%

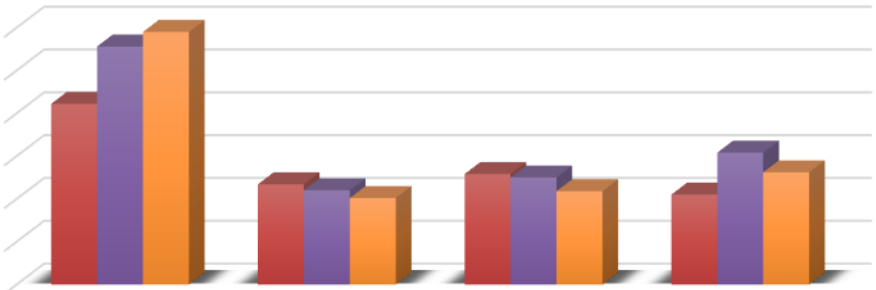
Sumber : Laporan Monev Kinerja Bulanan KKP Kelas II Panjang Tahun 2020 s.d 2022
*Dihitung dengan rumus indeks

Dari tabel diatas diketahui bahwa untuk menunjang capaian indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara didukung oleh 4 kegiatan yakni :

1) Pemeriksaan orang sesuai standar
2) Pemeriksaan alat angkut sesuai standar
3) Pemeriksaan barang sesuai standar
4) Pemeriksaan lingkungan sesuai standar

Berikut ini menampilkan perbandingan grafik capaian parameter pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dapat dilihat dari tahun 2020 s.d 2022 sebagai berikut :

Grafik 10 Perbandingan Target dan Realisasi Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Tahun 2020 s.d 2022



	Pemeriksaan Orang	Pemeriksaan Alat Angkut	Pemeriksaan Barang	Pemeriksaan Lingkungan
2020	211%	117%	129%	105%
2021	278%	110%	125%	154%
2022	295%	101%	109%	131%

Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kegitan parameter pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dapat dilihat dari tahun 2020 s.d 2022 mengalami turun naik.

Untuk pemeriksaan orang tahun 2022 capainnya sebesar 295%. Meningkat dari tahun 2020 dan 2021. Pemeriksaan alat angkut, tahun 2022 sebesar 101%. Menurun dari dari tahun 2020 dan 2021. Pemeriksaan barang, capaian tahun 2022 sebesar 109%, juga menurun dari tahun 2020 dan 2021. Pemeriksaan lingkungan capaiannya sebesar 131%. Capaian ini juga turun dari tahun 2020 dan 2021.

Dari keempat parameter tersebut juga diukur dari *output* beberapa kegiatan yang dilaksanakan KKP Kelas II Panjang selama tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Orang Sesuai Standar

Pemeriksaan orang sesuai standar merupakan proses kekarantinaan yang meliputi pengamatan tanda dan gejala penyakit menular bahkan penyakit berpotensi Kegawatdaruratan-Kesehatan Masyarakat (KKM) melalui kegiatan penapisan orang/skrining penyakit menular, pengamatan suhu tubuh menggunakan *thermalscanner*, pemeriksaan dokumen kesehatan penumpang sesuai dengan aturan perjalanan yang berlaku.

Pemeriksaan penapisan orang atau disebut juga dengan istilah skrining adalah identifikasi dugaan penyakit atau kecacatan yang belum dikenali penyebabnya dengan menerapkan pengujian, pemeriksaan atau prosedur lainnya yang dapat dilakukan dengan cepat (*A Dictionary of Epidemiology AS*, 1951). Dengan kata lain skrining ini merupakan tes dalam skala besar untuk mengidentifikasi penyakit pada orang yang sehat (Bonita, et, al, 2006). Skrining bukan untuk menegakkan diagnosa, tetapi untuk menentukan faktor risiko bagi setiap individu, sehingga bisa menentukan apakah individu membutuhkan tindak lanjut dan pengobatan.

Untuk melakukan pemeriksaan orang sesuai standar, dilakukan beberapa kegiatan meliputi :

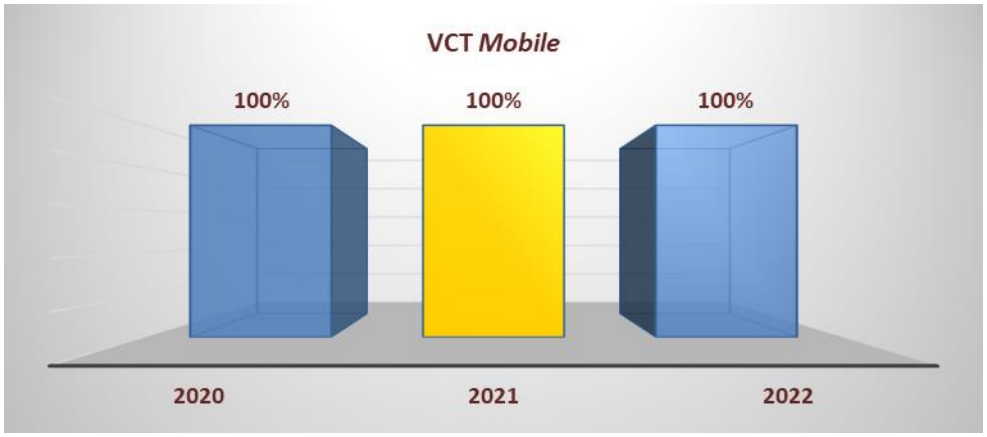
a). *Voluntary Counseling Test* (VCT) *Mobile* HIV

Voluntary Counseling Test (VCT) *Mobile* adalah kegiatan yang dilakukan di luar

tempat layanan dimana menjangkau komunitas sasaran yang akan dicapai. Kegiatan VCT *Mobile* ini untuk skrining HIV/AIDS yang dilakukan di Pelabuhan Induk Panjang, Wilayah Kerja Pelabuhan Bakauheni, Wilayah Kerja Bandara Radin Inten II, Wilayah Kerja Pelabuhan Teluk Semangka, dan Wilayah Kerja Rawajitu. Target kegiatan VCT *Mobile* tahun 2022 sebanyak 1.000 pemeriksaan dengan capaian 100% (1.000 pemeriksaan).

Untuk melihat *trend* capaian kegiatan VCT *Mobile* HIV/AID dari tahun 2020 s.d 2022 dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Grafik 11 Perbandingan Capaian Kegiatan VCT Mobile HIV/AIDS Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capain kegiatan VCT *mobile* pemeriksaan HIV/AIDS di KKP Kelas II Panjang tercapai 100% dari tahun 2020 s.d 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Pelabuahn Panjang, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Teluk Semangka dan Bandara Radin Inten II Branti.

b) Pemeriksaan Pelaku Perjalanan/Jemaah Umroh/Haji

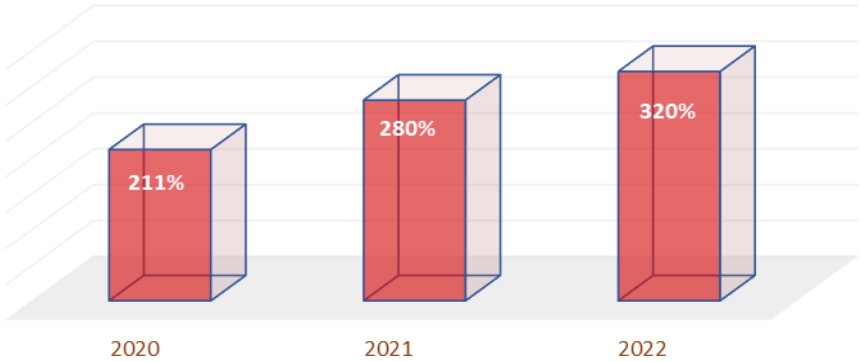
Setelah 2 tahun sejak WHO menetapkan terjadinya pandemi Covid -19 di seluruh dunia yaitu pada 11 Maret 2020, maka tanggal 17 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia juga telah menyatakan bahwa Covid-19 adalah status penyakit menjadi tahap tanggap darurat sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) serta bencana nasional yang wajib dilakukan upaya penanggulangan, sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Sampai saat ini Indonesia masih terus berjuang untuk bebas dari pandemi Covid-19 menjadi endemi. Tahun 2022, KKP Kelas II Panjang masih *concern* terhadap kegiatan pengendalian dan pencegahan Covid-19 di pintu

masuk negara/wilayah dengan melakukan pengawasan dan skrining faktor risiko pada pelaku perjalanan, jemaah umroh maupun jemaah haji yang juga ditetapkan sebagai Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), sehingga kepulangannya diterapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kegiatan ini, dilakukan pengamatan/surveilans ataupun skrining terhadap semua pelaku perjalanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang melewati pintu masuk negara yang menjadi wilayah kerja KKP Kelas II Panjang yaitu Wilayah Kerja Pelabuhan Bakauheni, Wilayah Kerja Bandara Radin Inten II Branti, Wilayah Kerja Teluk Semangka dan Wilayah Kerja Rawajitu dengan mengamati tanda dan gejala penyakit menular tidak hanya Covid-19, tetapi juga penyakit lain berpotensi Kegawatdaruratan-Kesehatan Masyarakat (KKM). Adapun target kegiatan ini 1.093.215 pemeriksaan dengan capaian sebanyak 3.222.523 pemeriksaan (295%). Untuk kegiatan di Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Teluk Semangka serta Pelabuhan Rawajitu dilakukan skrining dengan pengukuran suhu kepada pelaku perjalanan dan ABK kapal. Sedangkan, di Bandara Radin Inten II Branti dilakukan pengamatan suhu tubuh dengan *thermalscanner* dan dengan memvalidasi surat keterangan hasil pemeriksaan RDT dan PCR terhadap penumpang/*crew* pesawat yang akan berangkat. Jika terdapat suhu diatas 38^0 C ataupun positif Covid-19 akan dirujuk atau ditolak berangkat untuk dilakukan isolasi mandiri.

Berikut ini menampilkan perbandingan capaian kegiatan pengamatan dan skrining faktor risiko pada pelaku perjalanan termasuk pelaku perjalanan haji/umroh dari tahun 2020 s.d 2022 :

Grafik 12 Perbandingan Capaian Kegiatan Pengamatan dan Skrining Faktor Risiko pada Pelaku Perjalanan Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

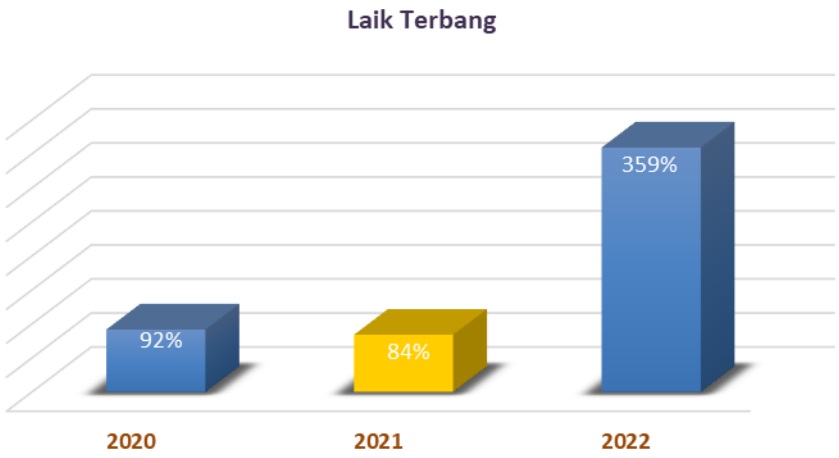
Dari grafik diatas dapat dilketahui bahwa capaian kegiatan surveilans pemeriksaan pelaku perjalanan/jemaah umroh/haji meningkat dari tahun 2020 s.d 2022. Peningkatan ini mulai dari tahun 2020 dari 211% menjadi 280% dan naik menjadi 320% pada tahun 2022.

c). Jumlah Pemeriksaan Untuk Penerbitan Setifikat Laik Terbang

Kegiatan penerbitan sertifikat izin laik terbang dilaksanakan untuk memberikan izin calon penumpang yang mengalami sakit dan berisiko dalam perjalanan, contoh penyakit yang perlu diperhatikan antara lain penyakit jantung, Diabetes Melitus, penyakit paru-paru, dan penumpang yang sedang hamil pada usia kehamilan 1 s.d 12 minggu dan 28 s.d 40 minggu. Target kegiatan tahun 2022 sebanyak 231 pemeriksaan dengan capaian sebanyak 830 pemeriksaan (359%). Peningkatan yang tiga kali lipat ini karena pada tahun 2022 kasus Covid-19 sudah mulai menurun. Jumlah pelaku perjalanan dan penerbangan sudah mulai meningkat dari tahun sebelumnya.

Untuk melihat *trend* jumlah penerbitan sertifikat laik terbang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 13 Perbandingan Capaian Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Terbang Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian kegiatan penerbitan sertifikat laik terbang tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Capaian tahun 2020 sebesar 92%, tahun 2021 sebesar 84% dan tahun 2022 naik menjadi 359%. Peningkatan yang cukup tajam ini karena adanya peningkatan jumlah pelaku perjalanan dan

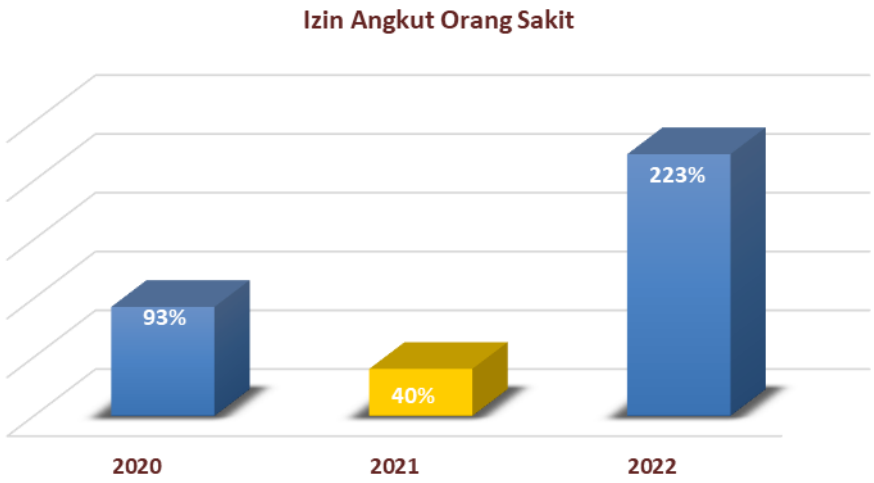
jumlah penerbangan dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 dan 2021 terjadi PPKM di beberapa daerah Indonesia yang membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat, sehingga kegiatan ini tidak mencapai target.

d) Jumlah Pemeriksaan Untuk Penerbitan Sertifikat Izin Angkut Orang Sakit

Kegiatan penerbitan sertifikat ijin angkut orang sakit dilaksanakan untuk memberikan keamanan bahwa calon penumpang bukan merupakan penderita penyakit menular yang membahayakan seperti tercantum di PMK No.82 tahun 2014. Capaian kegiatan ini pada tahun 2022 sebanyak 227 pemeriksaan (223%) dari target 102 pemeriksaan.

Untuk melihat *trend* jumlah pemeriksaan untuk penerbitan sertifikat izin orang sakit dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 14 Perbandingan Capaian Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Terbang Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

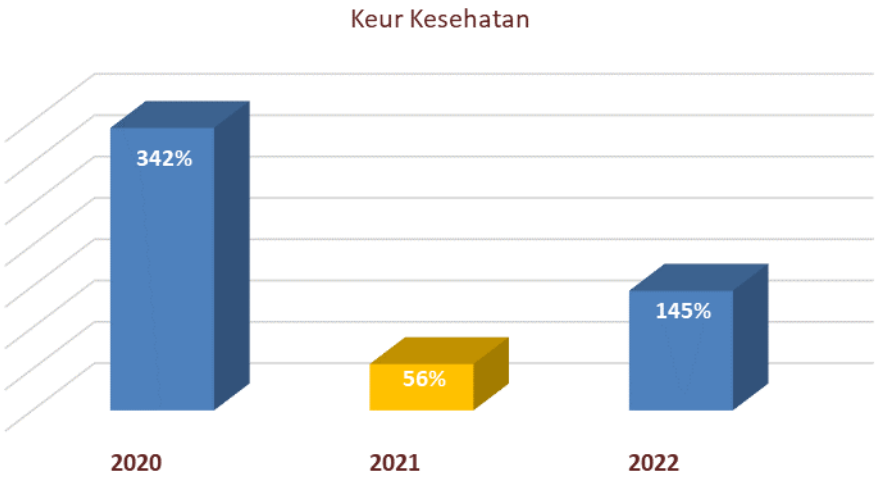
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa tahun 2022 penerbitan sertifikat untuk angkut orang sakit sudah meningkat dari 2 tahun sebelumnya. Kegiatan ini juga biasanya untuk penumpang pesawat. Tahun 2022 jumlah pelaku perjalanan dan penerbangan juga sudah meningkat dari tahun sebelumnya masa pandemi Covid-19. Sedangkan, tahun 2020 dan 2021 masa pandemi Covid-19 terjadi pembatasan penerbangan karena adanya PPKM, sehingga membatasi pelaku perjalanan yang menyebabkan kegiatan ini tidak terealisasi 100%.

e) Pemeriksaan Untuk Keur Kesehatan

Pemeriksaan untuk sertifikat keur kesehatan ini diberikan kepada masyarakat/pengguna jasa yang ingin mendapatkan surat keterangan jasmani dan tidak buta warna. Capaian kegiatan ini tahun 2022 sebanyak 810 pemeriksaan dari target 560 pemeriksaan yang ditargetkan (145%). Capaian kegiatan ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan 2021 karena situasi pandemi yang membatasi kegiatan bepergian menjadi 56% pada tahun 2022.

Untuk melihat *trend* jumlah pemeriksaan untuk penerbitan sertifikat izin orang sakit dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 15 Perbandingan Capaian Kegiatan Penerbitan Keur Kesehatan Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahrwa tahun 2022 terdapat peningkatan capaian penerbitan sertifikat keur kesehatan dari tahun 2021. Tahun 2021 terjadi penurunan drastis karena masa pandemi Covid-19 terdapat pembatasan terhadap akses bepergian dengan menggunakan persyaratan yang ketat.

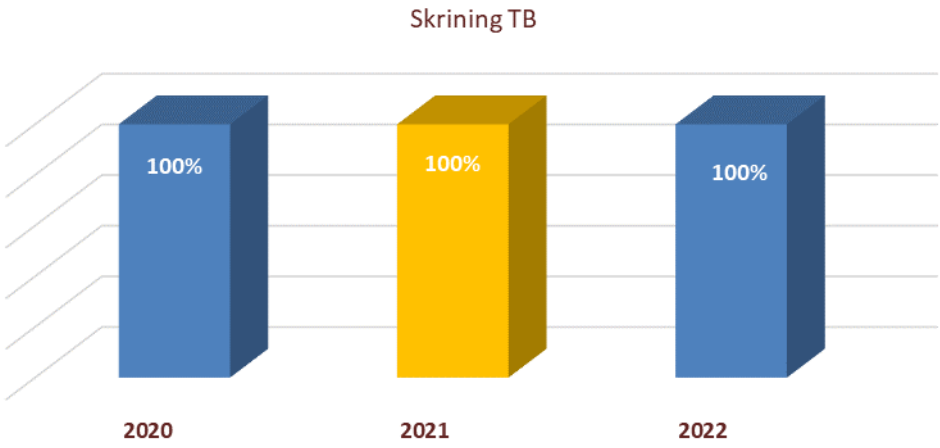
f) Skrining Penyakit Menular TB

Skrining TB adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi Tuberculosis (TBC) atau tidak. Dalam hal ini kegiatan ini dilakukan di Wilayah Kerja Pelabuhan Bakauheni, Wilayah Kerja Bandara Radin Inten II Branti dan Wilayah Kerja Pelabuhan Teluk Semangka dan Pelabuhan Laut Labuhan Maringgai. Capaian kegiatan ini pada tahun 2022 sebanyak 1.200

pemeriksaan (100%).

Untuk melihat *trend* jumlah pemeriksaan Skrining Penyakit Menular TB dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 16 Perbandingan Capaian Kegiatan Skrining Penyakit Menular TB Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kegiatan skrining TB penyakit menular dari tahun 2020 s.d 2022 tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 100%.

g) Sertifikat Penjamah Makanan

Penjamah makanan adalah seorang tenaga kerja yang menjamah makanan mulai dari persiapan, mengolah, menyimpan, mengangkut maupun penyajian makanan, pengetahuan sikap dan tindakan penjamah mempengaruhi kualitas makanan yang disajikan (Amalia, 2016). Hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang penjamah makanan adalah sebagi berikut :

- Harus sehat dan bebas dari penyakit menular.
- Secara berkala minimal 2 kali setahun diperiksa kesehatannya oleh dokter yang berwenang.
- Harus menggunakan pakaian kerja dan perlengkapan pelindung pengolahan makanan.dapur.
- Selalu mencuci tangan sebelum bekerja dan setelah keluar dari kamar kecil.

Penjamah makanan harus memiliki kompetensi dalam menyediakan makanan yang layak bagi orang banyak. Oleh sebab itu penjamah makanan perlu mendapatkan

pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya yang dinamakan sertifikasi penjamah makanan. Sertifikasi kompetensi Penjamah Pangan atau *Food Handler* difokuskan pada pemastian kompetensi dalam menangani makanan secara aman sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi dan regulasi terkait higiene sanitasi pangan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam kegiatan ini, tahun 2022 KKP Kelas II Panjang masih sebatas melatih petugas katering haji sebanyak 12 orang. Untuk tahun berikutnya kegiatan akan ditingkatkan target pembinaan pada penjamah makanan di bandara dan Pelabuhan.

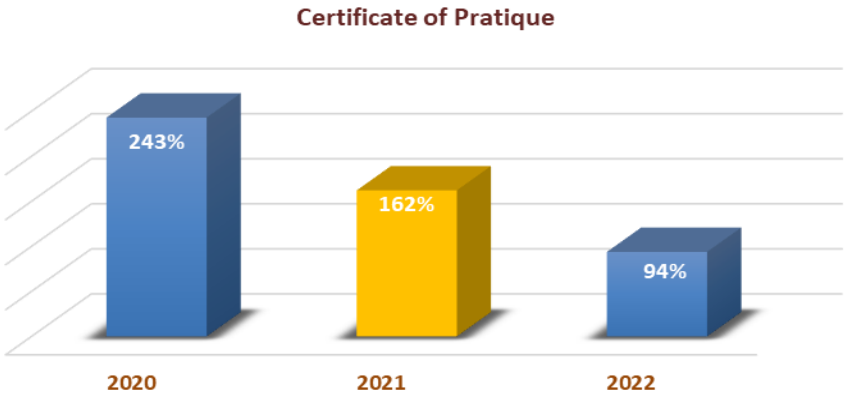
2) Pemeriksaan Alat Angkut Sesuai Standar Karantina

a) Pemeriksaan Dalam Rangka Penerbitan COP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 19, Nakhoda pada kapal hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang setelah dilakukan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan oleh Pejabat Kekarantinaan Kesehatan. Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan ini dilakukan untuk memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan. Persetujuan Karantina Kesehatan yang dimaksud adalah *Certificate of Pratique* (COP). Semua kapal yang datang ke Indonesia dari pelabuhan luar negeri wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan kapal (sesuai SOP), hasil pemeriksaan menjadi dasar dalam penerbitan *Certificate of Pratique* (COP). Jumlah target pemeriksaan dalam rangka penerbitan dokumen *Certificate of Pratique* (COP) di KKP Kelas II Panjang selama tahun 2022 sebanyak 4.866 pemeriksaan dan capaiannya sebanyak 4.569 pemeriksaan (94%). Terjadi sedikit penurunan dari tahun 2021.

Untuk melihat *trend* jumlah pemeriksaan dalam rangka penerbitan COP dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 17 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Dalam Rangka Penerbitan COP Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

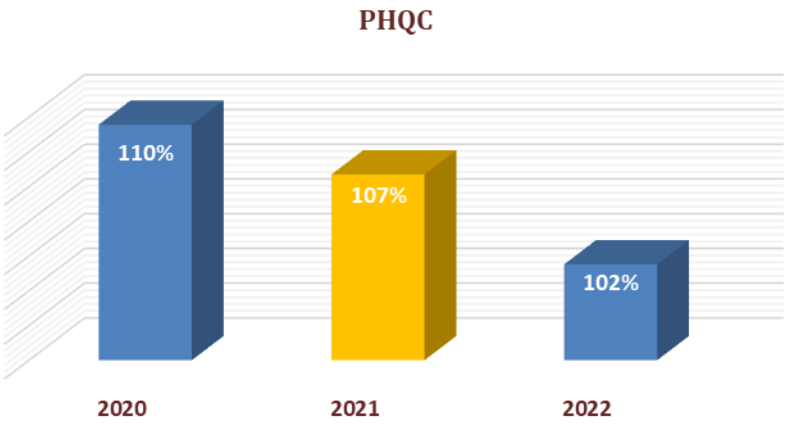
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pemeriksaan dalam rangka penerbitan COP menurun dari tahun 2020 s.d 2022. Capaian tahun 2022 sebesar 94%. Hal ini pada masa Covid-19, COP tidak hanya pada kapal luar negeri, tetapi juga kapal dari negara atau wilayah terjangkit baik dalam negeri maupun luar negeri. Walaupun kapal lokal tetap diterbitkan COP karena semua daerah Indonesia merupakan terjangkit Covid-19. Sedangkan, pada tahun 2022 sejak kasus Covid-19 menurun ada beberapa daerah di Indonesia sudah tidak lagi terjangkit Covid-19, sehingga tidak adanya penerbitan COP pada kapal tersebut.

b) Pemeriksaan Dalam Rangka Penerbitan PHQC

Penerbitan Surat Ijin Berlayar Karantina Kesehatan atau *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) adalah kegiatan legalisasi terhadap kapal yang akan berangkat berlayar yang didahului dengan pemeriksaan faktor risiko kesehatan terhadap kapal tersebut. Kegiatan *Port Health Quarantine Clearance* ini merupakan upaya untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit menular potensial wabah yang mungkin terbawa oleh alat angkut yang masuk pelabuhan maupun yang akan meninggalkan pelabuhan dalam kondisi sehat. Pada tahun 2022, jumlah target pemeriksaan dalam rangka penerbitan dokumen PHQC sebanyak 44.812 pemeriksaan dan realisasinya sebanyak 45.492 pemeriksaan (102%).

Untuk melihat *trend* capaian jumlah pemeriksaan dalam rangka penerbitan PHQC dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 18 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Dalam Rangka Penerbitan PHQC Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

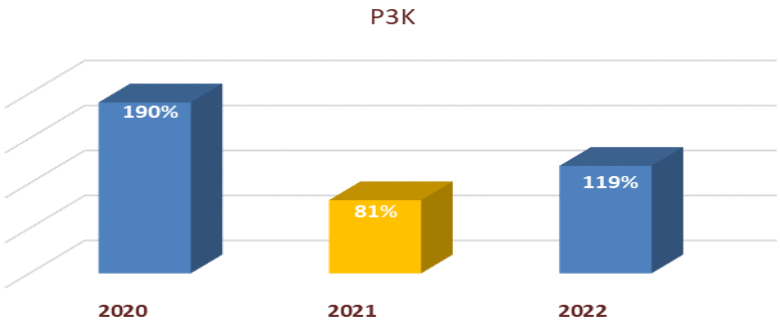
Dari grafik diats dapat diketahui bahwa capaian pemeriksaan dalam rangka penerbitan PHQC mencapai 102%, walaupun terjadi penurunan dari tahun 2020 dan 2021. Tetapi, hal ini sudah melebihi target yang sudah ditentukan.

c) Pemeriksaan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat P3K

Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui persediaan obat-obatan dan alat kesehatan dasar yang tersedia dikapal untuk pertolongan P3K dalam rangka penerbitan sertifikat P3K kapal. Target kegiatan ini sebanyak 380 pemeriksaan dengan realisasi sebanyak 309 pemeriksaan (81%). Jika dibandingkan tahun lalu, pemeriksaan dalam rangka penerbitan sertifikan P3K kapal mengalami penurunan dimana realisasi tahun 2021 sebanyak 388 pemeriksaan dari target 200 pemeriksaan (194%).

Untuk melihat *trend* capaian jumlah pemeriksaan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat P3K dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 19 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat P3K Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

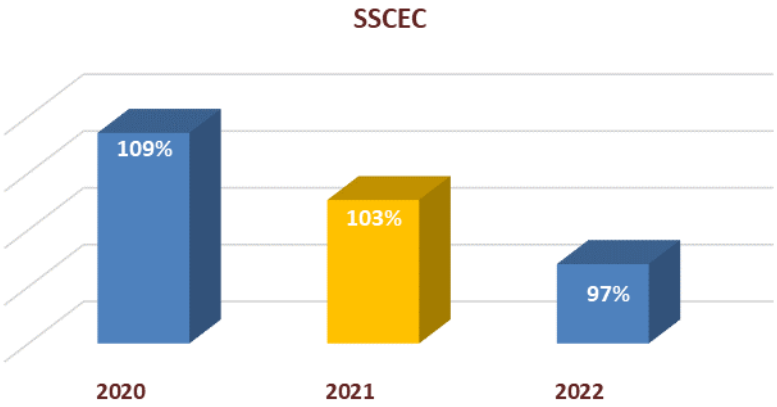
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian pemeriksaan dalam rangka penerbitan sertifikat P3K sebesar 119%. Hal ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2021 yang capaiannya hanya sebesar 81%.

d) Pemeriksaan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Sanitasi

Sertifikat sanitasi ada 2 yaitu *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) dan *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC). SSCEC merupakan salah satu sertifikat sanitasi kapal yang diberikan kepada kapal yang telah dilakukan pemeriksaan sanitasi dan dinyatakan bebas tindakan sanitasi dan (SSCC) merupakan salah satu Sertifikat Sanitasi Kapal yang diberikan kepada kapal yang telah dilakukan tindakan sanitasi sesuai rekomendasi dalam pemeriksaan sanitasi. Pada tahun 2022, jumlah target pemeriksaan dalam rangka penerbitan dokumen SSCEC/SSCC sebanyak 431 dan realisasinya sebanyak 418 (97%).

Untuk melihat *trend* jumlah pemeriksaan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Sanitasi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 20 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Sanitasi Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian penerbitan SSCEC/SSCC tahun 2022 sebesar 97%. Dari tahun 2020 s.d 2022 capaian penerbitan SSCEC/SSCC mengalami penurunan.

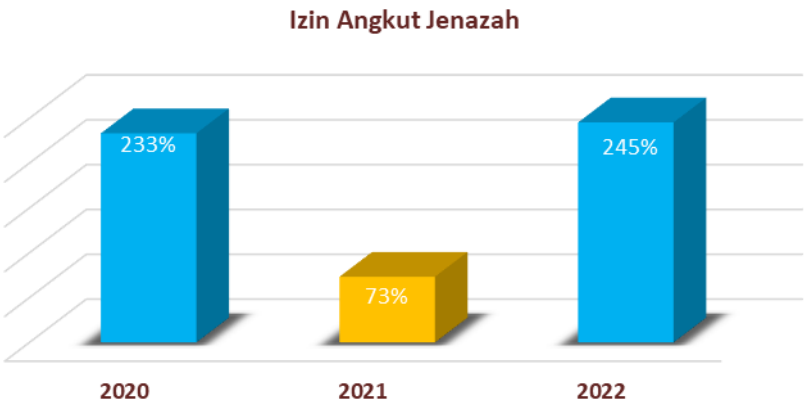
3) *Pemeriksaan Barang*

a) Jumlah Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah

Kegiatan penerbitan surat izin angkut jenazah dilakukan agar transportasi jenazah tidak menimbulkan masalah baik bagi pengirim ataupun penerima. Capaian kegiatan pada tahun 2022 sebesar 54 dari target 48 pemeriksaan (133%).

Untuk melihat *trend* capaian jumlah pemeriksaan Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 21 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Dalam Rangka Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian penerbitan surat izin angkut jenazah sebesar 245%. Dibandingkan tahun 2021, capaian ini meningkat tajam dimana tahun capaian tahun 2021 hanya sebesar 73%.

4) *Pemeriksaan Lingkungan*

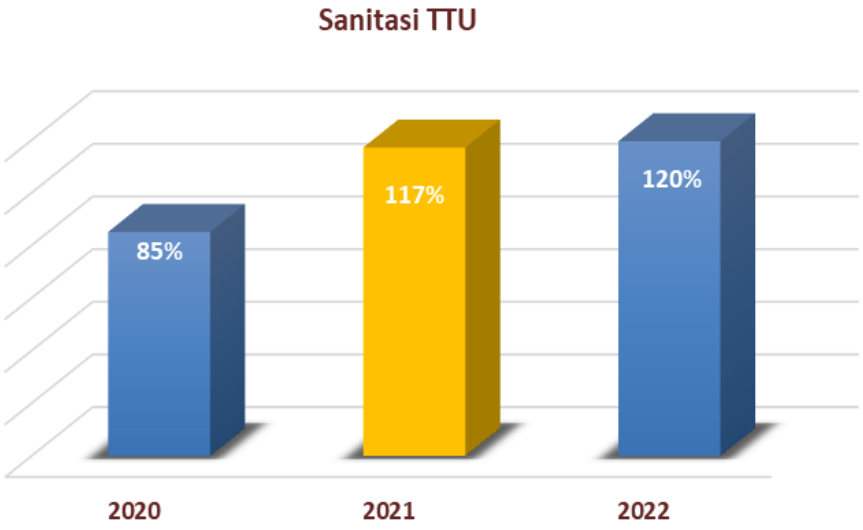
a) Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU)

Pengawasan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) di pelabuhan/bandara adalah pengawasan kondisi dari komponen atau bagian-bagian bangunan serta fasilitas pendukungnya dari kemungkinan timbulnya masalah kesehatan. Kegiatan ini bertujuan agar TTU yang merupakan tempat yang digunakan bagi orang banyak memenuhi syarat kesehatan. Target pengawasan sanitasi TTU ini tahun 2022 sebanyak 240 pemeriksaan dengan capaian 367 pemeriksaan (153%) yang diperiksa secara rutin setiap bulan.

Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU) merupakan pengawasan *hygiene* sanitasi gedung dan bangunan umum di pelabuhan/bandara dari segi kondisi, komponen, bagian-bagian bangunan serta fasilitas pendukung bangunan tersebut dari kemungkinan timbulnya masalah kesehatan. Dilakukan pengawasan dan pemeriksaan TTU ini setiap bulannya agar memenuhi syarat kesehatan.

Untuk melihat *trend* capaian jumlah pemeriksaan Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 22 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Pemeriksaan Sanitasi TTU Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian pemeriksaan sanitasi TTU meningkat dari tahun 2020 dan 2021. Capaian tahun 2022 sebesar 120% naik dari tahun 2021 sebesar 117%. Naiknya angka capaiannya karena semakin banyak lokus TTU yang diperiksa setiap bulannya.

b) Pemeriksaan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

Kegiatan pengawasan makanan dan minuman bertujuan untuk mengetahui dan menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat tetap aman, hygiene, bersih dan sehat, sehingga tidak menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah kesehatan seperti keracunan makanan atau penyakit bawaan makanan. Pemeriksaan/pengawasan sanitasi makanan dan minuman

di lingkungan pelabuhan dilakukan melalui pengawasan rutin tempat pengolahan makanan minuman yang rata –rata berbentuk kantin atau warung makan.

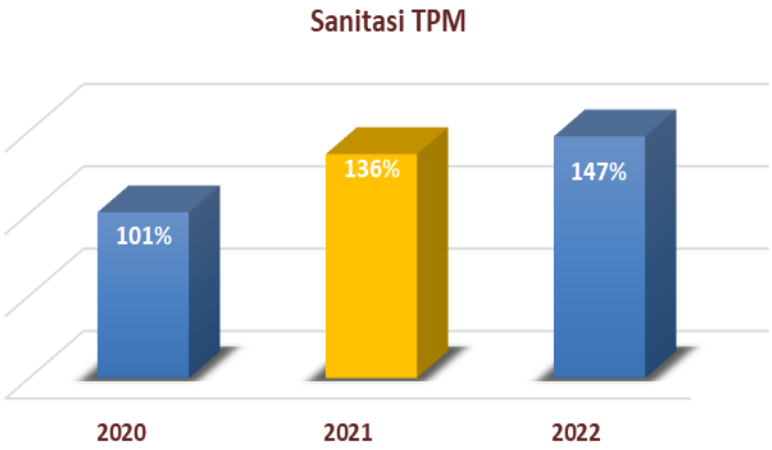
Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pemeriksaan TPM setiap bulannya secara rutin dengan target tahun 2022 ini sebanyak 250 pemeriksaan dengan capaian 351 pemeriksaan (140%). Inspeksi TPM dilaksanakan di Pelabuhan Induk Panjang dan seluruh wilayah kerja KKP Kelas II Panjang. Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan dengan metode observasi. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang telah ditentukan. Setiap pengelola TPM diharapkan tetap memperhatikan kebersihan sekitar TPM terutama sampah harus ditangani dalam 1 X 24 jam.

Kegiatan pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) bertujuan untuk mengetahui dan menjaga makanan serta minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat tetap aman, hygiene, bersih dan sehat, sehingga tidak menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah kesehatan seperti keracunan makanan atau penyakit bawaan makanan. Pemerikasaan/pengawasan sanitasi makanan dan minuman di lingkungan pelabuhan dilakukan melalui pengawasan rutin tempat pengolahan makanan minuman yang rata–rata berbentuk kantin atau warung makan.

Dengan adanya pengawasan TPM secara rutin terbentuklah TPM yang laik hygiene baik dari segi penjamah makanannya maupun cara penyajiannya. Inspeksi TPM dilaksanakan secara rutin setiap bulan di seluruh wilayah kerja KKP Kelas II Panjang. Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan dengan metode observasi. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang telah ditentukan. Setiap pengelola TPM diharapkan tetap memperhatikan kebersihan sekitar TPM terutama sampah harus ditangani dalam 1 X 24 jam.

Untuk melihat *trend* capaian jumlah pemeriksaan Pemeriksaan Sanitasi TPM dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 23 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Pemeriksaan Sanitasi TPM Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian kegiatan pemeriksaan sanitasi TPM tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Capain tahun 2022 sebesar 147%, tahun 2021 136 % dan tahun 2020 sebesar 101%. Pencapaian yang naik drastis ini karena banyak bermunculan kantin-kantin baru di bandara ataupun Pelabuhan setelah 2 tahun pandemi dimana arus lalu linta spelaku perjalanan sudah mulai meningklat mendekati keadaan norma seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.

c) Penyediaan Sarana Air Bersih (SAB)

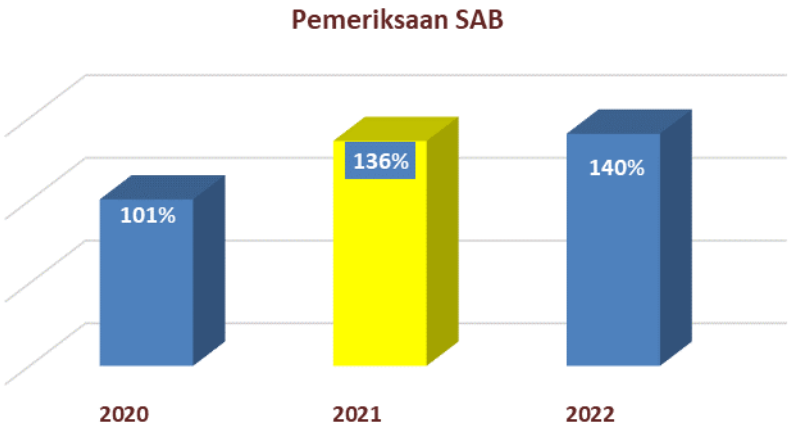
Kegiatan ini meliputi pemeriksaan fisik, pengambilan sampel air minum untuk dilakukan pengujian laboratorium baik bakteriologi maupun kimia. Pengawasan dimulai dari titik sumber air yang didistribusikan (Water Pumping System milik PT. Angkasa Pura II) sampai ke titik yang diterima oleh konsumen seperti drinking water, water car, kran-kran yang ada di tempat pengelolaan makanan dan air-air kran yang berada di bandara. Target pengawasan/pemeriksaan sarana air bersih yang diinspeksi pada tahun 2022 sebanyak 220 kali pengawasan dengan capaian 352 pengawasan (160%).

Pengambilan sampel air minum/ air bersih dilakukan di beberapa titik termasuk gedung perkantoran, tempat pengolahan makanan dan tempat penyedia makanan. Hasil pemeriksaan hanya berlaku pada sampel yang telah diuji. Keberhasilan kegiatan ini ditunjang dengan adanya pengawasan secara rutin terhadap sarana termasuk pipa penyaluran dan reservoar sebagai wadah

penampungan air persediaan dan pemeriksaan sampel secara rutin.

Untuk melihat *trend* capaian jumlah pemeriksaan Pemeriksaan Sanitasi sanitasi Sarana Air Bersih (SAB) dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 24 Perbandingan Capaian Kegiatan Pemeriksaan Pemeriksaan Sanitasi SAB Tahun 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kegiatan pemeriksaan sanitasi SAB tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Capain tahun 2022 sebesar 140%, tahun 2021 sebesar 136 % dan tahun 2020 sebesar 101%.

d) Pengendalian Vektor

Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah (Permenkes No. 374 tahun 2010).

Penyakit tular vektor merupakan penyakit yang menular melalui hewan perantara (vektor). Penyakit tular vektor meliputi malaria, arbovirosis seperti Dengue, Chikungunya, Japanese B Encephalitis (radang otak), filariasis limfatik (kaki gajah), pes (sampar) dan demam semak (*scrub typhus*). Penyakit tersebut hingga kini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB).

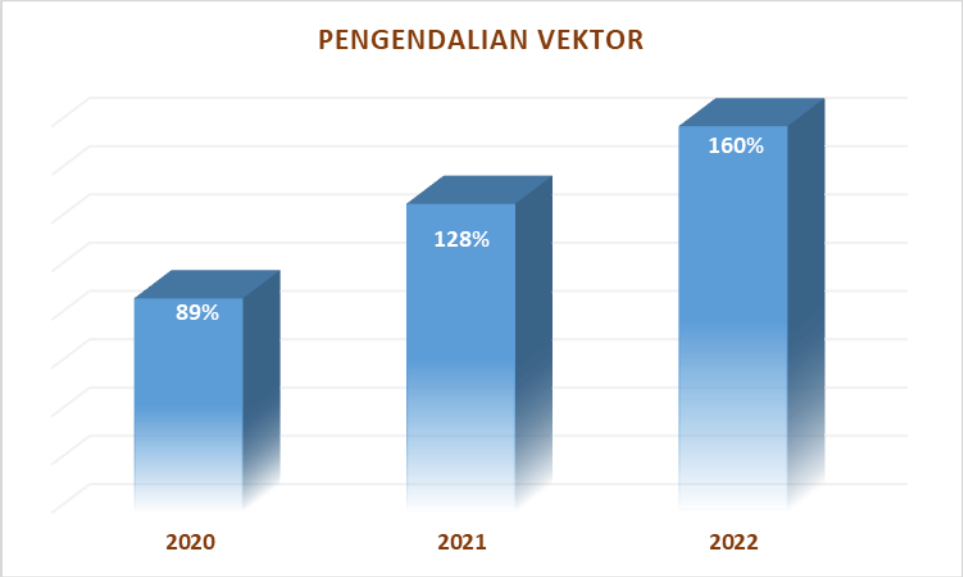
Beberapa kegiatan pengendalian vektor :

- Pemantauan titik-titik lokasi keberadaan tikus kemudian dilakukan: pemasangan perangkap pada lokasi tersebut dengan tujuan mengidentifikasi tikus dan pinjal.
- Pemantauan/pengamatan lalat dan kecoa, pelaksanaannya bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sanitasi gedung. Sedangkan pengendalian lalat dan kecoa, dilaksanakan di area yang kepadatan lalat dan kecoanya tinggi.
- Pengawasan dan pengendalian larva : Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva.

Target tahun 2022 kegiatan pengendalian vektor sebanyak 220 lokus dengan capaian 352 lokus yang diperiksa (160%).

Untuk melihat *trend* capaian kegiatan pengendalian vektor dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 25 Perbandingan Capaian Kegiatan Pengendalian Vektor Tahun 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kegiatan pengendalian vektor sebesar 160%. Capaian kegiatan ini meningkat dari tahun 20202 s.d 2022.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan

Pencapaian indikator kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara pada tahun 2022 tercapai sebesar 105% dari target yang telah ditetapkan. Capaian kegiatan ini masih kegiatan surveilans rutin ataupun skrining pandemi Covid-19 pada pelaku perjalanan tidak hanya dari luar negeri, tetapi juga dalam negeri karena semua wilayah di Indonesia yang termasuk status daerah terjangkit. Setiap penumpang/ABK/*Crew* Kapal/*Crew* pesawat yang melewati pintu masuk di Wilayah Kerja KKP Panjang baik pelabuhan ataupun bandara dilakukan pencatatan dan skrining. Untuk Pelabuhan Bakauheni dimana terdapat Kapal Ferry yang *roll on dan roll off* antara Pelabuhan Bakauheni dan Merak, Pelabuhan Teluk Semangka dan Pelabuhan Rawajitu dilakukan pengukuran suhu. Sedangkan, untuk keberangkatan penumpang di Bandara Radin Inten II Branti dilakukan skrining dengan memvalidasi Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 dan untuk area kedatangan skrining dilakukan dengan memantau suhu penumpang.

Untuk mencapai keberhasilan capaian indikator ini KKP Kelas II Panjang telah menyusun strategi sebagai berikut :

a) Meningkatkan kemampuan/kompetensi pegawai dalam pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan sesuai dengan standar kekarantinaan.
b) Meningkatkan loyalitas para segenap pegawai KKP Kelas II Panjang. Khususnya pada masa pandemi Covid-19 durasi kerja di KKP Kelas II Panjang lebih padat ataupun lebih lama dari biasanya. Maka dituntut setiap pegawai harus siap sedia bekerja dalam pengendalian dan pencegahan pandemi Covid-19 ini.
c) Dilakukan upaya memanfaatkan dan mengefisienkan Sumber Daya Manuasia (SDM) yang ada karena dilakukan piket di bandara ataupun pelabuhan dalam rangka skrining pelaku perjalanan yang biasanya hanya pada *traveler* internasional, sekarang pada *traveler* domestik juga.
d) Pemenuhan sarana prasarana peralatan pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan seperti *thermalscanner*, alat kesehatan, *barcode scanner*, kamera *vector detector*, *water test kit, food test kit, fly grill*, dan lain-lain.
e) Memperluas sosialisasi peraturan terkait kekarantinaan kesehatan seperti aturan perjalanan selama masa pandemi Covid-19 kepada lintas sektor dan masyarakat, baik secara langsung maupun daring dan memanfatkan kanal media sosial.
f) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor diantaranya agen pelayaran, pengelola Pelabuhan baik KSOP, ASDP, KUPP, maskapai, pengelola bandara,

Otoritas Bandara, dan lainnya dalam pelaksanaan pengawasan kekarantinaan.

g) Mengaktifkan pola pengawasan hygine sanitasi mandiri oleh penyelenggara TTU dan TPP itu sendiri.

6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara tercapai 105% dengan anggaran Rp 2.132.532.000,- (99,87%). Capaian kinerja lebih besar dari persentase realisasi anggaran sehingga sudah efisien dengan nilai efisiensi sebesar sebesar 57,14%.

Dalam menganalisis penggunaan sumber daya kita bisa menggunakan prinsip 5M unsur manajemen, sehingga pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sumber daya anggaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Pengertian 5M meliputi *Man, Money, Materials, Machines, and Methods* (Manusia, Uang, Material, Mesin dan Metode). *Man* merujuk pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh instansi/organisasi. *Money* atau uang mengacu pada anggaran dalam pembiayaan kegiatan. Material merujuk pada sarana dan prasarana yang yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan tupoksi KKP di lapangan. *Machine* atau mesin dalam hal ini adalah beberapa fasilitas ataupun aplikasi yang dapat mendukung dan mempermudah kegiatan suatu organisasi dalam melayani pengguna jasa seperti aplikasi yang bersifat elektronik yang sebelumnya manual ataupun alat-alat yang bisa digunakan secara digital yang menciptakan efesiensi kerja baik dari segi waktu ataupun tenaga. Sedangkan, metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya proses pekerjaan dan layanan yang dalam hal ini merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat dalam suatu organisasi.

Pada unsur *Man* dalam efisiensi penggunaan SDM yaitu penggunaan SDM yang relatif efisien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan lain yang juga membutuhkan SDM yang handal. Jadi, kebutuhan akan tenaga yang profesional sangat penting untuk efisiensi penggunaan SDM. Penempatan SDM/pegawai KKP Kelas II Panjang harus sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan jabatan fungsional untuk pelayanan dan peningkatan performa kerja yang baik. Disamping itu, integrasi dan kolaborasi dalam penempatan SDM untuk menangani serta menjalankan tupoksi merupakan salah satu solusi untuk efisiensi SDM. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan dibutuhkan beberapa kompetensi baik dari segi bidang pendidikan formal

dan pendidikan latihan. Beberapa petugas yang melayani kegiatan kekarantinaan sudah mengikuti diklat kekarantinaan. Namun, dilapangan mereka tidak terbatas untuk kegiatan kekarantinaan tetapi juga kegiatan lain yang berhubungan dengan tupoksi KKP secara keseluruhan. Seperti tugas di wilayah kerja untuk efisiensi SDM. Seorang pegawai tidak hanya terikat dengan tupoksi substansi atau fungsionalnya dalam melakukan pelayanan di lapangan, tetapi juga bisa melaksanakan tugas lainnya yang masih sesuai dengan bidang keilmuan ataupun kompetensinya.

Pada unsur *Money* dalam efisiensi penggunaan keuangan merupakan penggunaan sumber daya pembiayaan yang sangat efisien melalui prioritasi penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran pada indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan sebesar 57,14%. Prioritas anggaran diarahkan untuk biaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan di KKP Kelas II Panjang dalam melayani pengguna jasa. Kegiatan prioritas ini ditujukan untuk mencapai target kesehatan pembangunan nasional. Hal ini merupakan strategi untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Perjalanan dinas harus dioptimalkan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kompetensi, koordinasi, dan peningkatan pengalaman dengan melakukan konsultasi teknis, diklat, pengayaan keterampilan dibidang masing-masing pegawai baik ke KKP kelas II, ke satker pusat maupun ke KKP sejenis serta ke badan akademis untuk pengayaan keterampilan dan kompetensi.

Pada unsur Material dalam penggunaan efisiensi sarana dan prasaran dalam menjalan tupoksi dilapangan. Mengggunakan alat-alat untuk mendukung kinerja baik. Pada pandemi Covid-19 menggunakan seluruh sarana yang ada untuk mengefektifkan dan mengefisienkan tugas skrining dilapangan.

Unsur mesin dalam penggunaan sumber daya menggunakan alat-alat yang sudah elektronik atapun digital akan mengefesienken pekerjaan dilapangan. Jika dicontohkan dalam kegiatan di indikator ini seperti penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Dimana semua riwayat vaksin dan perjalanan seseorang bisa terekam dalam aplikasi tersebut. Sekarang hampir semua kegiatan sudah secara elektronik, yang merupakan pemanfaatan lebih lanjut dari mesin tersebut. Begitu juga dengan pelaporan dan penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan yang tadinya manual, sekarang bisa dilakukan secara digital. Mulai dari pembayaran biling PNBP sampai penerbitan dokumen secara elektronik. Sehingga, menyebabkan kemudahan pelayanan, efisien secara waktu, tenaga dan anggaran juga tentunya. Memanfaatkan teknologi digital dalam pertemuan, kordinasi

dengan stakeholder baik dibandara ataupun pelabuhan.

Pada unsur metode dalam hal ini SOP yang tedapat pada KKP Kelas II Panjang dalam kegiatan kekarantinaan. Penerapan SOP yang baik akan mengefisienkan pelayanan. Performa kerja akan baik dan sesuai dengan tuntunan aturan pelaksanaan jika SOP diterapkan sebagaimana mestinya.

Hasil pencapaian indikator didukung baik sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang yang meliputi tenaga Epidemiolog, Sanitarian, Entomolog, Dokter dan Perawat, maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun Anggaran 2022. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan.

7) Kendala/masalah yang dihadapi

Adapun kendala/masalah yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini diantaranya yaitu :

a) Agen kapal sering kurang melengkapi dokumen persyaratan penerbitan Surat Ijin Berlayar Karantina Kesehatan atau *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC).
b) Permohonan perpanjangan penerbitan sertifikat sanitasi kapal (SSCC/SSCEC) dari pengguna jasa waktunya terlalu singkat dengan waktu keberangkatan kapal.
c) Masih terjadinya gangguan dalam akses SIMKESPEL pelayanan penerbitan sertifikat kapal, sehingga penerbitan dilakukan secara manual.
d) Dalam pelaksanaan skrining penyakit menular, masih ditemukan responden yang kurang koperatif untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan, tidak mengisi dengan jujur dan lengkap *form* pemeriksaan serta proses rujukan membutuhkan waktu yang lama.

8) Pemecahan Masalah

Adapaun pemecahan atas permasalahan tersebut yakni dengan :

a) Bertindak tegas dalam penegakan SOP penerbitan Surat Ijin Berlayar Karantina Kesehatan atau *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC).
b) Meningkatkan koordinasi pada semua pengguna jasa agar dapat menyampaikan surat permohonan pemeriksaan minimal 1 x 24 jam, sehingga dapat diperiksa secara menyeluruh dan tidak tergesa-gesa sebelum kapal diberangkatkan.
c) Menyiapkan dokumen *generate* dan memperbaiki jaringan internet kantor agar tidak menghambat pelayanan penerbitan sertifikat kesehatan kapal.

d) Melakukan pertemuan Lintas Program Lintas Sektor (LPLS) dan penyampaian KIE kepada sasaran. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan diseminasi informasi sehingga diperoleh *feedback* dari LPLS terkait.

9) Realisasi Anggaran Indikator

Kegiatan atau program yang menunjang dalam indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 2.132.532.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.129.678.949,- (99,87%).



Gambar 2 Kegiatan Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

2. INDIKATOR KEDUA

PERSENTASE FAKTOR RESIKO PENYAKIT DI PINTU MASUK YANG DIKENDALIKAN PADA ORANG, ALAT ANGKUT, BARANG DAN LINGKUNGAN

1) **Pengertian :** Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang

dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP sebagai berikut :

a. Faktor Risiko Orang

1) Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan orang yaitu:
2) Penumpang dengan suhu tinggi >37,5^{o}C;
3) Pelaku Perjalanan dengan vaksinasi Covid-19 tidak lengkap (Peduli Lindungi Merah)
4) Penumpang positif Covid-19;
5) Penumpang dengan keadaan sakit;
6) Penumpang dengan saturasi <95;
7) Penumpang yang hamil >32 minggu;
8) Penumpang dengan kadar Hb 8,5;
9) Jemaah haji hamil (< 14 minggu dan >26 minggu);
10) Belum mendapatkan vaksinasi internasional (Meningitis atau Yellow Fever)
11) Dokumen ICV palsu atau kadaluarsa
12) HIV positif
13) TB positif
14) Malaria Positif
15) Penumpang dengan penyakit berpotensi menularkan wabah

Upaya pengendalian risiko yang dilakukan diantaranya :

1) Rujukan ke Rumah Sakit bagi penumpang sakit, suhu tinggi >37,5^{o}C dan positif Covid-19 serta membutuhkan perawatan medis lebih lanjut Rujukan dapat dilakukan juga ke Dinkes terkait hasil penemuan HIV, TB atapun malaria positif;
2) Penyelidikan epidemiologi bagi penumpang yang dicurigai dengan penyakit menular berpotensi menimbulkan wabah;
3) Penolakan berangkat bagi penumpang yang tidak memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan aturan penerbangan dan peraturan lainnya.;
4) Vaksinasi Meningitis ataupun Vaksin Covid-19 bagi calon pelaku perjalanan yang akan berangkat ke daerah endemis Meningitis;
5) Pengobatan, observasi atau penanganan gawat darurat;
6) Penerbitan izin angkut orang sakit;

7) Penerbitan surat layak terbang bagi penumpang yang berisiko;

b. Faktor Risiko Alat Angkut

Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan alat angkut yaitu:

1) Ditemukan vektor, kecoa, tikus, lalat, nyamuk pada alat angkut
2) Mengangkut penumpang sakit berpotensi KKM (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) atau datang dari negara terjangkit penyakit KKM
3) Tidak terdapat P3K
4) Air tercemar/terkontaminasi

Upaya pengendalian risiko yang dilakukan diantaranya :

1) Fumigasi atau atau pengendalian hama dengan menggunakan pestisida dimana dalam proses ini sebuah area akan secara menyeluruh dipenuhi gas atau asap untuk membunuh semua hama didalamnya, Jadi dalam pelaksanaan fumigasi alat angku tersebut ahrus dalam keadaan kosong dari makhluk hidup.
2) Disinfeksi atau tindakan sterilisasi menggunakan bahan kimia desinfektan untuk menindaklanjuti alat angkut yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dalam hal ini terindikasi terdapat cemaran mikroorganisme yang dapat menyebabkan penularan penyakit.
3) Disinseksi atau tindakan pengendalian atau hapus serangga yang dilakukan terhadap alat angkut yang tidak memenuhi syarat dengan indikasi ditemukan tanda-tanda atau keberadaan serangga di dalam pesawat.

c. Faktor Risiko Barang

Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan barang yaitu jenazah dengan persyaratan persyaratan administrasi yang belum lengkap salah satunya yaitu pernyataan telah dilakukan *embalming* (pengawetan jenazah). Jika persyaratan belum lengkap maka dilakukan penundaan atau penolakan keberangkatan.

d. Faktor Risiko Lingkungan

Faktor risiko yang ditemukan dari pemeriksaan lingkungan yaitu:

1) Tempat-Tempat Umum (TTU) yang tidak memenuhi syarat Kesehatan sesuai dengan Permenkes No.70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan

Kesehatan Lingkungan Kerja Industri.

2) Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang tidak memenuhi syarat Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
3) Kualitas air yang tidak memenuhi syarat Kesehatan sesuai dengan
4) Permenkes No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
5) Indeks vektor yang tinggi sesuai dengan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya.

Upaya pengendalian risiko yang dilakukan diantaranya :

1) Pemberian rekomendasi berupa saran perbaikan atas faktor risiko yang ditemukan kepada pihak penyelenggara TTU, TPP, dan SAB.
2) Fogging untuk mengendalikan keberadaan nyamuk dewasa
3) Abatisasi untuk mengendalikan keberadaan jentik
4) Spraying untuk mengendalikan kepadatan lalat
5) Baiting untuk mengendalikan kepadatan kecoa

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya faktor risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut, dan lingkungan sehingga faktor risiko tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

2) Definisi Operasional : Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun dan dikalikan 100%

3) Rumus/Cara Perhitungan :

Persentase faktor risiko penyakit di pintu msuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	=	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	x 100%
		Faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	

Tabel 12 Perhitungan Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan Tahun 2022

Parameter Perhitungan	Capaian 2022		
	Jumlah FR yang ditemukan	Jumlah FR dikendalikan	Persentase FR yang Dikendalikan (4/3)*100
1	*3*	*4*	*5*
Pemeriksaan orang	2.694	2.694	100
Pemeriksaan alat angkut	5	5	100
Pemeriksaan barang	0	0	0
Pemeriksaan Lingkungan	9	9	100
Total	**2708**	**2708**	**100**

Jadi Capaian Persentase faktor risiko penyakit di pintu msuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100%

4) Capaian Indikator

Capaian indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut barang dan lingkungan tahun 2022 telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 97% dengan capain kinerja 103% yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13 Perbandingan Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut Barang dan Lingkungan Tahun 2020 s.d 2022

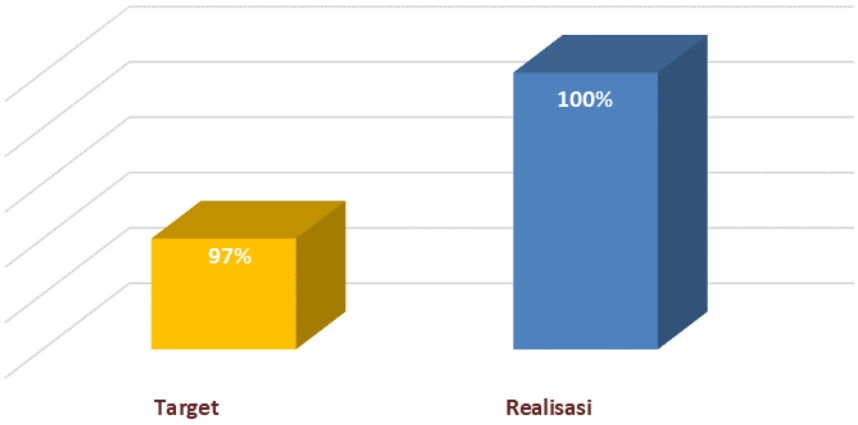
Uraian	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Tahun Sebelumnya	2020	95%	100%	106%
	2021	95%	100%	105%
Tahun ini	**2022**	**97%**	**100%**	**104%**
Target Jangka Menengah	2022	89%	-	-
Target Nasional	2022	89%	-	-
KKP Sejenis	2022	95%	100%	103%

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020 s. d 2022

a) Realisasi Tahun Ini

Berikut ini menampilkan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut Barang dan Lingkungan :

Grafik 26 Target dan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut Barang dan Lingkungan Tahun 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas diketahui bahwa target dan realisasi indikator kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut Barang dan Lingkungan Tahun 2022 tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dengan target 97%, sehingga capaian kinerja sebesar 104%.

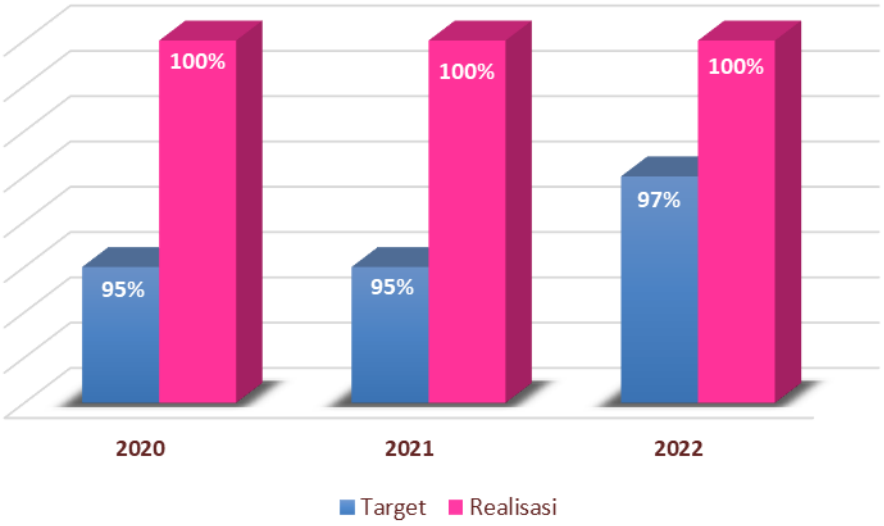
Pencapaian ini ditandai dengan dikendalikannya semua faktor risiko yang ditemukan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan KKP pengendalian faktor risiko kesehatan dan/atau penyakit dengan melakukan skrining untuk menentukan dan mengidentifikasi faktor risiko kesehatan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan. Jika ditemukan faktor risiko pada orang, akan dilakukan rujukan ke fasilitas Kesehatan lebih lanjut untuk mendapatkan pengobatan dan tatalaksana lebih lanjut seperti kasus positif TB, HIV, malaria bahkan Covid-19. Untuk pengendalian faktor risiko alat angkut dilakukan berbagi tindakan langsung maupun tidak langsung oleh KKP ataupun bekerja dengan pihak swasta seperti pelaksanaan fumigasi di alat angkut. Untuk pengendalian faktor risiko pada barang atapun lingkungan juga dilakukan tindakan langsung dan tidak langsung. Tindakan langsung yang dilakukan seperti pengendalian vektor dengan fogging, abatisasi, pemasangan perangkap tikur, lalat dan lain sebaginya. Sedangkan tindakan pengendalian tidak langsung adalah dengan melakukan advokasi, promotiv preventif dan pembuatan rekomendasi ke stakeholder mapun pengguna jasa yang membawahi wilayah pelabuhan/bandara

misalnya dalam hal pengendalian sumber air, TTU, TPM yang tidak memenuhi syarat, pengendalian kebisingan dan lain sebagainya.

b) Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target dan capaian indikator kinerja persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut barang dan lingkungan pada tahun 2022 hampir sama dengan tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 100% dengan capaian kinerja 104% yang dapat lihat pada dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 27 Target dan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut Barang dan Lingkungan Tahun 2020 s.d 2022

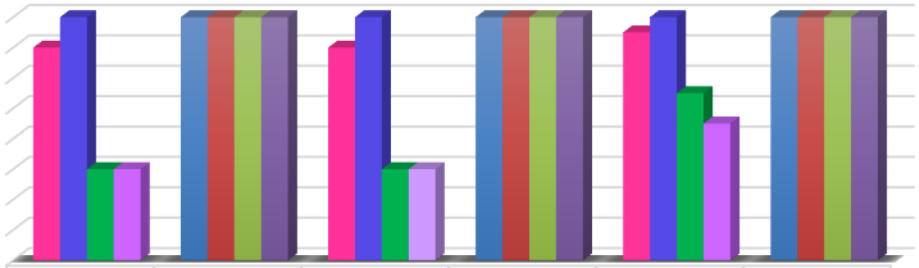


Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan target dari tahun-tahun sebelumnya, namun realisasi faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tahun 2022 sama dengan tahun 2020 dan 2021 yakni sebesar 100%.

Faktor risiko yang dikendalikan meliputi 4 komponen yaitu pengendalian pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Untuk target dan realisasinya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 28 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut Barang dan Lingkungan Tahun 2020 s.d 2022



	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengendalian pada orang	98%	100%	98%	100%	99%	100%
Pengendalian pada alat angkut	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengendalian pada barang	90%	100%	90%	100%	95%	100%
Pengendalian pada lingkungan	90%	100%	90%	100%	93%	100%

Pengendalian pada orang Pengendalian pada alat angkut Pengendalian pada barang Pengendalian pada lingkungan

Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 s.d 2022 perbandingan capaian pengendalian pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100%. Semua faktor risiko yang dideteksi dilakukan pengendalian sesuai dengan arah kebijakan strategi dan kewenangan KKP Kelas II Panjang.

c) Perbandingan dengan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2021-2024

Capaian indikator kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut Barang dan Lingkungan tahun 2022 sudah sama dengan target RAK tahun 2022 yakni sebesar 100%.

d) Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah

Capaian indikator kinerja persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut barang dan lingkungan KKP Kelas II Panmjang tahun 2022 sebesar 100%. Ini sudah melebihi target jangka menengah dalam RAP Ditjen P2P tahun 2022 sebesar 93%. Persentase faktor risiko yang dikendalikan oleh KKP Kelas II Panjang berkontribusi dalam pencapaian target secara nasional

e) Perbandingan Dengan Target Nasional

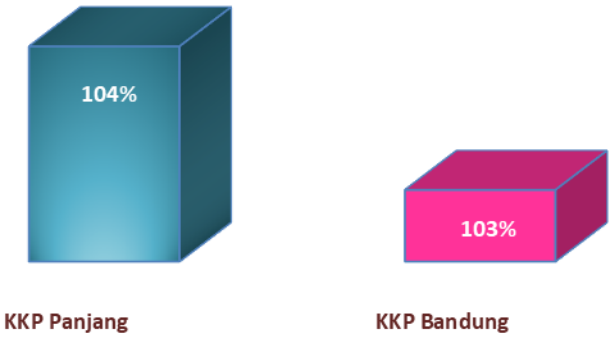
Bila dibandingkan dengan target nasional tahun 2022 sebesar 93%, maka

capaian KKP Panjang sebesar 100% sudah melebihi target nasional.

f) Perbandingan Dengan Satker sejenis

Perbandingan dengan satker sejenis dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 29 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut Barang dan Lingkungan Tahun 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa perbandingan capaian dari satker sejenis yaitu KKP Kelas II Bandung, maka angka capaian kinerja KKP Kelas II Panjang tahun 2022 sebesar 104%, sedikit lebih tinggi daripada KKP Kelas II Bandung dengan capaian sebesar 103%.

5) Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator Kinerja

Upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan indikator kinerja dilakukan dari beberapa kegiatan sepanjang tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 14 Target dan Realisasi Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut Barang dan Lingkungan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PK TURUNAN			TARGET	CAPAIAN	PERSEN
		2.	*Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.*			97%	100%	104%
				1.	Faktor risiko yang dikendalikan pada orang	100%	100%	***100%***
				2.	Faktor risiko yang dikendalikan alat angkut	86%	0%	***0%***
				3.	Faktor risiko yang dikendalikan pada barang	100%	100%	***100%***
				4.	Faktor risiko yang dikendalikan barang pada (TTU, TPM, SAB dan Vektor)	100%	100%	***100%***

Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Tabel diatas menyajikan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut barang dan lingkungan. Untuk persentase pemeriksaan faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut dan lingkungan tercapai sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 104%. Sedangkan, tahun 2022 faktor risiko pada barang tidak ditemukan.

Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dilihat dalam uraian di bawah ini :

1. Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang

Faktor risiko penyakit adalah faktor yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit atau yang menyebabkan terjadinya peningkatan penyakit ataupun masalah kesehatan. Beberapa contoh faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang adalah Suhu tinggi > 37,5, positif Covid-19, sakit, saturasi oksigen <95, untuk penerbangan hamil >32 minggu, Hb <8.5, bayi berumur < 7 hari, untuk keberangkatan haji : hamil <14 minggu dan > 26 minggu, penyakit menular yang menimbulkan wabah, belum vaksin meningitis, dan ICV palsu/*expire.*

Dalam hal ini, beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mengendalikan faktor risiko penyakit pada orang adalah dengan melakukan pemberikan rujukan

kasus penyakit yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan lanjutan, penundaan keberangkatan terhadap penumpang yang tidak memiliki hasil rapid test/swab test COVID-19 ataupun penumpang yang hasil swab antigen/PCR positif, rekomendasi perjalanan (*clearance* untuk orang selesai karantina), skrining para pelaku perjalanan dan ABK di setiap pelabuhan/bandara yang menjadi pintu masuk di wilayah Lampung. Semua faktor risiko yang ditemukan dilakukan respon, dikendalikan dan dilakukan tindak lanjut.

Realisasi faktor risiko yang dikendalikan pada orang tahun 2022 telah tercapai sebesar 100% dari target 97% dengan capaian kinerja sebesar 104%.

2. Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Barang

Faktor risiko penyakit yang dikendalikan pada barang meliputi kegiatan pemberangkatan jenazah. Untuk tahun 2022, jumlah penerbitan surat izin angkut jenazah sebanyak 54 dokumen. Tidak ada faktor risiko yang ditemukan pada jenazah tersebut.

3. Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Alat Angkut

Faktor risiko yang dapat menimbulkan masalah kesehatan dari alat angkut dapat dikendalikan dengan melakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan sertifikat COP, sertifikat PHQC, sertifikat P3K, dan sertifikat sanitasi kapal. Tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan faktor risiko dari alat angkut biasanya pemeriksaan higiene sanitasi alat angkut dan pengawasan tindakan sanitasi alat angkut seperti disinseksi, disinfeksi, fumigasi, dekontaminasi dan penetapan kapal dalam karantina terhadap kapal yang membawa penumpang dengan penyakit menular kekarantinaan. Semua faktor risiko penyakit yang ditemukan pada alat angkut dikendalikan dan dilakukan tindakan sampai layak untuk diterbitkan sertifikat kekarantinaan. Target mengendalikan faktor risiko pada alat angkut tahun 2022 sebesar 100% dengan capaian juga 100%.

4. Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Lingkungan

Faktor risiko kesehatan yang dikendalikan pada lingkungan di KKP Kelas II Panjang dengan melakukan pemeriksaan dalam rangka penyehatan Tempat-Tempat Umum (TTU) dan pengolahan Tempat Pengolahan Makanan (TPM), melakukan kegiatan *Indoor Residual Spraying* (IRS), survey vektor pes, diare,

malaria dan DBD pada wilayah kerja KKP, fogging, larvasida, insektisida, pemberdayaan kader Jumantik (Juru Pemantau Jentik) dan penggunaan Teknologi Tepat Guna dalam rangka pelabuhan bebas jentik dan bebas vector. Target kegiatan ini tahun 2022 sudah tercapai 100% dari target sebesar 90%, sehingga capaian kinerja 100%.

6) Analisis Penyebab Keberhasilan

Indikator kinerja persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut barang dan lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang telah melebihi target dengan capaian 100% dari target 97% dengan capaian kinerja 104%. Hasil pencapaian indikator didukung baik sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya sejalan dengan peningkatan kapasitas yang dilakukan secara reguler setiap tahunnya di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang yang meliputi tenaga Epidemiolog, Sanitarian, Entomolog, Dokter dan Perawat, maupun sumber daya peralatan sarana dan prasarana yang yang memadai dalam mengendalikan faktor risiko penyakit di pintu masuk negara di KKP Kelas II Panjang.

Untuk mencapai keberhasilan capaian tersebut, KKP Kelas II Panjang menerapkan strategi/kebijakan sebagai berikut :

a) Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC)
b) Peningkatan kapasitas petugas dalam pengendalian faktor risiko
c) Peningkatan sistem rujukan terintegrasi yang cepat, tepat dan aman
d) Berkolaborasi dengan lintas sektor dalam penindakan pelanggaran kekarantinaan
e) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan terhadap TTU, TPP, sarana air yang belum memenuhi syarat.
f) Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian faktor risiko

Koordinasi dan kerja sama yang baik pro aktif dan berkelanjutan dengan lintas sektor dan lintas program di wilayah ataupun di kawasan Pelabuhan dan bandara meliputi Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Otoritas Bandara, KSOP Pelindo, Angkasa Pura, Maskapai Penerbangan, Agen Pelayaran, Pengelola TTU dan TPM dan stakeholder/instansi lainnya adalah cara untuk efektif untuk melaksanakan program-program kesehatan di wilayah yang menjadi kewenangan tugas KKP.

Disamping hal diatas, pada masa pandemi Covid-19. Durasi kerja di KKP Kelas II Panjang lebih padat ataupun lebih panjang dari biasanya. Maka dalam hal ini dilakukan upaya memanfaatkan dan mengefisienkan SDM yang ada karena dilakukan piket di bandara ataupun pelabuhan dalam rangka skrining pelaku perjalanan yang biasanya hanya pada *traveler* internasional, sekarang pada *traveler* domestik juga.

7) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut barang dan lingkungan tahun 2022 tercapai 104% dengan realisasi anggaran sebesar 99,48.%%. Capaian kinerja lebih besar dari persentase realisasi anggaran sehingga sudah efisien dengan nilai efisiensi sebesar 57,10%.

Dalam menganalisis penggunaan sumber daya kita bisa menggunakan prinsip 5M unsur manajemen, sehingga pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sumber daya anggaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Pengertian 5M meliputi *Man, Money, Materials, Machines, and Methods* (Manusia, Uang, Material, Mesin dan Metode). *Man* merujuk pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh instansi/organisasi. *Money* atau uang dalam hal ini merujuk pada anggaran dalam pembiayaan kegiatan. Material merujuk pada sarana dan prasarana yang yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan tupoksi KKP di lapangan. *Machine* atau mesin dalam hal ini adalah beberapa fasilitas ataupun aplikasi yang dapat mendukung dan mempermudah kegiatan suatu organisasi dalam melayani pengguna jasa seperti aplikasi yang bersifat elektronik yang sebelumnya manual ataupun alat-alat yang bisa digunakan secara digital yang menciptakan efesiensi kerja baik dari segi waktu ataupun tenaga. Sedangkan, metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya proses pekerjaan dan layanan yang dalam hal ini merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat dalam suatu organisasi.

Pada unsur *Man* dalam efisiensi penggunaan SDM yaitu penggunaan SDM yang relatif efisien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran untuk indikator Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan lain yang juga membutuhkan SDM yang handal. Jadi, kebutuhan akan tenaga yang profesional sangat penting untuk efisiensi penggunaan SDM. Penempatan SDM dalam hal ini pegawai KKP Kelas II Panjang harus sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban

Kerja berdasarkan jabatan fungsional untuk pelayanan dan peningkatan performa kerja yang baik. Disamping itu, integrasi dan kolaborasi dalam penempatan SDM dan menangani serta menjalankan tupoksi merupakan solusi untuk efisiensi SDM ini. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja indikator persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibutuhkan beberapa kompetensi baik dari segi bidang pendidikan formal dan pendidikan latihan. Beberapa petugas yang melayani kegiatan kekarantinaan sudah mengikuti diklat kekarantinaan. Namun, dilapangan mereka tidak terbatas untuk kegiatan kekarantinaan tetapi juga kegiatan lain yang berhubungan dengan tupoksi KKP secara keseluruhan. Seperti tugas di wilayah kerja untuk efisiensi SDM. Seorang pegawai tidak hanya terikat dengan tupoksi seksinya dalam melakukan pelayanan di lapangan, tetapi juga bisa melaksanakan tugas lainnya yang masih sesuai dengan bidang keilmuan ataupun kompetensinya.

Pada unsur *Money* dalam efisiensi penggunaan keuangan merupakan penggunaan sumber daya pembiayaan yang sangat efisien melalui prioritasi penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran pada indikator. Prioritas anggaran diarahkan untuk biaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan di KKP Kelas II Panjang dalam melayani pengguna jasa. Kegiatan prioritas ini ditujukan untuk mencapai target kesehatan pembangunan nasional. Hal ini merupakan strategi untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Perjalanan dinas harus dioptimalkan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kompetensi, koordinasi, dan peningkatan pengalaman dengan melakukan konsultasi teknis, diklat, pengayaan keterampilan dibidang masing-masing pegawai baik ke KKP kelas II, ke satker pusat maupun ke KKP sejenis serta ke badan akademis untuk pengayaan keterampilan dan kompetensi.

Pada unsur Material dalam penggunaan efisiensi sarana dan prasarana dalam menjalan tupoksi dilapangan mengggunakan alat-alat untuk mendukung kinerja yang baik. Pada pandemi Covid-19 menggunakan seluruh sarana yang ada untuk mengefektifkan dan mengefisienkan tugas skrining dilapangan dalam rang pengendalian dan pencegahan Covid-19 di pintu masuk wilayah.

Unsur mesin dalam penggunaan sumber daya menggunakan alat-alat yang sudah elektronik atapun digital akan mengefesienkan pekerjaan dilapangan. Beberapa contoh kegiatan di indikator ini seperti formulir skrining pasien yang mau suntik meningitis yang tadinya manual yang harus dicetak sekarang langsung mendaftar

secara online dan dilakukan skrining, penggunaan e-HAC yang tadinya manual menggunakan kertas. Sekarang sudah menggunakan elektronik. Pelaporan dan penerbitan dokumen kesehatan yang tadinya manual, sekarang bisa dilakukan secara digital. Sehingga, menyebabkan kemudahan pelayanan, efisien secara waktu, tenaga dan anggaran juga tentunya.

Pada unsur metode adalah SOP yang tedapat pada KKP Kelas II Panjang dalam kegiatan kekarantinaan. Penerapan SOP yang baik akan mengefisienkan pelayanan. Performa kerja akan baik dan sesuai dengan tuntunan aturan pelaksanaan.

8) Kendala/masalah Yang Dihadapi

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini diantaranya :

a) Belum semua TPM yang berada di area Pelabuhan dan Bandara mempunyai sertifikat laik *hygiene* karena kondisi TPM yang masih belum beroperasi maksimal dalam masa pandemi.
b) Masih ada pengelola TPM ataupun TTU yang belum menindaklanjuti hasil rekomendasi dari pemeriksaan sanitasi KKP.
c) Dalam pelaksanaan skrining penyakit menular, masih ditemukan responden yang kurang koperatif untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan, tidak mengisi dengan jujur dan lengkap *form* pemeriksaan.
d) Permohonan perpanjangan penerbitan sertifikat sanitasi kapal (SSCC/SSCEC) dari pengguna jasa waktunya terlalu singkat dengan waktu keberangkatan kapal.
e) Data NAR yang belum diinput oleh klinik/laboratorium pemeriksa, sehingga hasil Antigen ataupun PCR penumpang belum terbaca di aplikasi Pedulilindungi pada saat di keberangkatan domestik, sehingga penumpang masih melakukan validasi secara manual, telah dilakukan pencatatan oleh petugas KKP.
f) Masih ada penumpang yang membawa surat keterangan pemeriksaan antigen palsu dan juga sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu.

9) Pemecahan Masalah

a) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara berkesinambungan kepada TPM yang berada di area pelabuhan dan bandara dan juga melakukan pelatihan kepada para penjamah makanan.
b) Upaya tindakan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan yang hasilnya kurang dengan diseminasi informasi hasil inspeksi sanitasi TPM ataupun TPU secara

terus menerus atau berkelanjutan.

c) Melakukan pertemuan Lintas Program Lintas Sektor dan penyampaian KIE kepada sasaran. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan diseminasi informasi sehingga diperoleh *feedback* dari LPLS terkait.

d) Meningkatkan kordinasi dengan Lintas Program Lintas Sektor untuk pengawasan dan pengendalian COVID-19.

e) Koordinasi dan kerjasama untuk membentuk jejaring kemitraan dengan LPLS dan instansi terkait di pelabuhan.

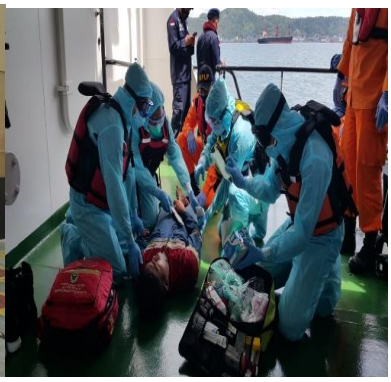
f) Sosialisasi ke klinik/laboratorium pemeriksa untuk segera menginput data NAR, khususnya bagi pelaku perjalanan yang akan menggunakan hasil tersebut sebagai syarat kelaikan untuk terbang.

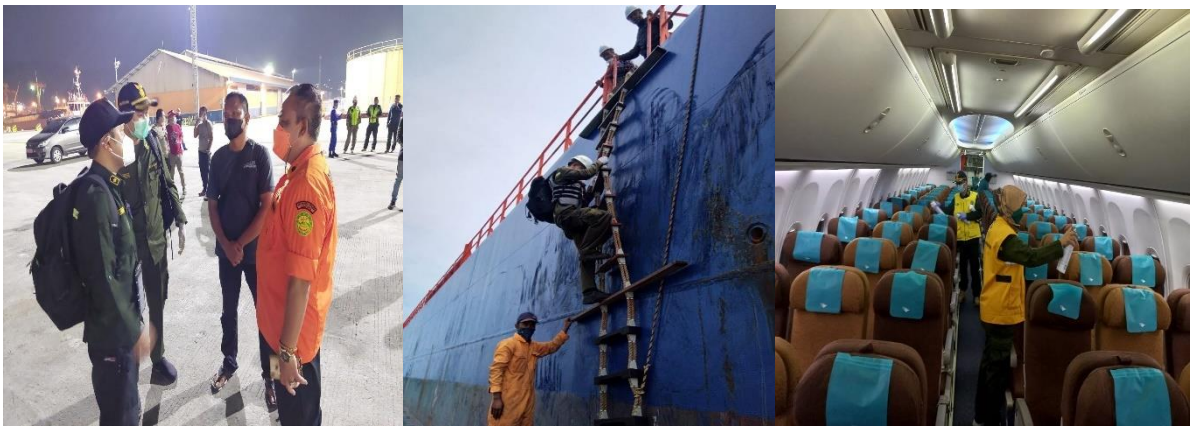
g) Penindakan secara tegas dengan membuat laporan ke pihak kepolisian kepada oknum yang memfasilitasi dan mengadakan dokumen ICV Meningitis tidak valid.

10) Realisasi Anggaran Indikator

Kegiatan atau program yang menunjang dalam indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.118.648.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.112.780.000,- (99,48%). Sumber daya anggaran tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan.







Gambar 3 Persentase Faktor Risiko Penyakit di Pintu Masuk yang Dikendalikan

3. INDIKATOR KETIGA

INDEKS PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO DI PINTU MASUK NEGARA

1) **Pengertian :** Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.
   dari 10 parameter yakni :
   a) Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%
      Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) untuk mendeteksi dan merespon secara cepat setiap kejadian terhadap faktor risiko PHEIC tersebut kurang dari 24 jam, dapat berupa respon cepat di level KKP sendiri atau sebagai masukkan bagi pengelola Bandara dan dapat juga berupa masukkan/usulan bagi Instansi Pusat.
   b) Indeks Pinjal ≤ 1
      Salah satu upaya pemberantasan penyakit menular adalah dengan melakukan pemberantasan pinjal pada binatang pengerat tikus. Adapun syarat jumlah indeks pinjal yang ditargetkan tidak melebihi 1 %. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya upaya pemberantasan dan pengendalian tikus agar pelabuhan bebas dari pinjal. Kegiatan pengendalian vektor pes dilakukan dengan pemantauan titik-titik lokasi keberadaan tikus kemudian dilakukan pemasangan perangkap pada lokasi tersebut dengan tujuan mengidentifikasi tikus dan pinjal.
   c) Tidak Ditemukan Larva Anopheles

Pengamatan keberadaan larva Anopheles dilakukan dengan survei Larva Anopheles dengan penangkapan larva menggunakan dipper/cidukan yang dilakukan pada berbagai macam genangan air. Persyaratan di lingkungan sekitar bandara yaitu tidak ditemukannya larva Anopheles.

d) Indeks Populasi Kecoa < 2

Kecoa merupakan vektor mekanis dari berbagai penyakit Kegiatan pengamatan kecoa dilakukan pada titik-titik yang berpotensi adanya vektor kecoa seperti rumah makan/restoran, gedung dan bangunan. Sesuai dengan Permenkes Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa INDIKATOR 3 Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara 69 Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 KKP Kelas II Panjang Penyakit serta Pengendalianya. yaitu jumlah populasi kecoa blatella germanica < 2 ekor (kategori rendah).

e) Indeks Populasi Lalat < 2

Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan. Upaya untuk menurunkan populasi lalat adalah sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan. Untuk itu sebagai salah satu cara penilaian baik buruknya suatu lokasi adalah dilihat dari angka kepadatan lalatnya. Kepadatan lalat <2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah atau tidak menjadi masalah.

f) HI perimeter = 0

House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh rumah atau bangunan yang diperiksa. Sesuai ketentuan IHR tahun 2005, wilayah perimeter harus bebas dari investasi Aedes sp baik stadium larva maupun dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva.

g) HI buffer < 1

Wilayah buffer adalah wilayah darat yang berjarak jarak 2 km diluar wilayah Bandara yang harus bebas risiko penularan penyakit oleh vektor dengan standar House Index (HI) <1,2 km adalah jarak terbang vektor nyamuk Anopheles sp.

h) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat

Pengawasan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) yaitu gedung/bangunan di

Bandara-Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

i) Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
Tempat Pengelolaan Makanan atau TPP terdiri dari jasaboga golongan C dan Rumah Makan/Restoran. Pengawasan hygiene sanitasi TPP terdiri dari dua kegiatan yaitu pemeriksaan kelaikan hygiene sanitasi dan pengambilan sampel (makanan, usap alat dan usap tangan).

j) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali bakteriologis Pengawasan kualitas air minum di bandara dilakukan dengan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Minum dan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisika, kimia dan mikrobiologi. Pengujian berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pengawasan dilakukan terhadap lokasi sarana air minum mulai dari sumber air untuk kebutuhan seluruh bandara, stasiun pengolahan air minum, air untuk kebutuhan pesawat (*water car*, *Ground Support Sistem* dan katering / jasaboga golongan C) dan air yang langsung diminum (*drinking water*).

Outcome dari indikator ini yaitu meningkatnya indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara.

2) Definisi Operasional : Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

3) Rumus/Cara Perhitungan :

Mengukur status indeks pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara sebagai berikut :

- Menghitung persentase faktor risiko di pintu masuk negara dari akumulasi setiap parameter target atau capaian dijumlahkan dan dibagi 10 dikali 100%.
- Setelah didapatkan persentase akumulasi semua parameter dimasukkan ke dalam rumus indeks.
- Range indeks 0-1
- Bobot dihitung berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)
- Bobot 5 Mutlak, Bobot 4 Penting, Bobot 4 Penting
- Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai *score* maksimal dikurang *score*

minimal)

Yang menjadi parameter target dan capaian indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebagai berikut :

1. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%
2. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1
3. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)
4. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2
5. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2
6. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0
7. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1
8. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
9. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
10. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi /bakteriologis.

Tabel 15 Konversi Nilai Indeks Deteksi Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara Tahun 2022

NO	Parameter	Bobot	Capaian	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	3	100	100	300,00	100	100	300
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	3	100	100	300,00	100	100	300
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	3	100	100	300,00	100	100	300
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	3	100	100	300,00	100	100	300
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	3	98	98	294,00	100	100	300
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	3	100	100	300,00	100	100	300

NO	Parameter	Bobot	Capaian	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	3	100	100	300,00	100	100	300
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	3	100	100	300,00	100	100	300
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	3	100	100	300,00	100	100	300
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	3	95	95	285,00	100	100	300
					2.979,00			**3.000**

4) Capaian Indikator

Capaian indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,99 dari target 0,8 . Hasil capaian indikator kinerja jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 16 Capaian Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk negara Tahun 2022

Uraian	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Tahun sebelumnya	2020	0,80	0,98	123
	2021	0,80	0,99	124%
Tahun ini	**2022**	**0,80**	**0,99**	**124%**
Target Jangka Menengah	2022	-	-	-
Target Nasional	2022	-	-	-
KKP Sejenis	2022	0,95	0,86	90,53%

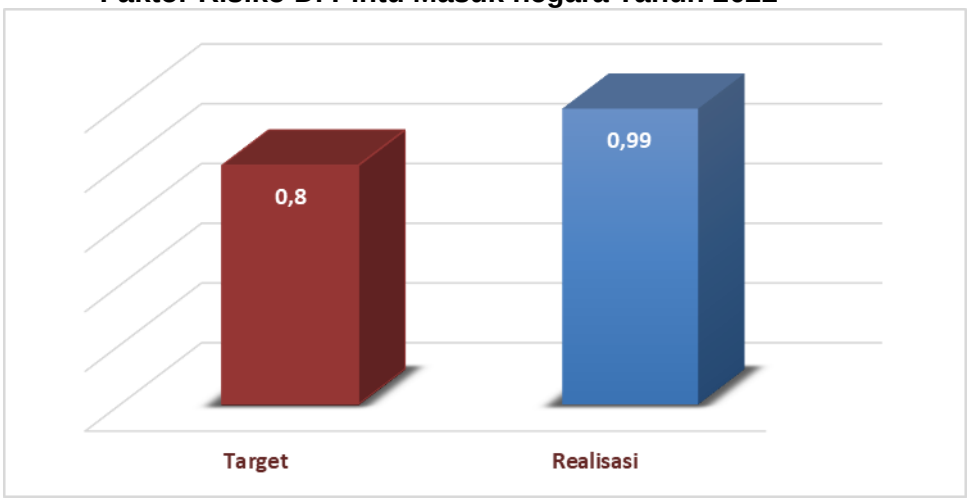
Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020 s. d 2022

a) Realisasi Tahun Ini

Pencapaian indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,99 dari target 0,80 dengan capaian kinerja 124%.

Berikut adalah grafik capain target dan realisasi indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara :

Grafik 30 Grafik dan Target Capaian Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk negara Tahun 2022

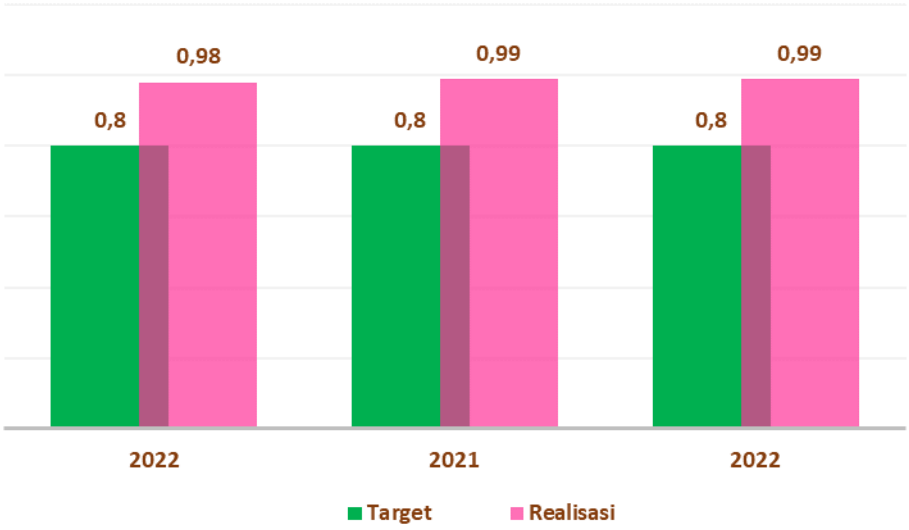


Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik ditas dapat diketahui bahwa tahun 2022 target indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 0,8 dengan realisasi 0,99.

Berikut ini menampilkan grafik perbandingan target dan capaian indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara tahun 2022.

Grafik 31 Grafik Perbandingan dan Target Capaian Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk negara Tahun 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks

Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara dari tahun 2020 s.d 2022 hampir sama dimana tahun 2022 capaian kegiatan ini sebesar 0,99 sama dengan tahun 2021. Sedangkan tahun 2020 capaian sebesar ,098.

b) Perbandingan dengan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2021-2024

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan target dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2021 – 2024, maka capaian indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara KKP kelas II Panjang tahun 2022 hampir mencapai target. Target RAK 2024 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara yaitu 1, sedangkan capaian tahun 2022 sebesar 0,99.

c) Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah

Pada Renstra Kemenkes dan RAP Ditjen P2P Tahun 2020-2024 tidak terdapat indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara, namun indikator ini mendukung pencapaian target indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan dengan target 93% pada tahun 2022.

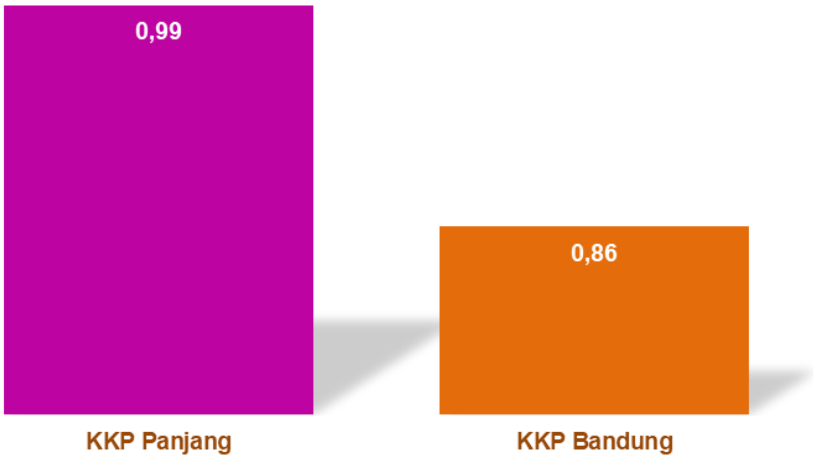
d) Perbandingan Dengan Target Nasional

Indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara juga tidak dapat dibandingkan dengan target nasional karena tidak tertuang dalam RAP P2P tahun 2022 – 2024, namun Indikator ini mendukung capaian target indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan dengan target 93% pada tahun 2022.

e) Perbandingan Dengan Satker Sejenis

Jika dibandingkan dengan Satker sejenis yaitu KKP Kelas II Bandung, capaian indikator kinerja indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara KKP Kelas II Panjang lebih tinggi dari KKP Kelas II Bandung yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 32 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Dengan Satker Sejenis Tahun 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui capaian KKP Panjang pada indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara tahun 2022 lebih tinggi yaitu sebesar 0,99%, sedangkan KKP Bandung sebesar 0,86%.

5) Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Capaian

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja dilakukan dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 17 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PK TURUNAN	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
		3. *Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara**		0,80	0,99	*124%*
			1. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	95%	100%	*105%*
			2. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	100%	100%	*0%*
			3. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	98%	100%	*102%*
			4. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	98%	100%	*102%*

			5.	**Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2**	95%	98%	***103%***
			6.	**Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0**	100%	100%	***100%***
			7.	**Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1**	98%	100%	***102%***
			8.	**Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan**	90%	100%	***111%***
			9.	**Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan**	90%	100%	***111%***
			10.	**Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis**	95%	99%	***104%***

Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan pada indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a) Sinyal SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang dari 24 jam

Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Respon adalah suatu sistem yang dapat memantau perkembangan *trend* suatu penyakit menular potensial KLB/wabah dari waktu ke waktu (periode mingguan) dan memberikan sinyal peringatan (*alert*) kepada pengelola program bila kasus tersebut melebihi nilai ambang batasnya, sehingga mendorong program untuk melakukan respons. *Alert* atau signal yang muncul pada sistem bukan berarti sudah terjadi KLB tetapi merupakan pra-KLB yang mengharuskan petugas untuk melakukan respons cepat agar tidak terjadi KLB.

Dalam masa pandemi Covid-19 dimana sudah menjadi permasalahan dunia dan Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang kasusnya meningkat tajam setiap harinya, maka KKP Kelas II Panjang sebagai mata negara di garda terdepan dalam melakukan cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara/wilayah merespon SKD dan respon di masa pandemi dengan melakukan skrining secara rutin terhadap pelaku perjalanan dalam dan luar negeri.

Capaian jumlah sinyal SKD KLB yang direspon kurang dari 24 jam pada tahun 2022 sebesar 100%. Ini dibuktikan bahwa semua pintu masuk wilayah yang menjadi pengawasan KKP Kelas II Panjang seperti Pelabuhan Bakauheni, Bandara Radin Inten II Branti, Pelabuhan Teluk Semangka dan Pelabuhan Rawajitu dan beberapa pelabuhan khusus yang menjadi pintu masuk negara dilakukan surveilans rutin atau skrining.

Tahun 2022, beberapa sinyal KLB yang direspon kurang dari 24 jam yaitu positif Covid-19 dari pemeriksaan RDT antigen di Debarkasi Haji Propinsi Lampung dan *suspect* Covid-19 dari jemaah umroh serta tanggap bencana gempa Cianjur dengan mengirimkan Tim Kesehatan.

b) Indeks Pinjal $\leq$ 1

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target pengendalian vektor pes dengan indeks pinjal $\leq$ 1, yaitu kegiatan pengawasan tikus dan pinjal pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 95% dan terealisasi sebesar 100%. Jumlah perangkap yang dipasang sebanyak 6.000 perangkap. Jumlah tikus tertangkap sebanyak 73 ekor.

c) HI Perimeter = 0

Untuk mencapai target nilai HI di daerah perimeter 0 (nol), dilakukan kegiatan survey jentik dan larvasidasi yang dilaksanakan di wilayah perimeter dan buffer setiap bulannya. Larvasidasi merupakan kegiatan untuk memutus rantai penularan DBD dan antisipasi peningkatan index jentik nyamuk Aedes aegypti di semua wilayah kerja berdasarkan laporan hasil survey jentik yang dilaporkan setiap bulan. Jumlah bangunan yang diperiksa pada tahun 2022 sebanyak 523 bangunan. Kegiatan larvasida selama tahun 2022 sebanyak 25 kg yang dilakukan di 48 kali di 4 lokasi. Untuk realisasi kegiatan ini mencapai 100%.

d) Tidak Ditemukan Larva Anopheles

Larva yang kemudian berkembang menjadi nyamuk *Anopheles* betina mampu menjadi vektor malaria bagi manusia. Identifikasi larva Anopheles dilakukan di 48 kali di 4 lokasi dengan capaian 100%.

e) Kepadatan Kecoa Rendah

Kecoa merupakan salah satu insekta yang berperan sebagai vektor penyakit yang banyak ditemukan dalam rumah, gedung-gedung, termasuk dalam restoran ataupun rumah makan. Kecoa dapat mengkontaminasi makanan manusia dengan membawa *agent* berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencernaan seperti diare, demam thypoid, disentri, virus hepatitis a, polio dan kolera.

Oleh sebab itu, dilakukan kegiatan survey kepadatan kecoa pada pelabuhan/bandara untuk mengurangi kepadatan kecoa. Dari hasil kegiatan pengendalian kepadatan kecoa tahun 2022 yang dilakukan pada 48 kali di 4 lokasi Pelabuhan. Jumlah lokus yang diperiksa tahun 2022 sebanyak 120 lokasi survey dengan hasil survey kepadatan tinggi 0, kepadatan sedang 14 (22%) dan kepadatan rendah 50 (78%). Kegiatan ini terlaksana sebesar 100%.

f) Kepadatan Lalat < 2

Kegiatan survey kepadatan lalat dilakukan dengan mengukur kepadatan lalat menggunakan *Flygrill*. Kepadatan lalat di wilayah pelabuhan/bandara hendaknya ditekan serendah mungkin (angka kepadatan lalat < 2).

Survei kepadatan lalat ini dilaksanakan untuk mencapai target pengendalian vektor diare dimana kecoa merupakan vektor penyebab diare. Target kegiatan ini tahun 2022 sebanyak 48 kali di 4 lokasi dengan jumlah lokus yang diperiksa 120 lokasi dengan capaian 100%.

g) TTU Memenuhi Syarat

Pengawasan sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) di pelabuhan/bandara adalah pengawasan kondisi dari komponen atau bagian-bagian bangunan serta fasilitas pendukungnya dari kemungkinan timbulnya masalah kesehatan. Kegiatan ini bertujuan agar TTU yang merupakan tempat yang digunakan bagi orang banyak memenuhi syarat kesehatan. Target pengawasan sanitasi TTU ini tahun 2022 sebanyak 220 pemeriksaan dengan capaian 222 pemeriksaan (100%) yang pemeriksaannya dilakukan setiap bulan.

h) TPM Laik Hygiene

Kegiatan pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) bertujuan untuk mengetahui dan menjaga makanan serta minuman yang dikonsumsi oleh

masyarakat tetap aman, hygiene, bersih dan sehat, sehingga tidak menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah kesehatan seperti keracunan makanan atau penyakit bawaan makanan. Pemerikasaan/pengawasan sanitasi makanan dan minuman di lingkungan pelabuhan dilakukan melalui pengawasan rutin tempat pengolahan makanan minuman yang rata–rata berbentuk kantin atau warung makan.

Dengan adanya pengawasan TPM secara rutin terbentuklah TPM yang laik hygiene baik dari segi penjamah makanannya maupun cara penyajiannya. Target kegiatan pengawasan TPM tahun 2022 dalam rangka terbentuknya TPM laik hygiene sebanyak 220 pemeriksaan dengan capaian 221 pemeriksaan (100%). Inspeksi TPM dilaksanakan secara rutin setiap bulan di seluruh wilayah kerja KKP Kelas II Panjang. Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan dengan metode observasi. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang telah ditentukan. Setiap pengelola TPM diharapkan tetap memperhatikan kebersihan sekitar TPM terutama sampah harus ditangani dalam 1 X 24 jam.

i) Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

Pengawasan penyedian air bersih adalah pengawasan terhadap sarana penyedian air bersih, kualitas air (fisik, kimia dan bakteriologi) agar memenuhi syarat kesehatan. Target pengawasan sarana air bersih yang diinspeksi pada tahun 2022 sebanyak 205 kali pengawasan dengan capaian 205 pengawasan (100%). Sedangkan, untuk jumlah sampel air minum/ air bersih yang diperiksa laboratorium pada tahun 2022 sebanyak 64 sampel.

Pengambilan sampel air minum/ air bersih dilakukan di beberapa titik termasuk gedung perkantoran, tempat pengolahan makanan dan tempat penyedia makanan. Hasil pemeriksaan hanya berlaku pada sampel yang telah diuji. Keberhasilan kegiatan ini ditunjang dengan adanya pengawasan secara rutin terhadap sarana termasuk pipa penyaluran dan reservoar sebagai wadah penampungan air persediaan dan pemeriksaan sampel secara rutin.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator indeks pengendalian faktor resiko di pintu masuk negara adalah dengan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan surveilans epidemiologi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data surveilans epidemiologi, survey dan pengendalian vektor dan

binatang penular penyakit, serta pengawasan kualitas air minum. Adapun upaya teknis lebih sebagai berikut:

a. Melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap penumpang kedatangan baik dalam negeri maupun luar negeri yang mempunyai tanda/gejala PHEIC
b. Menurunkan Tim Gerak Cepat (TGC) untuk penanggulangan kasus PHEIC seperti kasus AKI.
c. Melakukan pertemuan rencana kontingensi untuk penyakit yang menyebabkan PHEIC.
d. Pembinaan terhadap penjamah makanan.
e. Pemberian saran/rekomendasi langsung di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat-tempat umum kepada petugas kebersihan yang bertugas saat itu .
f. Pengawasan eksternal kualitas air minum melalui kegiatan uji petik pemeriksaan kualitas air
g. Memberikan pelatihan hygiene sanitasi pangan kepada penanggung jawab dan penjamah makanan.

6) Analisis Penyebab Keberhasilan

Kegiatan pengendalian indeks faktor risiko di pintu masuk negara penyakit telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini didukung oleh maksimalnya kinerja sumber daya manusia dan peralatan dalam melaksanakan beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja . Pada masa pandemi Covid-19. Durasi kerja di KKP Kelas II Panjang lebih padat ataupun lebih panjang dari biasanya. Maka dalam hal ini dilakukan upaya memanfaatkan dan mengefisinkan SDM yang ada karena dilakukan piket di bandara ataupun pelabuhan dalam rangka skrining pelaku perjalanan yang biasanya hanya pada *traveler* internasional, sekarang pada *traveller* domestik juga. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh beberapa strategi kebijakan oleh KKP Kelas II Panjang seperti :

a) Terciptanya kerjasama lintas sektor dan lintas program di Pelabuhan/bandara
b) Peningkatan komunikasi dan advokasi terhadap dinamika peraturan perjalanan pada masa pandemi Covid-19 yang begitu cepat.
c) Meningkatkan upaya pemberantasan vektor dan binatang penular penyakit.
d) Mengadakan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja serta komitemn yang

kuat diantara segenap stakeholder, lintas sector/program dalam cegah tangkal penyakit yang menyebabkan PHEIC.

e) Meningkatkan cakupan sarana lingkungan yang memenuhi syarat melalui peran serta aktif pemilik sarana

7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Resiko di Pintu Masuk Negara tahun 2022 tercapai 124% dengan realisasi anggaran sebesar 100.%%. Capaian kinerja lebih besar dari persentase realisasi anggaran sehingga sudah efisien dengan nilai efisiensi sebesar 57,61%.

Dalam menganalisis penggunaan sumber daya kita bisa menggunakan prinsip 5M unsur manajemen, sehingga pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sumber daya anggaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.. Pengertian 5M meliputi *Man, Money, Materials, Machines, and Methods* (Manusia, Uang, Material, Mesin dan Metode). *Man* merujuk pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh instansi/organisasi. *Money* atau uang dalam hal ini merujuk pada anggaran dalam pembiayaan kegiatan. Material mengacu pada sarana dan prasarana yang yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan tupoksi KKP di lapangan. *Machine* atau mesin dalam hal ini adalah beberapa fasilitas ataupun aplikasi yang dapat mendukung dan mempermudah kegiatan suatu organisasi dalam melayani pengguna jasa seperti aplikasi yang bersifat elektronik yang sebelumnya manual ataupun alat-alat yang bisa digunakan secara digital yang menciptakan efesiensi kerja baik dari segi waktu ataupun tenaga. Sedangkan, metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya proses pekerjaan dan layanan yang dalam hal ini merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat dalam suatu organisasi.

Pada unsur *Man* dalam efisiensi penggunaan SDM yaitu penggunaan SDM yang relatif efisien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan lain yang juga membutuhkan SDM yang handal. Jadi, kebutuhan akan tenaga yang profesional sangat penting untuk efisiensi penggunaan SDM. Penempatan SDM dalam hal ini pegawai KKP Kelas II Panjang harus sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan jabatan fungsional untuk pelayanan dan peningkatan performa kerja yang baik. Disamping itu, integrasi dan kolaborasi dalam penempatan SDM dan menangani serta menjalankan tupoksi

merupakan solusi untuk efisiensi SDM ini. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja indikator Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dibutuhkan beberapa kompetensi baik dari segi bidang pendidikan formal dan pendidikan latihan. Beberapa petugas yang melayani kegiatan kekarantinaan sudah mengikuti diklat kekarantinaan. Namun, dilapangan mereka tidak terbatas untuk kegiatan kekarantinaan, tetapi juga kegiatan lain yang berhubungan dengan tupoksi KKP secara keseluruhan. Seperti tugas di wilayah kerja untuk efisiensi SDM. Seorang pegawai tidak hanya terikat dengan tupoksi seksinya dalam melakukan pelayanan di lapangan, tetapi juga bisa melaksanakan tugas lainnya yang masih sesuai dengan bidang keilmuan ataupun kompetensinya.

Pada unsur *Money* dalam efisiensi penggunaan keuangan merupakan penggunaan sumber daya pembiayaan yang sangat efisien melalui prioritasi penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran pada indikator. Prioritas anggaran diarahkan untuk biaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan di KKP Kelas II Panjang dalam melayani pengguna jasa. Kegiatan prioritas ini ditujukan untuk mencapai target kesehatan pembangunan nasional. Hal ini merupakan strategi untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Perjalanan dinas harus dioptimalkan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kompetensi, koordinasi, dan peningkatan pengalaman dengan melakukan konsultasi teknis, diklat, pengayaan keterampilan dibidang masing-masing pegawai baik ke KKP kelas II, ke satker pusat maupun ke KKP sejenis serta ke badan akademis untuk pengayaan keterampilan dan kompetensi.

Pada unsur Material dalam penggunaan efisiensi sarana dan prasaran dalam menjalan tupoksi dilapangan mengggunakan alat-alat untuk mendukung kinerja yang baik. Pada pandemi Covid-19 menggunakan seluruh sarana yang ada untuk mengefektifkan dan mengefisienkan tugas skrining dilapangan dalam rangka pengendalian dan pencegahan Covid-19 di pintu masuk wilayah.

Unsur mesin dalam penggunaan sumber daya menggunakan alat-alat yang sudah elektronik atapun digital akan mengefisienken pekerjaan dilapangan. Beberapa contoh kegiatan di indikator ini seperti formulir skrining pasien yang mau suntik meningitis yang tadinya manual yang harus dicetak sekarang langsung mendaftar secara *online* dan dilakukan skrining, penggunaan e-HAC yang tadinya manual menggunakan kertas. Sekarang sudah menggunakan elektronik. Pelaporan dan penerbitan dokumen kesehatan yang tadinya manual, sekarang bisa dilakukan secara digital. Sehingga, menyebabkan kemudahan pelayanan, efisien secara waktu, tenaga dan anggaran juga

tentunya.

Pada unsur metode dalam hal ini SOP yang tedapat pada KKP Kelas II Panjang dalam kegiatan kekarantinaan. Penerapan SOP yang baik akan mengefisienkan pelayanan. Performa kerja akan baik dan sesuai dengan tuntunan aturan pelaksanaan.

Hasil pencapaian indikator didukung baik sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang yang meliputi tenaga Epidemiolog, Sanitarian, Entomolog, Dokter dan Perawat, maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun Anggaran 2022. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan.

8) Kendala/masalah yang dihadapi

Adapun kendala/masalah yang sering dihadapi untuk pencapaian indikator ini sebagai berikut :

a) Mulai melemahnya protokol kesehatan, seperti kepatuhan untuk memakai masker bagi penumpang dan pengunjung di ruang publik/fasilitas umum di Bandara Radin Inten II Branti dan Pelabuhan Bakauheni.
b) Sering terjadinya pergantian *tenant-tenant* TPM di bandara karena masih adanya situasi pandemi Covid-19, sehingga menyulitkan dalam hal pembinaan terhadap pengelola TPM tersebut.
c) Rekomendasi tindak lanjut sesuai temuan dilapangan tidak langsung direspon oleh pihak pengelola pelabuhan/bandara.
d) Terbatasnya biaya untuk pemeriksaan sampel terhadap lingkungan, khususnya air bersih yang langsung dikonsumsi di pelabuhan. Adanya keterbatasan dana operasional pada masa Covid-19.
e) Sulitnya memisahkan antara batas perimeter dan buffer area, sehingga menyulitkan untuk melakukan kegiatan survey vektor dan investigasi penyakit yang ditularkan vektor.

9) Pemecahan masalah

Pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap penyebaran subvarian-subvarian baru Covid-19 dengan melakukan pencatatan terhadap penumpang yang datang dari luar negeri termasuk jemaah umroh yang hasil notifikasinya disebarkan

melalui wa grup surveilans Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota;

b) Meningkatkan intensitas pembinaan dan inspeksi TPM baik dibandara ataupun di pelabuhan;

c) Peningkatan jejaring kerja dan komunikasi melalui wadah pertemuan koordinasi rutin guna membahas permasalahan dan solusi dalam bidang sanitasi di pelabuhan/bandara dan penyediaan dana pemeriksaan sampel yang cukup;

d) Melakukan pertemuan Lintas Program Lintas Sektor dan penyampaian KIE kepada sasaran. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan diseminasi informasi sehingga diperoleh *feedbac*k dari LPLS terkait;

e) Untuk mengatasi masalah anggaran operasional lapangan kegiatan Covid-19 dilakukan Revisi DIPA tahun 2022;

10) Realisasi anggaran indikator

Kegiatan atau program yang menunjang dalam indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 74.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp 74.070.000,- atau dengan persentase 100%.



Gambar 4 Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara

4. INDIKATOR KEEMPAT

NILAI KINERJA ANGGARAN

1) **Pengertian :** Nilai kinerja anggaran merupakan *performance budgeting* penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran oleh satuan kerja difasilitasi dengan Aplikasi SMART DJA. Variabel yang diukur yaitu capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

2) **Definisi Operasional** : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja KKP dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

3) **Rumus/Cara Perhitungan** : Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometric. Perhitungannya sebagi berikut :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = \frac{\text{Realisasi volume kegiatan}}{\text{target volume kegiatan}} \times \frac{\text{realisasi indikator kegiatan}}{\text{target indikator kegiatan.}}$$

4) **Capaian Indikator**

Capaian indikator kinerja nilai kinerja anggaran tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 103% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18 Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022

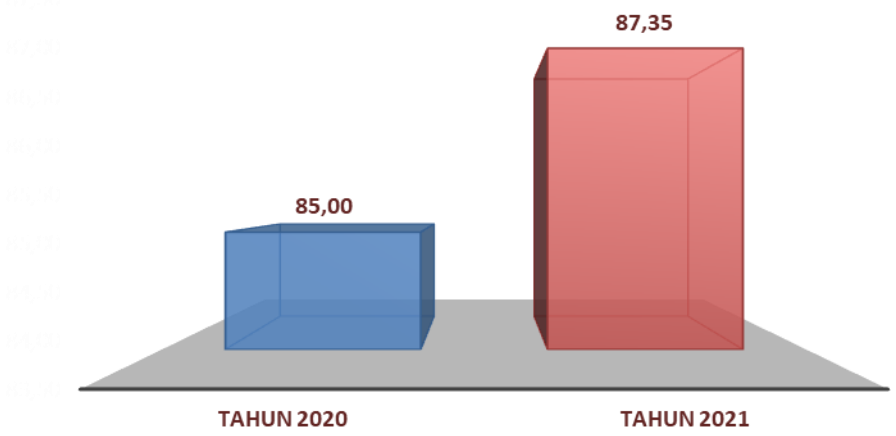
Uraian	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Tahun Sebelumnya	2020	80	86,01	108%
	2021	83	89,55	108%
Tahun ini	**2022**	**85**	**87,35**	**103%**
Target Jangka Menengah	2022	-	-	-
Target Nasional	2022	-	-	-
KKP Sejenis	2022	**85**	**87,33**	**103%**

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020 s. d 2022

a) Realisasi Tahun Ini

Target nilai kinerja anggaran tahun 2022 sebesar 85 dengan capaian 87,35, sehingga nilai kinerja sebesar 103% yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 33 Target dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022



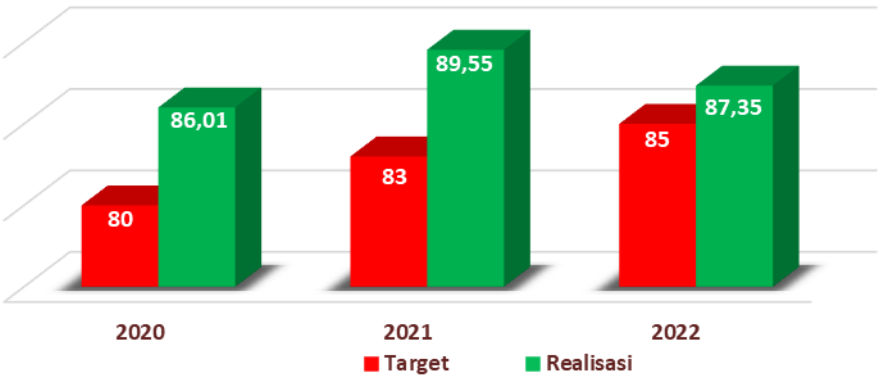
Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Nilai Kinerja Anggaran 85 dengan realisasi 87,35. Nilai ini berasal dari *Dasbord* Aplikasi Smart DJA.

b) Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 s. 2022 terjadi peningkatan yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 34 Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian nilai kinerja anggaran mengalami

mengalami turun naik dari tahun 2020 s.d 2022. Capaian tahun 2020 86,101, tahun 2021 89,55 dan tahun 2022 87,35.

c) Perbandingan Dengan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2021-2024

Indikator kinerja nilai kinerja anggaran tahun 2022 belum memenuhi target lima tahunan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 87,35 dimana target lima tahunan RAK 2020-2024 KKP Kelas II Panjang 92.

d) Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024, target Nilai Kinerja Anggaran Kemenkes pada tahun 2022 yaitu 90. Sehingga Nilai Kinerja Anggaran KKP Kelas II Panjang pada tahun 2022 lebih rendah dari target Rencana Strategis yaitu 87,35.

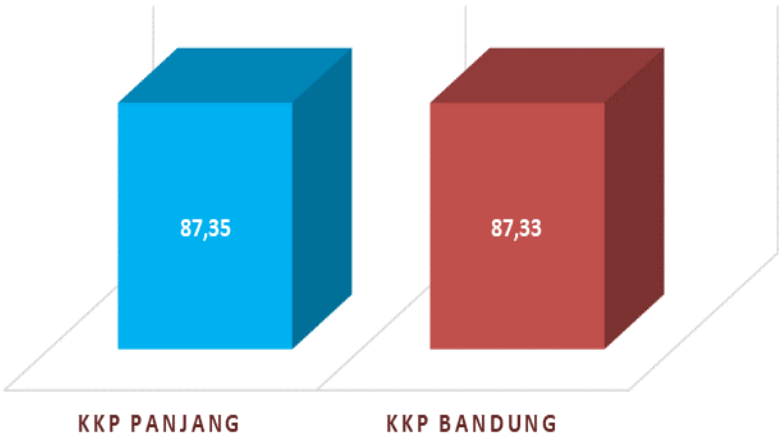
e) Perbandingan Dengan Target Nasional

Target nasional yang merupakan target Nilai Kinerja Anggaran Kemenkes tahun 2022 sebesar 90 yang tertuang dalam Renstra Kemenkes 2020-2024. Maka, nilai kinerja anggaran KKP Kelas II Panjang lebih rendah target nasional yaitu 87,35.

f) Perbandingan Dengan Satker Sejenis

Perbandingan dengan satker sejenis ini dilakukan pada KKP Kelas II Bandung yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 35 Perbandingan Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan Satker Sejenis Tahun 2022



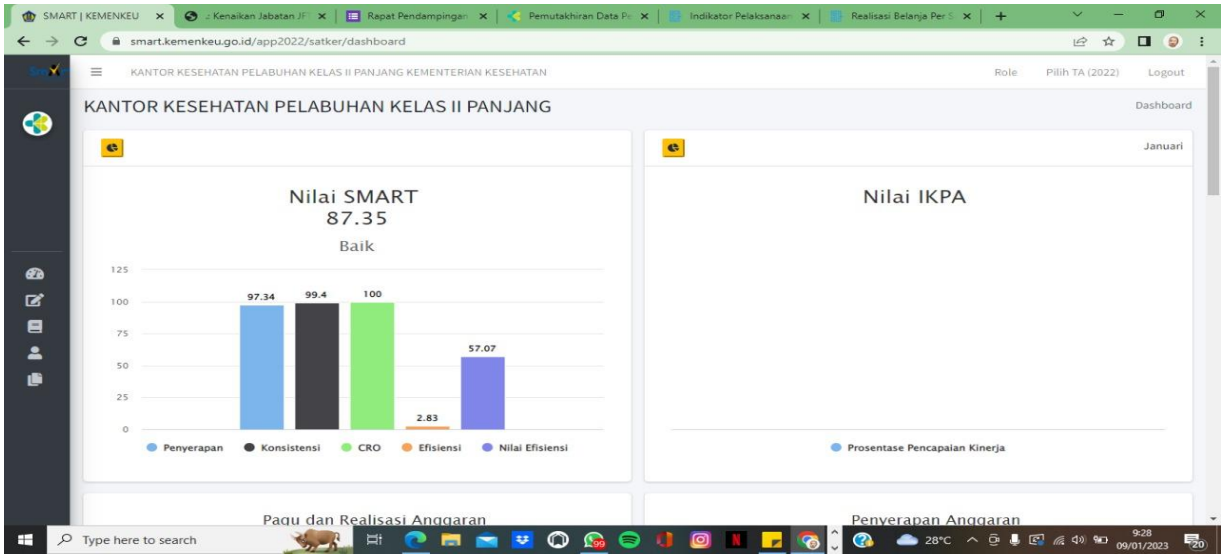
Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian indikator nilai kinerja anggaran KKP Panjang sama dengan dari KKP Bandung. Realisasi KKP Panjang sebesar 87,35, sedangkan KKP Bandung sebesar 87,33.

5) Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Capaian

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja dilakukan dari beberapa kegiatan sepanjang tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Komponen yang menunjang dalam pencapaian nilai indikator kinerja anggaran ini berdasarkan E-Monev DJA Kementerian Keuangan dalam Aplikasi Smart DJA yang dapat dilihat di bawah ini :



Gambar 2 Hasil Screenshoot Dashboard Aplikasi Smart E-Monev DJA Kemenkeu Tahun 2022

Dari gambar 4 diatas diketahui bahwa nilai kinerja anggaran berdasarkan nilai Smart kinerja anggaran Satker KKP Kelas II Panjang sebesar 87,35 dengan rincian komponen seperti Realisasi Anggaran sebesar 97,34, Konsistensi 99,4, CRO 100, RPD Awal sebesar 97,54, Capain Rincian Output 100, Efisiensi 1,83 dan Nilai Efisiensi sebesar 57,07%.

Keberhasilan pencapaian target indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2022 disebabkan oleh :

a) Seluruh Rinican Output (RO) dapat terealisasi
b) Penyerapan anggaran bulanan mengacu kepada RPD bulanan pada halaman 3 DIPA petikan revisi sehingga diperoleh nilai parameter konsistensi cukup tinggi
c) Revisi atas halaman 3 DIPA setiap dilakukan revisi anggaran

6) Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator nilai kinerja anggaran telah melampuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,35 (103%). Keberhasilan ini didukung oleh kinerja segenap unsur sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan pengalaman serta kompetensi yang baik, sumber daya anggaran dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang optimal, profesinal dengan mengedepankan prinsip anggaran yang efektif dan efisien. Beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran serta monitoring capaian *volume* output setiap bulan
b) Mengisi aplikasi e-monev SMART DJA setiap bulan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan
c) Monitoring dan evaluasi rutin pengisian dan capaian e-monev SMART DJA setiap triwulan dengan Unit Utama.
d) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran berdasarkan petunjuk perencanaan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

7) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator nilai kinerja anggaran tahun 2022 tercapai 103% dengan realisasi anggaran sebesar 99,58.%%. Capaian kinerja lebih besar dari persentase realisasi anggaran sehingga sudah efisien dengan nilai efisiensi sebesar 57,08%.

Dalam menganalisis penggunaan sumber daya kita bisa menggunakan prinsip 5M unsur manajemen, sehingga pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sumber daya anggaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Pengertian 5M meliputi *Man, Money, Materials, Machines, and Methods* (Manusia, Uang, Material, Mesin dan Metode). *Man* merujuk pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh instansi/organisasi. *Money* atau uang dalam hal ini mengacu pada anggaran dalam pembiayaan kegiatan. Material termasuk pada sarana dan prasarana yang yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan tupoksi KKP di lapangan. *Machine* atau mesin dalam hal ini adalah beberapa fasilitas ataupun aplikasi yang dapat mendukung dan mempermudah kegiatan suatu organisasi dalam melayani pengguna jasa seperti aplikasi yang bersifat elektronik yang sebelumnya manual ataupun alat-alat yang bisa digunakan secara digital yang menciptakan efesiensi kerja baik dari segi waktu ataupun tenaga. Sedangkan, metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya proses pekerjaan

dan layanan yang dalam hal ini merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat dalam suatu organisasi.

Pada unsur *Man* dalam efisiensi penggunaan SDM yaitu penggunaan SDM yang relatif efisien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan lain yang juga membutuhkan SDM yang handal. Jadi, kebutuhan akan tenaga yang profesional sangat penting untuk efisiensi penggunaan SDM. Penempatan SDM dalam hal ini pegawai KKP Kelas II Panjang harus sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan jabatan fungsional untuk pelayanan dan peningkatan performa kerja yang baik. Disamping itu, integrasi dan kolaborasi dalam penempatan SDM dan menangani serta menjalankan tupoksi merupakan solusi untuk efisiensi SDM ini. Untuk mencapai indikator nilai kinerja anggaran dibutuhkan beberapa kompetensi baik dari segi bidang pendidikan formal dan pendidikan latihan. Di KKP pada umumnya, khususnya KKP Kelas II Panjang hampir semua pegawai dengan latar belakang kesehatan. Dengan prinsip efisiensi, maka kekurangan tenaga dalam pengelolaan keuangan tetap dilaksanakan oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan kesehatan. Disamping melaksanakan tugas rutin tupoksi dilapangan. Terdapat beberapa SDM sudah mengikuti pelatihan ataupun diklat yang berkaitan dengan keuangan, anggaran ataupun perbendaharaan. Sehinga, mereka bisa diperbantukan untuk mengerjakan kegiatan ketatausahaan, keuangan ataupun anggaran. Hal ini tidak mengurangi keterampilan dan kompetensi pegawai tersebut walaupun tidak memiliki akademik dibidang ekonomi ataupun keuangan. Sehingga, capaian indikator ini tetap melebihi target.

Pada unsur *Money* dalam efisiensi penggunaan keuangan merupakan penggunaan sumber daya pembiayaan yang sangat efisien melalui prioritasi penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran pada indikator. Prioritas anggaran diarahkan untuk biaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan di KKP Kelas II Panjang dalam melayani pengguna jasa. Kegiatan prioritas ini ditujukan untuk mencapai target kesehatan pembangunan nasional. Hal ini merupakan strategi untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Perjalanan dinas harus dioptimalkan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kompetensi, koordinasi, dan peningkatan pengalaman dengan melakukan konsultasi teknis, diklat, pengayaan keterampilan dibidang masing-masing pegawai baik ke KKP kelas II, ke satker pusat maupun ke KKP sejenis serta ke badan akademis untuk pengayaan keterampilan

dan kompetensi.

Pada unsur material dalam penggunaan efisiensi sarana dan prasarana dalam mencapai indikator ini, semua pelaporan yang berkaitan dengan anggaran sudah berbasis aplikasi atau elektronik. Sehingga laporan cepat, tepat dan akuntabel.

Unsur mesin dalam penggunaan sumber daya menggunakan alat-alat yang sudah elektronik atapun digital akan mengefesienken pekerjaan dilapangan. Penggunaan aplikasi online akan memudahkan dalam hal pelaporan, akurat, cepat dan tepat.

Pada unsur metode yang dimaksud adalah SOP yang tedapat pada KKP Kelas II Panjang dalam kegiatan mendukung pelaksanaan kinerja anggaran. Penerapan SOP yang baik akan mengefisienkan pelayanan dan pelaporan.. Performa kerja akan baik dan sesuai dengan tuntunan aturan pelaksanaan jika SOP diterapkan sebagaimana mestinya.

Hasil pencapaian indikator didukung oleh sumber daya manusia yang meliputi tenaga Dokter, Perawat, Analis Laboraturium, Epidemiolog, serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022. Sumberdaya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan.

8) Kendala/masalah yang dihadapi

a) Rentan terdapat anomali data jika terjadi kesalahan perhitungan progress RVK (Realisasi Volume Kegiatan);
b) Data anomali berubah di apliaksi Smart DJA, padahal sebelumnya penginputan sudah dsesuaikan di Aplikasi SAKTI dan proses integrasi dari Aplikasi SAKTI ke Smart DJA tidak real time, membutuhkan waktu yang lama;
c) Terdapat indikator yang hanya dapat dihitung dalam periode satu tahun dengan target satu layanan, sehingga capaian indikator tidak dapat menggambarkan secara bulanan.

9) Pemecahan masalah

a) Melakukan monitoring progress dan capaian RVK rutin setiap bulan, jika ada data anomali, langsung diperbaiki;
b) Mengecek secara berkala data hasil entri di Aplikasi Sakti dan Smart DJA apakah sudah yang di aplikasi SAKTI dan yang muncul di Smart DJA.
c) Mengisi progress capaian keluaran setiap bulannya, sehingga walaupun volume

layanan belum tercapai namun tetap ada keterangan progress kegiatan.

10) Realisasi Anggaran Indikator

Kegiatan atau program yang menunjang dalam indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 143.590.000,- dengan realisasi sebesar Rp 142.989.917,- atau sebesar 99,58%. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan.

5. INDIKATOR KELIMA

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

1) Pengertian : IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembagan yang terdiri dari 3 dan 8 indikator kinerja. Tiga aspek tersebut yakni kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Sedangkan, 8 indikator kinerja adalah DIPA, deviasi halaman III DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, penyerahan anggaran, dan capaian *output*.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

2) Definisi Operasional : Indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

3) **Rumus/Cara Perhitungan** : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai kinerja dan bobot dari seluruh indikator kinerja berdasarkan data transaksi yang dilakukan pada tingkat Satker.

4) **Capaian Indikator**

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 100% dengan persentase 103%.

Tabel 19 Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

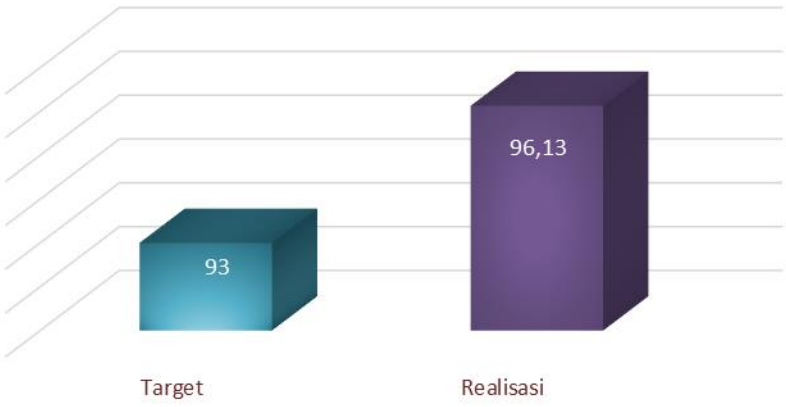
Uraian	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Tahun sebelumnya	2020	90	87,78	98%
	2021	93	95,96	103%
Tahun ini	**2022**	**93**	**96,13**	**103%**
Target Jangka Menengah	2022	-	-	-
Target Nasional	2022	-	-	-
KKP Sejenis	2022	93	90,76	98%%

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020 s. d 2022

a) Realisasi Tahun Ini

Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu 93 dengan capaian 96,12, sehingga capaian kinerja sebesar 103% yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 36 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022



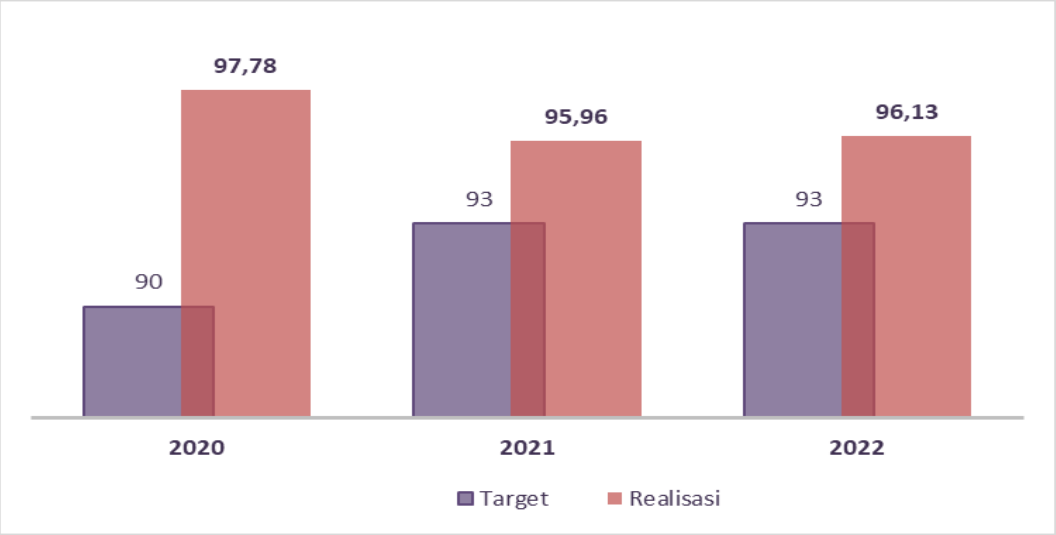
Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian nilai kinerja anggaran melebihi target (93) yakni 96,12.

b) Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 s. 2022 terjadi peningkatan yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 37 Capaian Indikator Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian nilai kinerja anggaran mengalami naik turun dari tahun 2020 s.d 2022. Capaian nilai IKPA setiap tahunnya dari 2020 s.d 2022 hampir sama. Tahun 2020 capaian IKPA (97,78), tahun 2021 (96,96) dan nilai tahun 2022 (96,13).

c) Perbandingan dengan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2021-2024

Jika dibandingkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan target RAK tahun 2021-2024, maka capaian 96,13 belum melebihi target tahun 2024 yaitu 98.

d) Perbandingan Dengan Jangka Menengah

Pada Renstra Kemenkes dan RAP Ditjen P2P Tahun 2020-2024 tidak terdapat indikator nilai IKPA, namun indikator ini mendukung pencapaian target indikator persentase jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai IKPA ≥ 80

sebesar 80% pada tahun 2022 dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024.

e) Perbandingan Dengan Target Nasional

Pencapaian indikator ini tidak dapat diperbandingkan dengan target nasional karena tidak terdapat dalam Renstra Kemenkes dan RAP Ditjen P2P. Capaian IKPA KKP Kelas II Panjang mendukung target indikator persentase jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai IKPA ≥ 80 sebesar 80% pada tahun 2022 yang tertuang dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024.

g) Perbandingan Dengan Satker Sejenis

Perbandingan dengan satker sejenis ini dilakukan pada KKP Kelas II Bandung yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 38 Perbandingan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan Satker Sejenis Tahun 2022

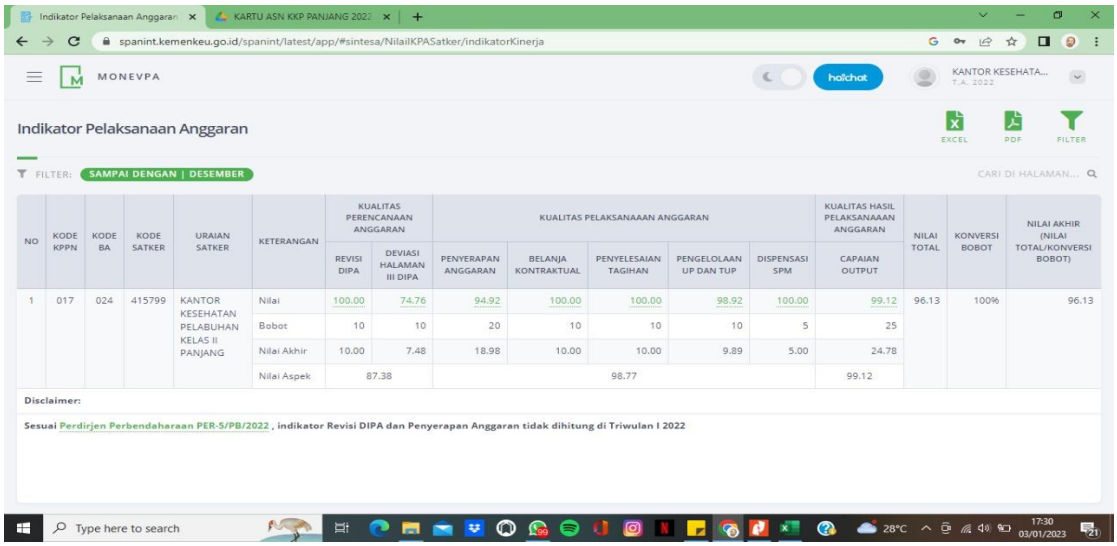


Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berdasarkan Capaian Rincian Output Aplikasi SAKTI KPPN tahun 2022, nilai IKPA KKP Panjang lebih tinggi dari KKP Bandung. Realisasi KKP Panjang sebesar 96,13, sedangkan KKP Bandung sebesar 90,76.

5) Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Capaian

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja ini dilakukan dari beberapa kegiatan sepanjang tahun 2022. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ini dilihat dari hasil hasil input di aplikasi OM-SPAN SAKTI yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3 Hasil *Screenshoot* Capaian Rincian Output Aplikasi SAKTI KPPN Tahun 2022

Dari gambar diatas dapat diketahui kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah pengelolaan laporan keuangan yang tepat waktu yang didukukung oleh beberapa komponen seperti :

1) Revisi DIPA ; 100
2) Penyerapan anggaran ; 94,92
3) Dispensasi SPM ;100
4) Belanja kontraktual ;100
5) Penyelesaian tagihan ; 100
6) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persedian (UP dan TUP ; 98,92
7) Kesalahan SPM 80
8) Capaian OutputKonfirmasi Capaian Output ; 99,12

6) Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah kinerja, dedikasi dan kompetensi dari segenap unsur pegawai KKP Panjang dalam menjalankan seluruh program kegiatan secara baik dan tepat waktu serta pengelola keuangan yang berdedikasi serta kompeten dalam mengelola anggaran yang dibebankan pada KKP Kelas II Panjang. Berusaha menerapkan dan mematuhi 8 indikator yang digunakan dalam penilaian IKPA sesuai dengan Perdirjen Kemenkeu No. 4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.

Pencapaian diatas tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan dari dukungan pihak manajerial dan seluruh staf KKP Kelas II Panjang dalam melaksanakan program kegiatan dan membuat laporan keuangan yang akurat, akuntabel dan tepat waktu dengan melakukan beberapa kegiatan seperti :

- Penyusunan Rencana Penarikan Dana & dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan anggaran
- Melakukan revisi Halaman III DIPA pada aplikasi SAKTI
- Mengefektifkan fungsi verifikator SPM untuk meningkatkan ketelitian dalam pembuatan SPM, agar tidak terjadi kesalahan dan retur SP2D
- Melakukan koordinasi dengan KPPN setempat
- Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dengan mengikuti webinar, sosialisasi baik yang diselenggarakan oleh Ditjen P2P

7) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022 tercapai 103%. Apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96,97%, maka terdapat rasio efisiensi anggaran sebesar 57,16%.

Dalam menganalisis penggunaan sumber daya kita bisa menggunakan prinsip 5M unsur manajemen, sehingga pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sumber daya anggaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Pengertian 5M meliputi *Man, Money, Materials, Machines, and Methods* (Manusia, Uang, Material, Mesin dan Metode). *Man* merujuk pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh instansi/organisasi. *Money* atau uang dalam hal ini mengacu pada anggaran dalam pembiayaan kegiatan. Material termasuk pada sarana dan prasarana yang yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan tupoksi KKP di lapangan. *Machine* atau mesin dalam hal ini adalah beberapa fasilitas ataupun aplikasi yang dapat mendukung dan mempermudah kegiatan suatu organisasi dalam melayani pengguna jasa seperti aplikasi yang bersifat elektronik yang sebelumnya manual ataupun alat-alat yang bisa digunakan secara digital yang menciptakan efesiensi kerja baik dari segi waktu ataupun tenaga. Sedangkan, metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya proses pekerjaan dan layanan yang dalam hal ini merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP)

yang terdapat dalam suatu organisasi.

Pada unsur *Man* dalam efisiensi penggunaan SDM yaitu penggunaan SDM yang relatif efisien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan lain yang juga membutuhkan SDM yang handal. Jadi, kebutuhan akan tenaga yang profesional sangat penting untuk efisiensi penggunaan SDM. Penempatan SDM dalam hal ini pegawai KKP Kelas II Panjang harus sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan jabatan fungsional untuk pelayanan dan peningkatan performa kerja yang baik. Disamping itu, integrasi dan kolaborasi dalam penempatan SDM untuk menjalankan tupoksi merupakan salah satu solusi untuk efisiensi SDM. Untuk mencapai indikator kinerja persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan dibutuhkan beberapa kompetensi baik dari segi bidang pendidikan formal dan pendidikan latihan. Di KKP pada umumnya, khususnya KKP Kelas II Panjang hampir semua pegawai dengan latar belakang kesehatan. Dengan prinsip efisiensi, maka kekurangan tenaga dalam pengelolaan keuangan tetap dilaksanakan oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan kesehatan. Disamping melaksanakan tugas rutin tupoksi dilapangan. Terdapat beberapa SDM sudah mengikuti pelatihan ataupun diklat yang berkaitan dengan keuangan, anggaran ataupun perbendaharaan. Sehinga, mereka bisa diperbantukan untuk mengerjakan kegiatan ketatausahaan, keuangan ataupun anggaran. Hal ini tidak mengurangi keterampilan dan kompetensi pegawai tersebut walaupun tidak mempunyai akdemin dibidang ekonomi ataupun keuangan. Sehingga, capaian indikator ini tetap melebihi target.

Pada unsur *Money* dalam efisiensi penggunaan keuangan merupakan penggunaan sumber daya pembiayaan yang sangat efisien melalui prioritas penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran pada indikator ini sebesar 65,35%. Prioritas anggaran diarahkan untuk biaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan kegiatan di KKP Kelas II Panjang dalam melayani pengguna jasa. Kegiatan prioritas ini ditujukan untuk mencapai target kesehatan pembangunan nasional. Hal ini merupakan strategi untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Perjalanan dinas harus dioptimalkan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kompetensi, koordinasi, dan peningkatan pengalaman dengan melakukan konsultasi teknis, diklat, pengayaan keterampilan dibidang masing-masing pegawai baik ke KKP kelas II, ke satker pusat maupun ke KKP sejenis serta ke badan akademis untuk pengayaan keterampilan dan kompetensi.

Pada unsur Material dalam penggunaan efisiensi sarana dan prasarana dalam mempertahankan kepatuhan kinerja pelaporan keuangan. Jaringan internet yang kuat sangat mendukung dalam *mengupload* dokumen keuangan dan rekonsiliasi secara tepat waktu tanpa tertunda dan penyelesaian kontrak. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 semua kegiatan dan pertemuan dilakukan secara virtual. Jadi, penggunaan teknologi digital sarana jaringan internet yang stabil adalah salah satu pendukung utama dalam kelancaran pekerjaan.

Unsur mesin dalam penggunaan sumber daya menggunakan alat-alat yang sudah elektronik atapun digital akan mengefisienken pekerjaan dilapangan. Hampir semua rapat dan pertemuan dilakukan secara virtual. Itulah salah satu cara mengefesienkan waktu dan tenaga. Kalau pertemuan secara langsung mungkin akan terbatas tenaga bisa mengikutinya. Tetapi jika virtual tidak terbatas pada orang. Jadi akan efektif juga secara transportasi.

Pada unsur metode dalah hal ini SOP yang tedapat pada KKP Kelas II Panjang dalam kegiatan kinerja kepatuhan penyampaian laporan keuangan. Penerapan SOP yang baik akan mengefisienkan pelayanan dan pekerjaan. Performa kerja akan baik dan sesuai dengan tuntunan aturan pelaksanaan.

Hasil pencapaian indikator didukung baik sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang yang meliputi tenaga Epidemiolog, Sanitarian, Entomolog, Dokter dan Perawat, maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun Anggaran 2022. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan.

8) Kendala/Masalah Yang Dihadapi

Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapain indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

9) Pemecahan Masalah

Karena tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian kinerja ini, sehingga hanya perlu mempertahankan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dengan kategori baik dengan rentang nilai lebih dari 80%-90% (PMK No. 22/PMK.02/2022). Selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja agar tidak hanya bertahan, tetapi juga meningkat sesuai perkembangan situasi dan kondisi terkini.

10) Realisasi Anggaran Indikator

Kegiatan atau program yang menunjang dalam indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 12.718.498.000,- dengan realisasi sebesar Rp 12.333.372.241,- atau dapat dipersentasikan sebesar 96,97%. Selisih penyerapan ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang bersumber PNBP yang tidak bisa dilaksanakan karena target PNBP tahun 2022 tidak tercapai disebabkan pandemi Covid-19.

6. INDIKATOR KEENAM

KINERJA IMPLEMENTASI WBK SATKER

1) **Pengertian :** Kinerja implementasi WBK Satker merupakan pembangunan Zona Integritas (ZI) di satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

   Outcome dalam indikator ini yaitu meningkatnya kualitas satker dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik dan pelaksanaan tugas dan fungsi.

2) **Definisi Operasional** : Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assesment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.

3) **Rumus/ Cara Perhitungan :** Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.

4) **Capaian Indikator Kinerja**

Target indikator kinerja implementasi WBK Satker sebesar 78. Capaian indikator ini tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan dengan hasil 80,47, sehingga capaian kinerja sebesar 103%.

Tabel 20 Capaian Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2022

Uraian	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Tahun Sebelumnya	2020	70	84,9	121%
	2021	75	84,77	113%
Tahun ini	2022	78	80,47	103%
Target Jangka Menengah	2022	-	-	-
KKP Sejenis	2022	82	82	100%

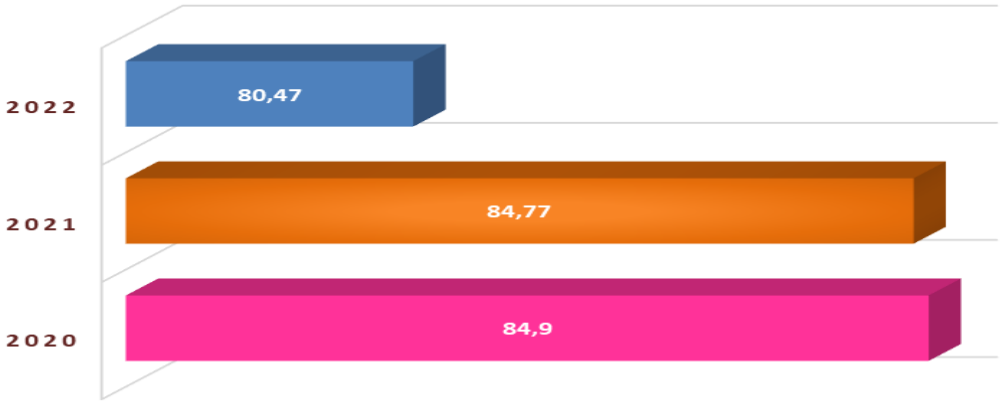
Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020 s. d 2022

a) Realisasi Kinerja Tahun Ini

Untuk tahun 2022 target indikator kinerja implementasi WBK Satker ini sebesar 78 dengan realisasi sebesar 80,47 dengan capaian kinerja 103%. Ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Hasil pencapaian ini adalah hasil penilaian WBK dari Tim Penilai Kementerian Kesehatan Tahun 2022. Pada tahun 2021, KKP Kelas II Panjang ditetapkan sebagai unit kerja yang telah memenuhi syarat menuju WBK berdasarkan SK Kementerian Kesehatan No. HK. 01.07/MENKES/6590/2022 tentang Penetapan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan Yang Telah Memenuhi Persyaratan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2021 tanggal 06 November 2021.

b) Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Grafik 39 Perbandingan Capaian Kinerja Implementasi WBK Satker Tahun 2020 s.d 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tahun 2022, nilai kinerja implementasi WBK KKP Kelas II Panjang 80,47. Ini adalah hasil *Self-Assesment* Pembangunan Zona Intergritas oleh Tim WBK KKP Kelas II Panjang. Tahun 2021 KKP Kelas II Panjang ditetapkan menjadi salah satu unit kerja yang telah memenuhi persyaratan menuju WBK tahun 2021.

c) Perbandingan dengan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2021-2024

Jika dibandingkan dengan target RAK tahun 2021-2024, maka pencapaian indikator kinerja implementasi WBK tahun 2022 sebesar 80,47 sudah melebihi target, bahkan sudah melebihi target RAK tahun 2024 sebesar 79.

d) Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah

Dalam Rencana Strategis Kemenkes dan RAP Ditjen P2P Tahun 2020-2024 tidak terdapat indikator nilai kinerja implementasi WBK Satker, namun indikator ini mendukung pencapaian target indikator nilai reformasi birokrasi Ditjen P2P tahun 2022 yaitu 35,3.

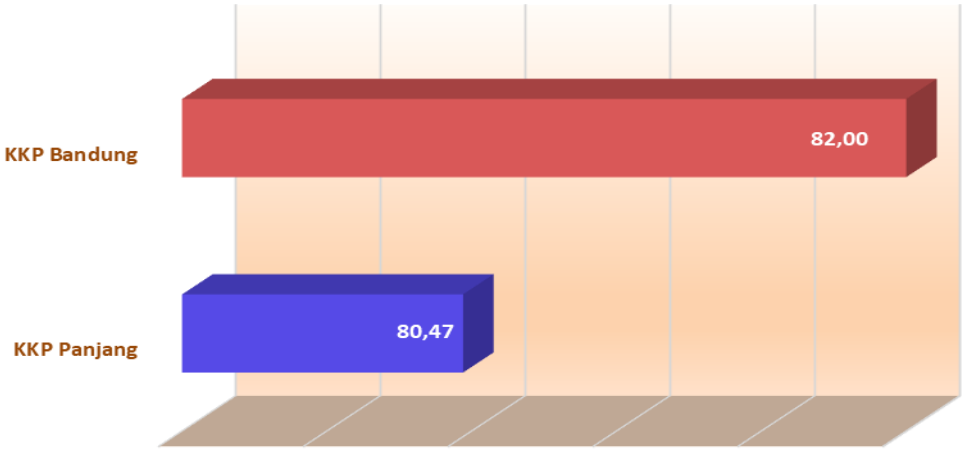
e) Perbandingan Dengan Target Nasional

Pencapaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan target nasional dikarenakan tidak tertuang dalam target nasional.

f) Perbandingan Dengan Satker Sejenis

Perbandingan dengan satker sejenis yaitu dengan KKP Kelas II Bandung yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Implementasi WBK dengan Satker Sejenis Tahun 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas dilihat bahwa capaian KKP Panjang dalam hal indikator kinerja implementasi WBK 80,47. Sedangkan KKP Bandung mencapai 82.

5) Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Capaian

Hal yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja dilakukan dengan mewujudkan KKP Kelas II Panjang menuju Satker WBK. Dalam hal ini KKP Kelas II Panjang sudah mendapat predikat WBK Kemenkes tahun 2021.

Kegiatan ini berjalan dengan baik atas dukungan dan komitmen dari seluruh manajerial serta staf KKP Kelas II Panjang dalam meningkatkan pelayanan yang baik serta biriokrasi yang bersih. Staf KKP Kelas II Panjang yang tergabung dalam Pokja WBK membuat dan mengumpulkan dokumen pendukung, menyusun Rencana Kerja dan melaksanakannya, serta melakukan monev terpadu, melakukan internalisasi rutin terkait program-program WBK, membuat inovasi dan peningkatan pelayanan publik, meningkatkan penerapan SAKIP dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Berkoordinasi dengan Unit Utama sebagai Pembina dalam rangka bimbingan dan arahan untuk penilaian WBK baik dari Tim Penilai Kemenkes maupun persiapan penilaian oleh MENPAN-RB. Sebelum dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai Internal Kemenkes, maka dilakukan tahapan kegiatan seperti self-*assestment* terhadap

dokumen pendukung WBK dan kegiatan yang berkaitan dengan WBK, yang didampingi oleh Bagian Hukormas Ditjen P2P.

6) Analisis Penyebab Keberhasilan

Pencapaian indikator kinerja implementasi WBK satker berjalan dengan baik karena beberapa hal sebagai berikut :

a) Komitemen yang kuat dari pimpinan, manajerial dan seluruh staf KKP Kelas II Panjang.
b) Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, stakeholder dan para pengguna jasa baik di pelabuhan serta bandara terus dilakukan secara intensif, pro aktif dan secara kontiniu adalah cara membangun jejaring kerja
c) Membangun komitmen seluruh anggota organisasi dalam implementasi WBK
d) Menyusun Rencana Kerja & melaksanakan-nya, serta melakukan monev terpadu
e) Melakukan internalisasi rutin terkait program-program WBK
f) Membuat inovasi dan peningkatan pelayanan publik
g) Meningkatkan penerapan SAKIP dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran
h) Berkoordinasi dengan Unit Utama sebagai Pembina
i) Melakukan internalisasi pembangunan zona integritas dan pengendalian gratifikasi.
j) Monitoring dan evaluasi SOP AP.
k) Mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
l) Penguatan pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat
m) Menyelenggarakan pelatihan budaya pelayanan prima bagi seluruh pegawai KKP Kelas II Panjang.
n) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan survey kepuasan pelanggan secara periodik.
o) Meningkatkan kualitas SPIP dengan membentuk Tim penilai Mandiri SPIP.

Pada 6 November 2021 KKP Kelas II Panjang menjadi salah 1 dari 2 KKP yang mendapatkan piagam WBK Menkes dan menjadi salah satu Satker dari 9 Satker yang ditetapkan sebagai unit kerja yang memenuhi persyaratan menuju WBK di lingkungan Kementerian Kesehatan. Tahun 2022, KKP Kelas II Panjang telah diusulkan untuk mendapatkan penilaian dari MENPAN-RB dengan nilai 80,47.

Karena nilai tersebut belum disertai dengan pemenuhan seluruh kriteria minimal dipersyaratkan, maka KKP Kelas II Panjang tidak direkomendasikan oleh TPI untuk diusulkan kepada Kementerian PAN/RB untuk dievaluasi oleh TPN dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK Tingkat Nasional tahun 2022.

7) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator kinerja implementasi WBK tahun 2022 tercapai 103% dengan realisasi anggaran sebesar 99,58.%%. Capaian kinerja lebih besar dari persentase realisasi anggaran sehingga sudah efisien dengan nilai efisiensi sebesar 57,09%.

Dalam menganalisis penggunaan sumber daya kita bisa menggunakan prinsip 5M unsur manajemen, sehingga pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sumber daya anggaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Pengertian 5M meliputi *Man, Money, Materials, Machines, and Methods* (Manusia, Uang, Material, Mesin dan Metode). *Man* merujuk pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh instansi/organisasi. *Money* atau uang dalam hal ini merujuk pada anggaran dalam pembiayaan kegiatan. Material merujuk pada sarana dan prasarana yang yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan tupoksi KKP di lapangan. *Machine* atau mesin dalam hal ini adalah beberapa fasilitas ataupun aplikasi yang dapat mendukung dan mempermudah kegiatan suatu organisasi dalam melayani pengguna jasa seperti aplikasi yang bersifat elektronik yang sebelumnya manual ataupun alat-alat yang bisa digunakan secara digital yang menciptakan efesiensi kerja baik dari segi waktu ataupun tenaga. Sedangkan, metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya proses pekerjaan dan layanan yang dalam hal ini merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat dalam suatu organisasi.

Pada unsur *Man* dalam efisiensi penggunaan SDM yaitu penggunaan SDM yang relatif efisien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Efisiensi anggaran untuk indikator. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan lain yang juga membutuhkan SDM yang handal. Jadi, kebutuhan akan tenaga yang profesional sangat penting untuk efisiensi penggunaan SDM. Penempatan SDM dalam hal ini pegawai KKP Kelas II Panjang harus sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan jabatan fungsional untuk pelayanan dan peningkatan performa kerja yang baik. Disamping itu, integrasi dan kolaborasi dalam penempatan SDM dan menangani serta menjalankan tupoksi merupakan solusi

untuk efisiensi SDM ini. Untuk mencapai realisasi indikator kinerja implementasi WBK satker dibutuhkan komitmen yang baik dan kuat dari unsur pimpinan dan staf. Efisiensi SDM dan tenaga sangat dibutuhkan dalam hal menyiapkan semua dokumen yang mendukung *assestment* WBK disamping kegiatan tupoksi rutin yang pastinya lebih baik lagi dalam pelaksanaan dilapangan.

Pada unsur *Money* dalam efisiensi penggunaan keuangan merupakan penggunaan sumber daya pembiayaan yang sangat efisien melalui prioritasi penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran pada indikator. Prioritas anggaran diarahkan untuk biaya kegiatan yang menuju WBK. Perjalanan dinas harus dioptimalkan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kompetensi, koordinasi dalam hal WBK.

Pada unsur Material dalam penggunaan efisiensi sarana dan prasarana dalam menjalankan tupoksi dilapangan, mengggunakan alat-alat untuk mendukung kinerja yang baik. Jika kegiatan berjalan dengan baik akan mempermudah proses assestment WBK.

Unsur mesin dalam penggunaan sumber daya menggunakan alat-alat yang sudah elektronik atapun digital akan mengefesienken pekerjaan dilapangan. Ada inovasi yang dilakukan untuk mempermudah layanan di lapangan. Pembuatan *web* dan media sosial KKP Panjang juga mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Dalam rangka WBK semua keterbukaan dan pelayanan yang baik, cepat dan transparan perlu memenafaatkan teknologi digital saat ini.

Pada unsur metode dalah hal ini SOP yang tedapat pada KKP Kelas II Panjang dalam kegiatan kekarantinaan, kepegawaian, keuangan atapun perencanaan. Penerapan SOP yang baik akan mengefisienkan pelayanan. Performa kerja akan baik dan sesuai dengan tuntunan aturan pelaksanaan. Hal ini tentunya bukan hanya bagian dari penilaian WBK, tetapi implementasi dari nilai-nilai WBK itu sendiri.

Hasil pencapaian indikator didukung oleh segenap sumber daya manusia pada KKP Kelas II Panjang yang meliputi baik para pimpinan struktural, seluruh staf baik fungsional ataupun umum, staf wilayah kerja ataupun para PPNPN serta dukungan anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022. Sumberdaya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan.

8) Kendala/masalah yang dihadapi

a) Jumlah calon responden yang merespon survei yang dilakukan oleh TPI masih belum memenuhi target sehingga sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk diusulkan menjadi WBK Nasional

9) Pemecahan masalah

a) Membuat *database* calon responden untuk kebutuhan survei WBK pada tahun mendatang.

10) Realisasi anggaran indikator

Kegiatan didukung dengan anggaran sebesar Rp 110.294.000,- dengan realisasi sebesar Rp 109.831.451,- atau dapat dipersentasikan sebesar 99,58%. Selisih dari persentase ini karena adanya optimaliasi kegiatan.



Gambar 5 Dokumentasi Implementasi Kinerja WBK Satker

7. INDIKATOR KETUJUH

PERSENTASE ASN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA

1) Pengertian :

Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan yang perlu ditingkatkan dengan pendidikan pelatihan. Outcome indikator ini yaitu meningkatnya kapasitas ASN KKP Kelas II Panjang untuk mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik.

Jenis peningkatan kompetensi pegawai dapat diperoleh dari:

1) Pendidikan
   - Izin belajar
2) Pelatihan Klasikal yang terdiri dari :
   - Pelatihan teknis
   - Pelatihan sosio kultural
   - Seminar/webinar baik di bidang kesehatan maupun non kesehatan
   - *Workshop*
   - Bimbingan teknis

2) Definisi Operasional : Peraturan LAN nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

3) Rumus / cara perhitungan :

Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya	=	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL / Jumlah seluruh ASN	x 100%

4) Capaian Indikator Kinerja

Target dari indikator kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya sebesar 80% dengan capaian 88%, sehingga capaian kinerja 110% yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 21 Capaian Kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2022

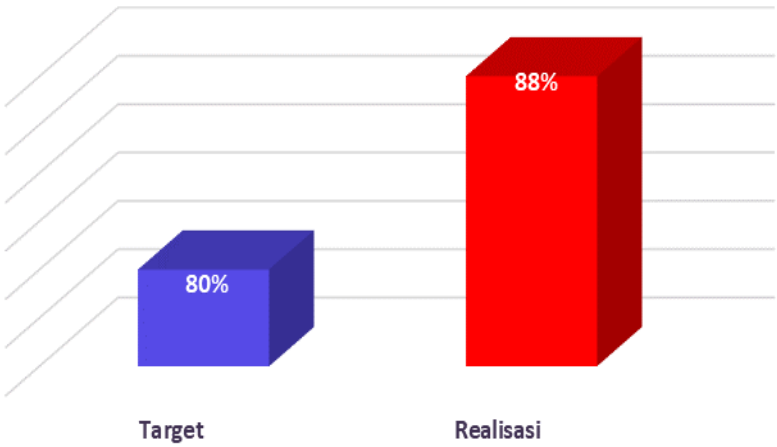
Uraian	Tahun	Target	Realisasi	Persen
Tahun Sebelumnya	2020	45%	47%	104%
	2021	45%	37%	82%
Tahun ini	**2022**	**80%**	**88%**	**110%**
Target Jangka Menengah	2022	-	-	-
Target Nasional	2022	-	-	-
KKP Sejenis	2022	40%	41,25%	103%

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020 s. d 2022

a) Realisasi Tahun Ini

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya sebesar 88% tahun 2022 dengan realisasi 80%, sehingga capaian kinerja sebesar 110% yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 41 Target dan Capaian Kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2022

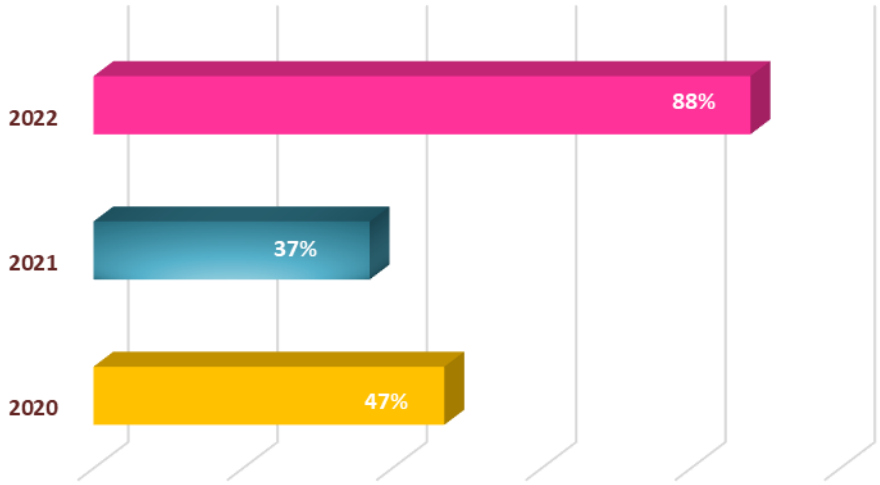


Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target Kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya sebesar 80% dengan capaian 88%.

b) Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Grafik 42 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Dari grafik diatas diketahui bahwa target dan capaian bila dibandingkan dengan tahun 2022 target indikator kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya sebesar 80% dan realisasinya 88%. Ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 target 45% dengan realisasi 37%.

c) Perbandingan Dengan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2021-2024

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan target dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2021-2024 sebesar 82%, maka capaian indikator kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya tahun 2022 sudah melebihi target RAK 2020-2024 yaitu sebesar 88%.

d) Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah

Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menegah karena tidak tertuang dalam RAP Ditjen P2P tahun 2022 – 2024. Tetapi dalam Renstra Kemenkes tahun 2020-2024 terdapat indikator jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 5.059 orang pada tahun 2022, sehingga persentase ASN KKP Kelas II Panjang yang ditingkatkan kapasitasnya sebesar 88% dapat mendukung pencapaian indikator Rencana Strategis tersebut.

e) Perbandingan Dengan Target Nasional

Dalam Rencana Strategis Kemenkes tahun 2020-2024 terdapat indikator jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 5.059 orang pada tahun 2022, sehingga persentase ASN KKP Kelas II Panjang yang ditingkatkan kapasitasnya sebesar 88% dapat mendukung pencapaian indikator Rencana Strategis tersebut.

f) Perbandingan Dengan Satker Sejenis

Perbandingan dengan Satker sejenis dilakukan pada KKP Bandung yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 43 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya dengan Satker Sejenis Tahun 2022



Sumber : Laporan Monev Bulanan Capaian Kinerja KKP Kelas II Panjang Tahun 2022

Jika dilihat dari grafik diatas bahwa capaian indikator kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya KKP Panjang dan KKP Bandung sudah sama mencapai target. Walaupun, capaian KKP Panjang lebih tinggi dari KKP Bandung dimana capaian KKP Panjang sebesar 88%, sedangkan KKP Bandung sebesar 81%.

5) Analisis program yang Menunjang Keberhasilan Capaian

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja dilakukan dari beberapa kegiatan sepanjang tahun 2022 diantaranya kegiatan peningkatan kapasitas ASN ini melalui kegiatan – kegiatan pelatihan, baik pelatihan yang diadakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I, pelatihan yang diadakan balai pelatihan kesehatan, kegiatan yang dilaksanakan oleh universitas yang berkaitan dengan pencegahan

dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara, pelatihan/diklat workshop manajerial ataupun keilmuan yang diadakan oleh instansi-instansi lain baik diikuti dengan biaya dan fasilitas dari satker maupun secara swadaya dari staf masing-masing, baik secara virtual maupun secara langsung untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas petugas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang.

6) Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian indikator kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya tahun 2022 sebesar 88% dari target 80%. Sehingga capaian kinerja untuk indikator sebesar 110%. Capaian indikator kinerja ini meningkatkan tajam dari tahun sebelumnya dimana tahun 2020 dan 2021 kegiatan ini tidak mencapai target, sedangkan tahun 2022 kegiatan ini sudah melebiohi target yang ditetapkan.

Kegiatan ini terlaksana dengan baik didukung oleh anggaran KKP Kelas II Panjang yang memfasilitasi para stafnya untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan berbagai pelatihan, diklat ataupun workshop, menyusun *Need Training Analysis* supaya mengetahui kebutuhan *training* yang dibutuhkan oleh segenap KKP Kelas II Panjang, sehingga memberikan kesempatan yang tepat dan proporsional kepada setiap pegawai untuk mengikuti pelatihan, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas ASN, mendorong ASN untuk mengikuti peningkatan kapasitas ASN secara mandiri melalui webinar agar mencapai batas minimal 20 JPL dan monitoring rutin peningkatan kapasitas ASN setiap bulan oleh para manajerial baik dari kepala kantor ataupun dari sub bag adum dan para koordinator.

7) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya tahun 2022 tercapai 110% dengan realisasi anggaran sebesar 95,85.%%. Capaian kinerja lebih besar dari persentase realisasi anggaran sehingga sudah efisien dengan nilai efisiensi sebesar 57,36%.

Dalam menganalisis penggunaan sumber daya kita bisa menggunakan prinsip 5M unsur manajemen, sehingga pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia ataupun sumber daya anggaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Pengertian 5M meliputi *Man, Money, Materials, Machines, and Methods* (Manusia,

Uang, Material, Mesin dan Metode). *Man* merujuk pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh instansi/organisasi. *Money* atau uang dalam hal ini mengacu pada anggaran dalam pembiayaan kegiatan. Material termasuk pada sarana dan prasarana yang yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan tupoksi KKP di lapangan. *Machine* atau mesin dalam hal ini adalah beberapa fasilitas ataupun aplikasi yang dapat mendukung dan mempermudah kegiatan suatu organisasi dalam melayani pengguna jasa seperti aplikasi yang bersifat elektronik yang sebelumnya manual ataupun alat-alat yang bisa digunakan secara digital yang menciptakan efesiensi kerja baik dari segi waktu ataupun tenaga. Sedangkan, metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya proses pekerjaan dan layanan yang dalam hal ini merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat dalam suatu organisasi.

Pada unsur *Man* dalam efisiensi penggunaan SDM yaitu penggunaan SDM yang relatif efisien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan lain yang juga membutuhkan SDM yang handal. Jadi, kebutuhan akan tenaga yang profesional sangat penting untuk efisiensi penggunaan SDM. Penempatan SDM dalam hal ini pegawai KKP Kelas II Panjang harus sesuai dengan peta jabatan dan Analisis Beban Kerja berdasarkan jabatan fungsional untuk pelayanan dan peningkatan performa kerja yang baik. Disamping itu, integrasi dan kolaborasi dalam penempatan SDM untuk menjalankan tupoksi merupakan solusi untuk efisiensi SDM ini. Untuk mencapai realisasi indikator kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya dibutuhkan dukungan dari staf dan manajerial untuk mendorong mengikuti pelatihan baik secara mandiri ataupun dibiayai dari anggaran kantor. SDM yang handal dan professional akan sangat efektif dalam pekerjaan dilapangan. Meningkatkan semangat dari para staf itu sendiri untuk mengikuti pelatihan/*workshop* secara mandiri/swadaya dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi serta kapasitas pegawai sesuai dengan bidang ilmu untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas petugas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang.

Pada unsur *Money* dalam efisiensi penggunaan keuangan merupakan penggunaan sumber daya pembiayaan yang sangat efisien melalui prioritasi penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran pada indikator. Prioritas anggaran diarahkan untuk biaya kegiatan yang menuju bersifat pelatihan , pengayaan ataupun diklat.

Pada unsur Material dalam penggunaan efisiensi sarana dan prasarana dalam menjalankan tupoksi dilapangan, mengggunakan alat-alat untuk mendukung kinerja yang baik. Unsur mesin dalam penggunaan sumber daya menggunakan alat-alat yang sudah elektronik atapun digital akan mengefesienken pekerjaan dilapangan. Ada inovasi yang dilakukan untuk mempermudah layanan di lapangan. Pada unsur metode dalah hal ini SOP yang terdapat pada KKP Kelas II Panjang dalam kegiatan kekarantinaan, kepegawaian, keuangan atapun perencanaan. Penerapan SOP yang baik akan mengefisienkan pelayanan. Performa kerja akan baik dan sesuai dengan tuntunan aturan pelaksanaan.

Hasil pencapaian indikator didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022. Sumberdaya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan.

8) Kendala/Masalah Yang Dihadapi

1) Pada awal tahun 2022, capaian indikator kinerja Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya masih jauh dari target, sehingga perlu motivasi dan mendorong para ASN untuk mengikuti pelatihan, webinar secara mandiri.

9) Pemecahan Masalah

1) Terus dilakukan motivasi pegawai tersebut agar mengikuti pendidikan dan pelatihan baik secara langsung (tatap muka) ataupun virtual, apalagi yang sudah menduduki jabatan fungsional.
2) Saling memberi dan menyebarluaskan informasi pelatihan/seminar di media sosial ataupun di grup *whatsup* KKP Kelas II Panjang.

10) Realisasi Anggaran Indikator

Kegiatan atau program yang menunjang dalam indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 287.280.000,- dengan realisasi sebesar Rp 275.359.030,- atau dapat dipersentasikan sebesar 95,85%. Adanya selisih penyerapan anggaran dan realisasi ini karena ada kegiatan yang bersumber PNBP yang tidak bisa direalisasikan disebabkan target PNBP tahun 2022 yang tidak tercapai.

3.2 Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan tahun 2022 berasal dari DIPA 2022 sesuai dengan kertas kerja RKAKL Tahun Anggaran 2022. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II panjang Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Kegiatan

Berikut ini ditampilkan tabel yang menunjukkan alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan *Output* Kegiatan KKP Kelas II Panjang tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 22 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022

NO.	OUTPUT		PAGU	REALISASI	SISA	PERSEN
1.	4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	3.000.590.000	2.991.791.183	8.798.817	99,71%
2.	4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	13.584.322.000	13.186.290.845	398.031.155	97,07%
TOTAL			**16.584.912.000**	**16.178.082.028**	**406.829.972**	**97,55%**

Sumber : Berdasarkan Input Capaian Rincian Output Aplikasi SAKTI KPPN tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran per output kegiatan. Realisasi anggaran Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (4249) sebesar 99,71%. Sedangkan, realisasi anggaran Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (4815) sebesar 97,07%. Jadi, total realisasi anggaran KKP Panjang tahun 2022 sebesar 97,55%. Adanya selisih capaian pagu anggaran ini karena belanja pegawai yang tidak terserap disebabkan adanya pegawai yang pensiun dan adanya kebijakan pemberian gaji ke-13 dan ke-14 sebanyak 50% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 dan teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.05/2022 untuk yang bersumber dari APBN kebijakan pembayaran

tunjangan kinerja ke-13 sebanyak 50%.

b. Berdasarkan Rincian *Output*

Berikut ini ditampilkan tabel yang menunjukkan alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output Kegiatan KKP Kelas II Panjang tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 23 Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian *Output*
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022

KETERANGAN	PAGU	REALISASI	SISA
	16.584.912.000	**16.178.082.028**	**406.829.972**
DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	**3.000.590.000**	**2.991.791.183**	**8.798.817**
4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	3.000.590.000	2.991.791.183	8.798.817
4249.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.454.535.000	1.452.633.881	1.901.119
4249.QAH Pelayanan Publik Lainnya	1.183.290.000	1.181.080.359	2.209.641
4249.RAB Sarana Bidang Kesehatan	253.225.000	252.815.149	409.851
4249.TBC Layanan Manajemen SDM Internal	109.540.000	105.261.794	4.278.206
WA Program Dukungan Manajemen	**13.584.322.000**	**13.186.290.845**	**398.031.155**
4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	13.584.322.000	13.186.290.845	398.031.155
4815.AEA Koordinasi	87.730.000	87.663.974	66.026
4815.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.712.587.000	12.323.747.685	388.839.315
4815.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	434.200.000	430.000.000	4.200.000
4815.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	166.540.000	163.824.296	2.715.704
4815.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	183.265.000	181.054.890	2.210.110
		PERSEN	**97,55%**

Sumber : Berdasarkan Input Capaian Rincian Output Aplikasi SAKTI KPPN tahun 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa pagu anggaran KKP Kelas II Panjang sebanyak Rp 16.584.912.000,- dengan realisasi sebanyak Rp 16.178.082.028,- dan sisa anggaran sebanyak Rp 406.829.972,-. Sehingga, penyerapan anggaran KKP Kelas II Panjang tahun 2022 sebesar 97,55%. Sisa anggaran yang tidak terserap berasal dari belanja pegawai karena adanya pegawai yang pensiun dan kebijakan pembayaran tunjangan kinerja ke-13 dan ke-14 sebanyak 50% Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 dan teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.05/2022 untuk yang bersumber dari APBN kebijakan pembayaran tunjangan kinerja ke-13 sebanyak 50%.

c. Per Sumber Dana

Berikut ini ditampilkan tabel yang menunjukkan alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan Sumber Dana Kegiatan KKP Kelas II Panjang tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 24 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Tahun 2022

No.	(Kode) Sumber Dana	Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
1	(A) RUPIAH MURNI	Pegawai	9.895.275.000	9.521.190.962	(96.22%)	374.084.038
		Barang	3.651.948.000	3.630.282.875	(99.41%)	21.665.125
	13.981.423.000	Modal	434.200.000	430.000.000	(99.03%)	4.200.000
	13.151.473.837	Beban Bunga	0	0	0.00%	-
	94,06%	Subsidi	0	0	0,00%	-
		Hibah	0	0	0,00%	0
		Bantuan Sosial	0	0	0,00%	0
		Lain-Lain	0	0	0,00%	0
		Transfer	0	0	0,00%	0
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Pegawai	0	0	0,00%	0
		Barang	2.603.489.000	2.596.608.191	(99.74%)	6.880.809
		Modal	0	0	0,00%	0
		Beban Bunga	0	0	100,00%	0
	2.603.489.000	Subsidi	0	0	200,00%	0
	2.596.608.191	Hibah	0	0	300,00%	0
	99,74%	Bantuan Sosial	0	0	400,00%	0
		Lain-Lain	0	0	500,00%	0
		Transfer	0	0	600,00%	0
SISA			**16.584.912.000**	**16.178.082.028**	**97,55%**	**406.829.972**

Sumber : Berdasarkan Input Capaian Rincian Output Aplikasi SAKTI KPPN tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui pagu belanja Rupian Murni sebanyak Rp 13.981.423.000,- dengan realisasi 13.151.473.837 (94,06%). Sedangkan, pagu belanja PNBP sebanyak Rp 2.603.489.000,- dengan realisasi Rp 2.596.608.191,- (99,74%).

d. Berdasarkan Indikator Kinerja

Berikut ini ditampilkan tabel yang menunjukkan alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan indikator Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Panjang tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 25 Realisasi Anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang Berdasarkan Indikator Kinerja 2022

No.	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran Keluaran (RARO)	Sisa	Persen
1.	Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara*	2.132.532.000	2.129.678.949	2.853.051	99,87
2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.	1.118.648.000	1.112.780.440	5.867.560	99,48
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara.	74.070.000	74.070.000	-	100,00
4.	Nilai kinerja anggaran.	143.590.000	142.989.917	600.083	99,58
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.	12.718.498.000	12.333.372.241	385.125.759	96,97
6.	Kinerja implementasi WBK satker.	110.294.000	109.831.451	462.549	99,58
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	287.280.000	275.359.030	11.920.970	95,85
	TOTAL	**16.584.912.000**	**16.178.082.028**	**406.829.972**	**97,55**

Sumber : Berdasarkan Input Capaian Rincian Output Aplikasi SAKTI KPPN tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran paling tinggi pada indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara dengan alokasi Rp 2.132.532.000,- dan realisasi Rp 2.129.678.949,- (100%).

3.3 Efisiensi Sumber Daya

Pada aplikasi E-monev DJA data per 09 Januari 2023, nilai kinerja anggaran KKP Kelas II Panjang sebesar 87,35 dengan rincian antara lain penyerapan sebesar 97,34%, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 97,4%, capaian rincian output sebesar 99,4%, capaian keluaran (CRO) sebesar 100%, efisiensi 2,83, dan nilai effisiensi sebesar 57,07%. Menurut PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran

keluaran dengan capaian keluaran. Rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^{m}\left(\left(AAKRO_j \times \left(\prod_{i=1}^{n} CRO_{ji}\right)^{\frac{1}{n}}\right) - RAKRO_j\right)}{\sum_{j=1}^{m}(AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
$AAKRO_j$: alokasi anggaran KRO j
$RAKRO_j$: realisasi anggaran KRO j
CRO_{ji} : capaian RO i pada KRO j
m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja
n : Jumlah RO pada suatu KRO

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal efisiensi yang dicapai sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai 100% dengan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :
NE : Nilai Efisiensi
E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan adalah skala minimal 0%. Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh Nilai Efisiensi sebagai berikut :

Tabel 26 Nilai Efisiensi Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran Keluaran (RARO)	Capaian rincian Output (CRO)	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1.	Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara*	2.132.532.000	2.129.678.949	1,05	2,86	57,14

No.	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran Keluaran (RARO)	Capaian rincian Output (CRO)	Efisiensi	Nilai Efisiensi
2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.	1.118.648.000	1.112.780.440	1,04	2,84	57,10
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara.	74.070.000	74.070.000	1,24	3,04	57,61
4.	Nilai kinerja anggaran.	143.590.000	142.989.917	1,03	2,83	57,08
5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.	12.718.498.000	12.333.372.241	1,03	2,86	57,16
6.	Kinerja implementasi WBK satker.	110.294.000	109.831.451	1,03	2,84	57,09
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	287.280.000	275.359.030	1,10	2,95	57,36
	TOTAL	**16.584.912.000**	**16.178.082.028**	**1,08**	**2,89**	**57,22**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran tahun 2022 sebanyak Rp 16.584.912.000, dengan realisasi anggaran Rp 16.178.082.028,-. Efisiensi terbesar pada indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor risiko di Pintu Msuk Negara sebesar 57,61%. Sedangkan, besaran nilai efisiensi anggaran KKP kelas II Panjang tahun 2022 sebesar 57,22%.

3.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjanguntuk menunjang kegiatan operasional terdiri dari aset tepat, benda bergerak dan tidak bergerak dengan rincian sebagi berikut :

Tabel 27 Laporan Aset KKP Kelas II Panjang Berdasarkan SIMAK BMN Per 31 Desember 2022

No.	Aset	Jumlah	Kondisi
1.	Kantor induk	1 Bangunan	Baik
2.	Kantor wilayah kerja	3 Bangunan	Baik
3.	Kendaraan roda 2	14 unit	Baik
4.	Kendaraan roda 4	14 Unit	Baik

Adapun nilai merupakan Barang Milik Negara di KKP Kelas II Panjang secara keseluruhan adalah :

- Tanah : Rp 6.713.809.181,-
- Peralatan dan Mesin : Rp 23.498.005.225,-
- Gedungdan bangunan : Rp 7.371.868.035,-
- Jaringan : Rp 64.472.000,-
- Aset tetap lainnya : Rp 17.000.000,-

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari 7 indikator kinerja KKP Kelas II Panjang, tercapai melebihi target yang sudah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian Indikator kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 0,98 dengan target 0,93, sehingga capain kinerja sebesar 105%.
2. Capaian indikator kinerja Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan sebesar 100% dari target 97%, sehingga capaian kinerja sebesar 104%.
3. Capaian indikator kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 0,99 dengan target 0,80, sehingga capaian kinerja sebesar 124%.
4. Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran 87,35 dari target 85, sehingga capaian kinerja sebesar 103%.
5. Capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 96,12 dari target 93, sehingga capaian kinerja sebesar 103%.
6. Indikator kinerja implementasi WBK satker tercapai sebesar 80,47 dari target 78, sehingga capaian kinerja sebesar 103%.
7. Capaian indikator kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya 88,31% dengan target 80%, sehingga capaian kinerja sebesar 110%.
8. Rata rata kinerja capaian indikator KKP Kelas II Panjang tahun 2022 sebesar 108%.
9. Untuk kinerja keuangan pada tahun 2022, berdasarkan OM-SPAN (*Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), realisasi anggaran semua jenis belanja mencapai 97,55% atau sebesar Rp 16.178.082.028,- dari total pagu sebesar Rp 16.584.912.000,-.
10. Realisasi anggaran tertinggi berada pada indikator kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara sebesar 99,87%. sedangkan realisasi terendah pada indikator Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan sebesar 99,48%.

Dalam menghadapi tantangan dan isu strategis di masa yang akan datang sangat diperlukan inovasi, totalitas dan loyalitas dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka upaya cegah tangkal penyakit dari dalam dan keluar negeri sehingga memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit dalam

pembangunan kesehatan khususnya untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan`global.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi dan langkah-langkah yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerja KKP Kelas II panjang antara lain :

1) Melakukan mutasi internal penempatan pegawai antara petugas induk dan wilayah kerja dalam rangka *rolling* penyegaran iklim kerja di lingkungan KKP Kelas II Panjang;
2) Kerjasama dan koordinasi yang intensif lintas sektoral dengan membangun jejaring kerja yang lebih baik, lebih solid dengan instansi yang terkait di Pelabuhan dan bandara seperti membentuk membentuk Tim Reaksi cepat Gabungan Dengan Dinkes Propinsi dan Kab/Kota, *coffe morning* dalam rangka penyelerasan kegiatan pelayanan terintegrasi dan terpadu.
3) Melakukan audiensi dan koordinasi ke stakeholder pelabuhan/bandara dalam rangka pembentukan pelabuhan/bandara sehat;
4) Memotivasi dan menugaskan segenap pegawai KKP Kelas II Panjang untuk selalu *update* kemampuan, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan – pelatihan yang tersifat teknis maupun pendukung baik *online* dan *offline*;
5) Komitmen bersama dan bersinergi yang kuat antar segenap pegawai serta menjadikan kepala kantor dan tim manajerial sebagai *role model* dalam meningkatkan kinerja dan *performa* pelayanan KKP Kelas II Panjang;

Demikian Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhaan Kelas II Panjang tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tahun 2022.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Panjang tahun 2022 (Awal dan Revisi)

Lampiran 2 : Kertas Kerja Perhitungan Kinerja Tahun 2022

Lampiran 3 : Matriks Capaian Kinerja Turunan Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Marjunet, SKM, M.Kes.
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp 16.584.912.000, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS	**R. Marjunet, SKM, M. Kes.**
NIP 196405201991031003	NIP 196704241989031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PANJANG

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	1.199.715
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	96%
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	94%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	85
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94
		6	Kinerja implementasi WBK satker	77
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	13.584.322.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	3.000.590.000
	TOTAL	**Rp.**	**16.584.912.000**

Jakarta, Desember 2021

Direktur Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Panjang

R. Marjunet, SKM, M. Kes.
NIP 196704241989031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Marjunet, SKM, M.Kes.
Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp 16.584.912.000, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS	**R. Marjunet, SKM, M. Kes.**
NIP 196405201991031003	NIP 196704241989031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PANJANG

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	0,93
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,8
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	90
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96
		6	Kinerja implementasi WBK satker	77
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	13.584.322.000
2.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	3.000.590.000
	TOTAL	**Rp.**	**16.584.912.000**

Jakarta, Juli 2022

Direktur Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit,

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Panjang

R. Marjunet, SKM, M. Kes.
NIP 196704241989031002

PERHITUNGAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BERDASARKAN TURUNAN KEGIATAN PER SEKSI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PANJANG
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PK TURUNAN	TARGET	CAPAIAN	PERSEN
1.	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	**1. *Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara****		**0,93**	**0,98**	***105%***
			1. Pemeriksaan Penapisan Orang	**1.179.140**	**3.237.518**	***275%***
			a. Penerbitan *International Certificate Vaccine* (ICV)	3.000	8.416	*281%*
			b. Pemeriksaan pelaku perjalanan/jemaah umroh	1.168.630	3.220.602	*276%*
			c. Jemaah haji	3.200	3.214	*100%*
			d. Jumlah penerbitan sertifikat izin angkut orang sakit	102	227	*223%*
			e. Jumlah penerbitan sertifikat izin laik terbang	231	830	*359%*
			f. Pemeriksaan keur kesehatan	560	810	*145%*
			g. Rekap PE Luar Negeri	5	7	*140%*
			h. VCT *Mobile* (KTS HIV)	1.200	1.200	*100%*
			j. Skrinning penyakit menular TB	1.200	1.200	*100%*
			j. Skrinning penyakit menular Malaria	1.000	1.000	*100%*
			k. Sertifikat Penjamah Makanan	12	12	*100%*
			2. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina	**50.418**	**50.848**	***101%***
			a. Pemeriksaan dalam rangka penerbitan COP	4.866	4.569	*94%*
			b. Pemeriksaan dalam rangka penerbitan PHQC	44.812	45.492	*102%*
			c. Pemeriksaan dalam rangka penerbitan P3K	309	369	*119%*
			d. Pemeriksaan dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi(SSCEC/SSCC)	431	418	*97%*
			3. Pemeriksaan barang	**48**	**54**	***113%***
			a. Jumlah penerbitan surat izin angkut jenazah	48	54	*113%*
			4. Pemeriksaan lingkungan	**930**	**1.422**	***153%***
			a. Pemeriksaan Sanitasi TTU	240	367	*153%*
			b. Pemeriksaan Sanitasi TPM	250	351	*140%*
			c. Penyediaan Sarana Air Bersih	220	352	160%
			d. Pengendalian Vektor	220	352	160%
		2. *Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.*		**97%**	**100%**	***104%***
			1. Faktor resiko yang dikendalikan pada orang	100%	100%	*100%*
			2. Faktor resiko yang dikendalikan pada barang	86%	0%	*0%*
			3. Faktor resiko yang dikendalikan pada alat angkut	100%	100%	*100%*

		4.	Faktor resiko yang dikendalikan pada lingkungan	100%	100%	*100%*
3.	*Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara**			**0,80**	**0,99**	***124%***
		1.	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	95%	100%	***105%***
		2.	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	100%	100%	***0%***
		3.	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	98%	100%	***102%***
		4.	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	98%	100%	***102%***
		5.	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	95%	98%	***103%***
		6.	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	100%	100%	***100%***
		7.	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	98%	100%	***102%***
		8.	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	90%	100%	***111%***
		9.	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	90%	100%	***111%***
		10.	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	95%	99%	***104%***
4.	*Nilai kinerja anggaran*			***85***	***87,35***	***103%***
5.	*Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran*			***93***	***96,13***	***103%***
6.	*Kinerja implementasi WBK satker*			***78***	***80,47***	***103%***
7.	*Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya*			***80%***	***88%***	***110%***
					NILAI KINERJA	**108%**

Note :

: PKSE
: UKLW
: PRL
: Tata Usaha
* : Realisasi dihitung dengan rumus indeks

Bandar Lampung, 10 Januari 2023
Kepala KKP Kelas II Panjang

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Sulistyonio, SKM, M.Kes.
NIP 197011201993031002